

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PROGRAM ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA
(ANGGUR MERAH) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN”**

(Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa,
Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

ANASTASIUS YOANES SIGA

12520147

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2016



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sekolah Tinggi

Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Pada hari : Selasa

Tanggal : 05 April 2016

Jam : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Dra. Hj. Tri Daya Rini, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Drs. Sumarjono, M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

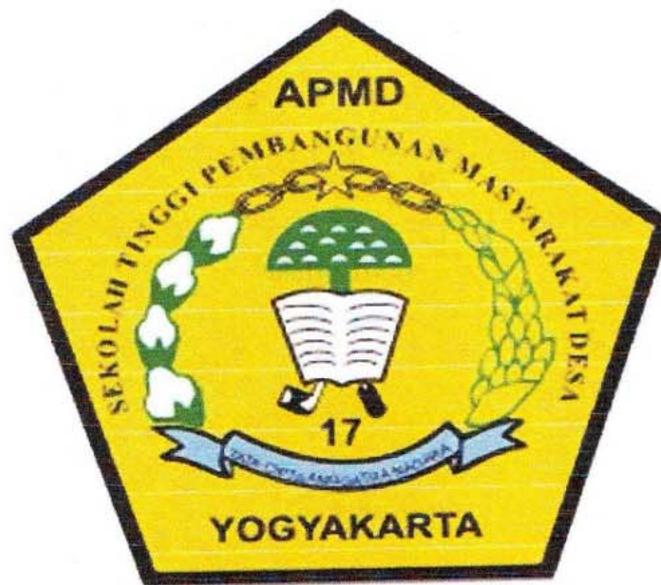


Gregorius Saldan, S.IP., M.A.

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM
ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH)
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN”**

(Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa,
Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur)



OLEH:

ANASTASIUS YOANES SIGA

12520147

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA



MOTTO

**“KARENA MASA DEPAN SUNGGUH ADA, DAN HARAPANMU TIDAK
AKAN HILANG”**

(Amsal 23 : 18)

**“HAI ANAKKU, DENGARKANLAH DIDIKAN AYAHMU, DAN JANGAN
MENYIA-NYIAKAN AJARAN IBUMU”**

(Amsal 1:8)

PERSEMBAHAN

Karya dalam tulisan yang sederhana ini saya persembahkan untuk :

- ♥ Bunda Maria, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa di Surga yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya serta membimbing dan memberkati setiap langkah hidup saya.
- ♥ Bapa dan Mama yang menjadi sumber semangat dan tujuan hidup saya. Terima kasih sudah mendoakan saya setiap hari, menasihati, dan membimbing saya. Terima kasih sudah menjadi penyokong hidup yang tiada lelahnya membiayai pendidikan saya.
- ♥ Kakak Anita Siga yang selalu ada buat saya ketika saya membutuhkan pertolongan dan senantiasa melindungi saya. Terima kasih kak Ani.
- ♥ Nene Babo, Opa Frans Busa, Oma Emiliana, Nene Ule, Om Ose, Om Anis, Om Daniel, Bapa Besar, Mama Besar yang selalu menjaga dan melindungi serta membantu saya di tanah orang. Terima kasih banyak.
- ♥ Adik Elsa Siga ndut, makasih ee sudah memberikan saya banyak motivasi. Untuk adik Tasya Siga ngeva ngo'i yang selalu buat saya tertawa dengan cerita upin-ipinnya.
- ♥ Nene Uge dengan wae ruranya menjadi air berkat bagi saya. Terima kasih banyak nene.
- ♥ Keluarga besar di Bobou (Bajawa) dan Keluarga Besar di Wudu (Nagekeo), terima kasih atas dukungan moril dan materiilnya.
- ♥ Kakak Vivi, kak Aris, dan kak Mery yang telah banyak membantu saya dalam proses skripsi, terima kasih banyak.
- ♥ Adik Hans onko yang selalu membuat perut saya kenyang dengan resep makanan yang dikarangnya sendiri, makasih ee onko sudah banyak membantu.
- ♥ Sabeum Nim Maklon, Sabeum Ando, Sabeum Resnes, Sabeum Noby, Sabeum Darwin, dan seluruh teman-teman UKM Taekwondo APMD serta

teman-teman di Black Eagle DSC. Terima kasih sudah mengajarkan saya banyak hal dan berprestasi.

- ♥ Teman-teman saya: Antonio Naimnanu, Frit Regaz, Echy Doraemon, Fitri Ayu, Yanto Ngeva, Adil Ngeva, Budin Ngeva, Gloria Ngeva, dan Inne Fatima Abubakar serta teman-teman yang saya tidak bisa sebut satu per satu. Makasih banyak atas dukungannya.
- ♥ K'Rivan Dore, k'Hans Dore, Rian Dore, dan K'Ari Dopo yang telah banyak membantu dari awal saya datang ke Jogja sampai sekarang. Terima kasih banyak.
- ♥ Bapak dan Ibu kos yang sudah menyediakan tempat yang nyaman bagi saya, dan buat teman-teman kos khususnya mas Aziz yang sudah banyak membantu dengan meminjam motornya. Terima kasih banyak.
- ♥ Teman-teman KKN, khususnya kelompok 12 : Adil, Glori, k'Rio, Rio Valen, Cristy, Dumai. Terima kasih banyak atas kerjasamanya.
- ♥ Bapak dan Ibu dukuh, mas Andang, mbak Erna, Niko, dan Ezra serta seluruh masyarakat Dusun Padangan. Terima kasih banyak sudah menerima saya selama KKN.
- ♥ Teman-teman Angkatan 2012 yang sudah memberi banyak warna selama masa kuliah. Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpah-Nya serta berkat Roh Kudus dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kendala dan halangan apapun. Dengan skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN”**(Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur).

Dalam segala kehidupan manusia yang cenderung mempunyai keterbatasan dan kekurangan serta kesalahan, begitu pula halnya penulis juga memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh banyak pihak baik berupa bimbingan, saran, nasihat, serta dukungan moril maupun materiil sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Hj. Tri Daya Rini, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si, selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menguji serta memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si, selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menguji serta memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kabupaten Ngada yang telah memberikan izin untuk penelitian ini di Desa Bowali.
8. Seluruh jajaran Pemerintah Desa Bowali dan masyarakat Desa Bowali yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pengurus Koperasi Tunas baru Anggur Merah Bowali serta Pendamping Kelompok Masyarakat Anggur Merah Bowali yang telah meluangkan waktu dan informasi serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa STPMD ”APMD” Yogyakarta angkatan tahun 2012 yang telah banyak membantu dan memberi semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Dengan hati yang tulus dan ikhlas semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga terselesainya penyusunan penulisan skripsi ini. Amin.

“Tak ada gading yang tak retak”, begitu juga dengan penyusunan skripsi ini yang masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan masih sedikitnya pengetahuan yang ada di penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan suatu kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, besar harapan penulis agar karya yang tak seberapa ini dapat berguna bagi semua orang, serta dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu dalam hasil penelitian ini.

Yogyakarta, April 2016

Penulis

Anastasius Yoanes Siga

DAFTAR ISI

Halaman Judul -----	i
Halaman Pengesahan -----	ii
Halaman Motto -----	iii
Halaman Persembahan -----	iv
Kata Pengantar -----	vi
Daftar Isi -----	ix
Daftar Tabel -----	xi
Daftar Gambar-----	xiii
Sinopsis -----	xiv
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Rumusan Masalah -----	15
C. Tujuan Penelitian -----	15
D. Manfaat Penelitian -----	16
E. Kerangka Teori -----	16
1. Kebijakan Publik -----	16
1.1. Definisi Kebijakan Publik -----	16
1.2. Lingkungan Kebijakan -----	24
1.3. Jenis-Jenis Kebijakan -----	25
1.4. Sifat Kebijakan Publik -----	26
2. Implementasi Kebijakan Publik -----	28
2.1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah-----	31
2.2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards -----	32
3. Kemiskinan Dan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah)-----	41
3.1. Kemiskinan -----	41
3.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah)	

(Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018) ---	47
F. Ruang Lingkup -----	58
G. Metode Penelitian -----	59
1. Jenis Penelitian -----	59
2. Unit Analisis -----	60
3. Teknik Pengumpulan Data -----	61
4. Teknik Analisis Data -----	63
BAB II. PROFIL DESA BOWALI DAN PROFIL ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH) -----	66
A. Keadaan Geografis-----	66
B. Keadaan Demografi -----	68
C. Keadaan Ekonomi -----	70
D. Keadaan Sosial -----	72
E. Pemerintahan -----	78
F. Profil Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah -----	90
BAB III. ANALISIS DATA -----	112
A. Deskripsi Narasumber-----	112
B. Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) Untuk Penanggulangan Kemiskinan -----	118
BAB IV. PENUTUP-----	160
A. Kesimpulan -----	160
B. Saran -----	163

Daftar Pustaka

Pedoman Wawancara (Interview Guide)

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tabel Perkembangan Usaha Ekonomi Kelompok -----	12
Tabel II.1	Batas Wilayah -----	66
Tabel II.2	Luas Wilayah -----	67
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin -----	68
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Menurut Usia -----	69
Tabel II.5	Mata Pencaharian Penduduk -----	71
Tabel II.6	Tingkat Kesejahteraan Penduduk -----	72
Tabel II.7	Tingkatan Pendidikan -----	73
Tabel II.8	Prasarana Pendidikan -----	74
Tabel II.9	Agama -----	75
Tabel II.10	Prasarana Transportasi Darat -----	76
Tabel II.11	Sarana Transportasi Darat -----	76
Tabel II.12	Sarana dan Prasarana Kesehatan -----	77
Tabel II.13	Pemerintahan Desa Bowali -----	83
Tabel II.14	Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa Bowali -----	84
Tabel II.15	Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD ----	86
Tabel II.16	Prasarana dan Sarana Dusun -----	87
Tabel II.17	Lembaga Kemasyarakatan Desa Bowali -----	88
Tabel II.18	Penerima Dana Program Anggur Merah Tahap I Tahun 2014--	103
Tabel II.19	Penerima Dana Program Anggur Merah Tahap II Tahun 2016 -	105
Tabel III.1	Identitas Narasumber -----	113
Tabel III.2	Data Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin -----	114

Tabel III.3	Data Narasumber Berdasarkan Umur -----	115
Tabel III.4	Data Narasumber Berdasarkan Pekerjaan/ Jabatan -----	116
Tabel III.5	Data Narasumber Berdasarkan Pendidikan -----	117
Tabel III.6	Bentuk Komunikasi Program Anggur Merah di Desa Bowali --	119
Tabel III.7	Sumber Daya dalam Program Anggur Merah -----	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Pemerintahan Desa Bowali -----	89
Gambar II.2	Mekanisme Penetapan Desa -----	98
Gambar II.3	Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan Dana -----	101
Gambar II.4	Mekanisme Pelaporan -----	102
Gambar II.5	Struktur Organisasi Koperasi Tunas Baru Anggur Merah ----	109

SINOPSIS

Dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemerintah Provinsi NTT membuat kebijakan yang berbasis desa. Kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2018, yang merupakan inovasi kebijakan sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi berdasarkan potensi yang ada pada masyarakat desayang diharapkan dapat menciptakan masyarakat desa maju dan produktif. Program Anggur Merah didukung alokasi dana APBD yaitu dana segar (*fresh money*) Rp. 250 juta untuk setiap desa yang berwadahkan koperasi. Melalui program Anggur Merah yang direalisasi di Desa Bowali yang merupakan Desa dengan 165 kepala keluarga prasejahtera diupayakan kemandirian masyarakat dalam membangun Desa dapat teraktualisasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bowali, Kabupaten Ngada, NTT?. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Anggur Merah untuk penanggulangan kemiskinan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program Anggur Merah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Bowali, Kabupaten Ngada, NTT. Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu terdiri dari Kepala Desa (1 orang), Pendamping Kelompok Masyarakat (1 orang), Pengurus Koperasi (3 orang), dan Anggota Koperasi (10 orang). Untuk pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah koleksi data, reduksidata, mendisplay data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian implementasi program “Anggur Merah” dianalisis menggunakan empat aspek yakni Komunikasi, Sumberdaya, Kecenderungan/Tingkah Laku dan Struktur Birokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi dan koordinasi diantara pelaku program dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa belum terlaksana secara maksimal; Masyarakat penerima program sudah memahami secara baik manfaat dan kegunaan program sehingga terkesan partisipatif; Pendampingan yang cukup maksimal sehingga penggunaan dana direncanakan secara baik dengan berpatok pada kebutuhan dasar masyarakat desa; Kesiapan pengurus koperasi “Anggur Merah” di desa dalam hal sumberdaya manusianya belum memadai; Dalam hal penanggulangan kemiskinan melalui Program Anggur Merah ini membawa dampak yang baik bagi masyarakat miskin di Desa Bowali. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Program Anggur Merah di Desa Bowali belum terimplementasikan secara optimal. Untuk itu, perlu untuk meningkatkan komunikasi secara intensif agar informasi program dapat tersalur dengan baik, penting untuk dilakukan penguatan kapasitas bagi para pendamping dan pemerintah desa sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan program, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan yang terpenting juga perlu dilakukan penyadaran kritis kepada masyarakat melalui sosialisasi program secara berkala sehingga masyarakat semakin menyadari bahwa program “Anggur Merah” hadir untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di Indonesia khususnya dalam 25 lebih tahun terakhir ini, telah menunjukkan berbagai hasil fisik dalam bentuk aset-aset pembangunan yang cukup menakjubkan. Akan tetapi, kalau dilihat lebih lanjut, maka masih banyak pula berbagai rintangan dan persoalan yang muncul antara lain, kemiskinan dan kesenjangan masih merajalela. Kesenjangan, selain kemiskinan, juga merupakan momok pembangunan yang bakal sulit dicari pemecahannya. Muncul konglomerasi, monopolisme, dan oligopolisme dalam industri dan ekonomi merupakan contoh-contoh adikuasa ekonomi yang kontras terhadap kemiskinan. Dalam banyak hal, masalah pemerataan atau ketidakmerataan dapat dilihat, baik segi pendapatan, dari segi pekerjaan maupun segi usaha.

Para pendiri Republik telah memelopori perumusan dasar yang jelas. Menyatakan bahwa dalam cita-cita masyarakat adil dan makmur terkandung suatu pernyataan bahwa keadaan dimulai dengan keadaan yang tidak merata dan tidak adil. Rakyat banyak masih tetap terbelakang dan miskin, di samping lapisan atas yang beruntung dapat memiliki dan menguasai bidang materiil yang cukup lumayan. Hal ini berarti, baik strategi maupun program pembangunan harus memusatkan dana dan daya pada perbaikan nasib rakyat yang ada dalam keadaan materiil maupun spiritual agak terbelakang.

Sejalan dengan hal tersebut dan dengan semangat otonomi daerah yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan lagi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sistem pemerintah di Indonesia berubah dari sistem sentralistis menjadi desentralistis sehingga untuk setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya di dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Desentralisasi merupakan sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis di seluruh level, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, menghargai berbagai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi penghidupan masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional.

Dalam konteks desentralisasi, Himawan Pambudi, ketua Rumah Budaya LAPERA, mengemukakan dalam tulisannya bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebenarnya menjadi titik awal upaya membangun partisipasi dan kedaulatan rakyat. Undang-Undang tersebut menjamin adanya desentralisasi partisipasi pembuatan kebijakan publik yang lebih dekat dengan rakyat (Jentera, 2007:2). Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam sebuah kegiatan pengembangan masyarakat, terlebih lagi dalam era otonomi daerah sekarang ini partisipasi publik atau masyarakat menjadi elemen yang penting dalam demokrasi. Dalam konteks ini, partisipasi publik tidak hanya membawa implikasi pada tatanan supra struktur (mekanisasi manajemen pemerintahan) tetapi juga pada tatanan infrastruktur (kondisi masyarakat). Dalam

kaitan dengan ini beberapa pemerintah daerah gencar mengembangkan program inovatif untuk mendongkrak percepatan pembangunan di daerahnya dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek dalam program tersebut.

Secara garis besar ada dua tujuan utama kebijakan desentralisasi yakni tujuan politik dan tujuan administratif. Tujuan politik akan memposisikan pemerintahan daerah sebagai media pendidikan politik masyarakat tingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik pada tingkat nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani (*civil society*). Sedangkan tujuan administratif akan memposisikan pemerintahan daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis (Ratnawati, 2006).

Pada hakikatnya kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintahan daerah dituntut untuk meningkatkan rasa tanggungjawabnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Hal yang lebih penting adalah masyarakat akan lebih merasakn kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai unit pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat di daerah. Selain itu, otonomi daerah memiliki peranan dan posisi yang strategis karena adanya kepercayaan kepada daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki daerah.

Bersamaan dengan era reformasi, pada dasarnya daerah mempunyai peluang besar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan

pembangunan. Adalah kesempatan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat. Sebenarnya daerah dapat mulai dahulu merumuskan pelaksanaan kebijakan yang nantinya dapat menjadi peraturan pemerintah melaksanakan Undang-Undang bahkan dapat menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang benar-benar sesuai dengan aspirasi dan potensial masyarakat lokal. Peluangnya sangat luas dari sisi nasional reformasi menghendaki kembali pada proses pembangunan sesuai dengan mekanisme pasar. Mekanisme pasar mengandung pengertian pembangunan yang muncul dari dilaksanakan oleh dan hasilnya untuk dinikmati masyarakat.

Kesiapan masyarakat dalam pembangunan dapat dinilai dari pengalaman membangun selama ini. Sejalan dengan semangat reformasi maka identifikasi potensi sangat diperlukan. Reformasi tidak harus mengganti semuanya dengan yang serba baru. Reformasi adalah melanjutkan dan memantapkan hal-hal yang telah berhasil dicapai. Meneruskan yang baik, menyempurnakan yang belum sesuai, mengganti yang tidak sesuai, dan menambahkan yang kurang. Dengan pemahaman ini maka identifikasi, evaluasi dan formulasi kembali langkah-langkah yang telah dicapai diharapkan mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat.

Bergulirnya otonomi daerah juga bukannya semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masyarakat kelas bawah. Pemberian wewenang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan daerah belum diikuti dengan penguatan piranti kebijakan dan strategi pembangunan sosial. Bahkan terdapat ironi di beberapa daerah di mana

institusi-institusi kesejahteraan sosial yang sudah mapan, alih-alih dibinakembangkan malahan dibumihanguskan begitu saja.

Kepedulian, kepekaan, maupun partisipasi aktif masyarakat adalah sangat penting dan harus selalu didorong, baik dalam *input process* maupun dalam *output process*, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah bisa efektif dan optimal dalam mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan, yaitu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat luas dalam semua dimensinya. Sekaligus, yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, peran publik yang aktif adalah sangat penting sekali dalam mengawal kebijakan publik melewati setiap proses dan tahap kebijakan publik.

Untuk melaksanakan pembangunan yang secara adil dan merata, isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan nasional adalah tingkat kemiskinan di dalam suatu wilayah yang masih tinggi dan semakin bertambah penduduk yang miskin. Adanya kemiskinan di dalam suatu wilayah merupakan potret bahwa pembangunan itu secara umum kurang berhasil sehingga pada dasarnya keberhasilan pembangunan suatu wilayah tergantung pada kegiatan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya.

Kemiskinan dan pengangguran masih sangat mudah ditemukan di hampir semua negara, termasuk Indonesia. *International Organisation Labour* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir 1999 mencapai 129.6 juta jiwa atau sekitar 66,3 % dari jumlah seluruh penduduk. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pemberdayaan yang tepat dan cepat untuk mengatasi

kemiskinan. Hal ini karena tidak sedikit usaha penanggulangan kemiskinan yang mengalami kegagalan dikarenakan kurang tepatnya strategi yang diterapkan dengan situasi dan kondisi yang ada .

Korter dan Carner mengemukakan tiga tema penting yang dianggap sangat menentukan bagi konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat yaitu:

1. Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa kendatipun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin.
3. Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun yang miskin dalam pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal. (Hary Hikmat, 2010: 91-92).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menghadapi masalah kemiskinan dengan segala kompleksitasnya. Sejak pemerintahan orde baru terutama mulai tahun 1970-an sangat gencar dikumandangkan upaya-upaya mengatasi kemiskinan. Dengan bertumpu pada slogan pembangunan segala upaya dikerahkan untuk maksud tersebut. Politik ekonomi terbuka dengan modal asing sebagai panglima pembangunan, namun pengangguran dan kemiskinan tetap saja menumpuk dari hari ke hari.

Gejala kemiskinan sepanjang sejarah manusia di seantero dunia tidak pernah hilang, dan selalu saja ada sekelompok manusia yang berusaha mencari dan memerangi sebab-sebabnya. Tuntutan keadilan juga yang sepanjang sejarah ada secara implisit mengakui adanya lapisan yang berkecukupan dan ada yang miskin. Sejak Proklamasi kemerdekaan pendekar-pendekar bangsa kita sudah bertekad untuk memerangi kemiskinan. Bahkan, untuk mengangkat bangsa, dapat dikatakan revolusi fisik kita yang tercetus kemudian sebenarnya disulut oleh kemiskinan.

Dalam sambutan (almarhum) Prof. Ir. Soedarsono Hadisaputro yang waktu itu menjabat Menteri Pertanian, pada kesempatan pembukaan Konferensi Nasional Ekonomi Pertanian, berkata: “Pembangunan ekonomi yang didasari atas “demokrasi-ekonomi” menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan”. Jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan pun sudah disebut yaitu a) kewiraswastaan; b) keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan; c) keikutsertaan menikmati pembangunan; d) keikutsertaan dalam pengambilan keputusan (Tjondronegoro, 2008).

Di Indonesia, pengurangan angka kemiskinan telah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu rezim. Oleh karenanya, dalam hampir setiap pemilu, isu ini selalu menjadi komoditas politik yang mengundang banyak polemik. Klaim pemerintahan yang berkuasa (*incumbent*) hampir bisa dipastikan akan mendapatkan tantangan dari pengamat dan lawan-lawan politiknya. Sementara di sisi lain, angka-angka kemiskinan itu sendiri sangat

rentan terhadap fluktuasi harga-harga kebutuhan pokok. (Basri, 2008 dalam Winarno, 2014:273).

Kenaikan harga kebutuhan pokok sedikit saja akan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah orang miskin di Indonesia. Padahal, analisis kritis yang hati-hati dalam melihat angka-angka kemiskinan di Indonesia, dengan standar US\$1,5 per hari sebagaimana digunakan BPS, jumlah orang miskin pada tahun 2009 yang mencapai 32,53 juta (14,15%) pada dasarnya sangatlah rentan. Ini karena jumlah penduduk yang mendekati garis kemiskinan sangatlah besar, dan peran komoditas pangan sangat besar dalam menentukan kemiskinan.

Sudah menjadi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di wilayah pedesaan. Selama puluhan tahun pembangunan Indonesia didominasi oleh paradigma pertumbuhan yang dipercaya dapat mengentaskan kemiskinan melalui jargon *trickle down effect*. Paradigma ini memandang ketimpangan sebagai kebutuhan sosial (*social necessity*), karena ketimpangan itu akan menjadi basis produksi bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan yang baik baru akan tercapai setelah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan yang semakin membesar.

Empat faktor yang menyebabkan kegagalan:

1. Kebijakan pembangunan pemerintah menjadi tidak pro-rakyat (terutama kelompok miskin);
2. Pembangunan dilaksanakan secara “*top-down*” sehingga rakyat lebih diposisikan sebagai obyek daripada subyek pembangunan;

3. Rakyat memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber-sumber pengembangan ekonomi sehingga semakin terpinggirkan dalam persaingan;
4. Merebaknya praktek korupsi dan kolusi oleh pemegang otoritas negara sebagai dampak pelaksanaan sistem ekonomi yang kapitalistik. (Sutoro, 2005:145)

Masyarakat Kabupaten Ngada dengan jumlah penduduk 250.000 jiwa sebagian besar hidup di daerah pedesaan yang mengandalkan sektor pertanian, kurang lebih 60% penduduk menjadikan sektor pertanian sebagai lapangan kerja utama dan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak masyarakat yang hidup di pedesaan masih diliputi masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Ngada dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu pertama jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Ngada pada September 2013 mencapai 16,9 ribu orang (11,19 persen), naik 0,2 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 16,7 ribu orang (11,25 persen). Pada September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Ngada sebesar 1,36 terendah selama periode tahun 2009-September2013. Demikian pula, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada September 2013 (0,28) juga terendah dalam lima tahun terakhir tersebut. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. (Badan Pusat Statistik

Kabupaten Ngada ,2013). Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dikarenakan masyarakat tidak mampu memperoleh pendidikan formal yang baik.

Untuk itu, dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengembangkan suatu strategi yang dikemas dalam Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah). Program “Anggur Merah” merupakan inovasi kebijakan sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dengan pendekatan pemberdayaan berdasarkan potensi yang ada pada masyarakat desa.

Kebijakan program pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 yang merupakan keberlanjutan dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2013 dengan mengangkat tema “Peningkatan Kesejahteraan dan Penguatan Kapasitas Perekonomian Masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Desa dan Kelurahan”. Dalam rangka mendukung kebijakan program pembangunan yang berbasis desa/kelurahan tersebut, maka dilaksanakan berbagai kegiatan prioritas berupa belanja langsung kepada masyarakat dalam bidang Kesehatan, Pendidikan dan Olahraga, Pemberdayaan masyarakat dan Ekonomi.

Salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan mendesain “Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah”. Strategi kebijakan ini merupakan salah satu implementasi praktis dari spirit Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) yang Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana APBD yaitu dana segar (*Fresh money*) Rp. 250 juta untuk ekonomi produktif, Rp.50 juta untuk pembangunan rumah layak huni, pendamping kelompok masyarakat (PKM), operasional pengendalian pembangunan tingkat desa, kelurahan dan unsur tripika yaitu pemerintah kecamatan didukung Polsek dan Koramil diharapkan dapat menciptakan masyarakat desa/kelurahan maju dan produktif. Program Desa Mandiri Anggur Merah disinergikan pelaksanaannya dengan PNPM Mandiri, Program Kementrian/Lembaga, Program HibahLembaga Internasional, CSR BUMN dan Replikasi Program Desa Mandiri Anggur Merah melalui APBD Kabupaten/Kota serta partisipasi masyarakat pada Gerakan Pulang Kampung (GPK). Untuk mendukung pembangunan ekonomi pada lokasi program Desa Mandiri Anggur Merah maka melalui kemitraan Bank NTT dan Bank mitra lainnya, akan mendorong kemitraan dengan Koperasi Desa Mandiri Anggur Merah dan Koperasi lainnya.

Fokus Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah adalah melaksanakan empat tekad Pemerintah Provinsi NTT yaitu pengembangan jagung, pengembangan ternak, pengembangan koperasi dan pengembangan cendana. Selain fokus utama tersebut, juga dapat diarahkan untuk kegiatan industry rumah tangga, rumput laut, garam serta perikanan darat dan laut sesuai

karakter dan potensi Desa/Kelurahan. Oleh Karena itu pemanfaatan bantuan Pemerintah Provinsi tersebut dilakukan secara partisipatif, transparan dan terpadu, melibatkan semua stakeholders, untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif di bawah pendampingan seorang fasilitator dan pengawasan pemerintah desa/kelurahan.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2018, seluruh pemangku kepentingan pembangunan bertekad mewujudkan Visi pembangunan yaitu “Terwujudnyamasyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, Adil dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut merupakan harapan bersama untuk dapat diwujudkan melalui sinergi investasi pembangunan pemerintah, masyarakat, swasta, asosiasi profesi, kelembagaan agama dan kelembagaan masyarakat.

Kebijakan program pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan dilaksanakan melalui 8 agenda pembangunan yaitu: (1) Pemantapan Kualitas Pendidikan, (2) Pembangunan Kesehatan, (3) Pembangunan Ekonomi, (4) Pembangunan Infrastruktur, (5) Pembenahan sistem hukum (daerah) dan keadilan, (6) Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (7) Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda, dan (8) Agenda Khusus: penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana.

Jumlah Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 5.036.897 jiwa dengan jumlah penduduk miskin berjumlah 627.041 jiwa. Dari

total angka kemiskinan, sebagian besar merupakan kontribusi penduduk di pedesaan yang dominan mengandalkan lapangan kerja pada sektor pertanian yaitu berjumlah 1.321.274 jiwa. (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015). Atas dasar itu pembangunan perdesaan sangat penting dan perlu dibangun untuk memperkuat fondasi perekonomian daerah, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pembangunan perdesaan identik dengan pembangunan pertanian, yang memerlukan dukungan kebijakan dan rencana aksi multi sektoral antara lain: (1) peningkatan kegiatan investasi, input produksi, pengelolaan pertanahan, pengembangan lahan usaha, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, (2) pengembangan SDM, pemberdayaan masyarakat (petani-nelayan), serta penyediaan pelayanan sosial dasar, (3) penyediaan insentif untuk kegiatan produksi, industrialisasi pertanian, pengembangan sistem perdagangan dan pemasaran produk, dan penjaminan harga produk pertanian, (4) penyediaan prasarana dan sarana perdesaan, serta pengembangan kawasan permukiman perdesaan.

Pembangunan pertanian berpengaruh fundamental terhadap pembangunan daerah dan perekonomian Nusa Tenggara Timur karena sebagian besar penduduk sangat tergantung dari sektor pertanian yang kurang berkembang. Dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan maka sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat melalui paradigma penganggaran pembangunan Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (ANGGUR MERAH) maka ditetapkan

kebijakan operasional pembangunan berbasis Desa/Kelurahan yaitu “Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah”.

Melalui Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” Tahun 2014-2018 di Kabupaten Ngada yang direalisasi di 12 Desa pada tahun 2013 yang total secara keseluruhannya pada tahun 2011 dan 2012 sudah ada 30 Desa lokasi program Anggur merah di Kabupaten Ngada (Sekretariat Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, 2013). Program Desa Mandiri Anggur merah dilaksanakan melalui hibah Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh kelompok yang pembentukannya dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Secara umum kelompok dibentuk berdasarkan jenis usaha dan kedekatan lokasi permukiman sehingga memudahkan kerjasama antar anggota kelompok. Sebagai wadah usaha bersama, maka masing-masing kelompok menetapkan secara mandiri keanggotaannya.

Perkembangan jumlah Desa/Kelurahan penerima program Anggur Merah di Kabupaten Ngada pada tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 berjumlah 9 Desa/Kelurahan penerima program Anggur Merah. Pada tahun 2012 ada peningkatan jumlah Desa/Kelurahan yaitu 18 Desa/Kelurahan. Dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan lagi yaitu berjumlah 30 Desa/Kelurahan. Dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah Desa/Kelurahan yang signifikan dalam perkembangan program Anggur Merah untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Ngada. (Sekretariat Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, 2013).

Jumlah kelompok usaha program Anggur Merah di Kabupaten Ngada tahun 2011-2013 berjumlah 223 kelompok dan anggota kelompoknya berjumlah 3.322 orang. Adapun usaha-usaha ekonomi produktif di Kabupaten Ngada yaitu: 1) Peternakan, berjumlah 160 kelompok; 2) Perdagangan dan Jasa, berjumlah 12 kelompok; 3) Industri, berjumlah 11 kelompok; 4) Tanaman Pangan, berjumlah 21 kelompok; 5) Perikanan, berjumlah 8 kelompok; dan 6) Koperasi, berjumlah 11 kelompok. (Sekretariat Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, 2013

Di koperasi Tunas Baru Anggur Merah Desa Bowali terbagi menjadi dua kelompok yaitu Kelompok Masyarakat (Pokmas) Melati atau usaha dagang dan Kelompok Masyarakat Gote-Gore atau penggemukan sapi. Dibandingkan dengan Desa/Kelurahan penerima dana program Anggur Merah di Kabupaten Ngada perkembangan pelaksanaan program Anggur Merah di Desa Bowali tergolong baik. Berdasarkan laporan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) perkembangan pelaksanaan program Anggur Merah di Desa Bowali Kabupaten Ngada tahun 2014 usaha ekonomi produktif masyarakat berjalan dengan baik. Di bawah ini tabel perkembangan usaha ekonomi kelompok.

Tabel I.1

Tabel Perkembangan Usaha Ekonomi Kelompok

No	Nama POKMAS Koperasi Tunas Baru	Nama Anggota	Jenis Usaha	Perkembangan
1	Melati	Getrudis Wea	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Dominikus Wawo	Usaha Dagang	Baik/lunas

		Yohana Meo	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Martina Nau Ria	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Ester Meo	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Irene Ene	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Theresia Uge	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Elisabeth Moa	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Maria Moi Meka	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Theresia Bhebhe	Usaha Dagang	Baik/lunas
2	Gote Gore	Antonius Paghe	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Georgius L. Wedjo	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Yoseph Meka	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Anatolia Y.S. Wedjo	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Antonius Deghe	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Elisabeth Era	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Veronika Liu	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Maria Mudha	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Martinus Wawo	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Monika Wae	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Yoseph Manu	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Adriana Meo	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Yuliana Bue	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Adrianus Manu	Penggemukan Sapi	Baik/lunas

	Theresia Wae	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Nikolaus Leu	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Yustina W. Rani	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Yohanes Wunu	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Sisilia Ado	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Frederikus Tena	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Leonardus Meka	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Veronika M. Rua	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Yoseph Selo	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Koryati A. Delima	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Marianus Dewa	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Veronika O. Radho	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Martina O. Tena	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Rafael Roga	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Thomas Longa	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Methodius Mita	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Margaretha M. Naru	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Rafael Lou	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Klementina Meo	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Nikolaus Gheno	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Mau Markus	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
	Paulus Bajo	Penggemukan Sapi	Baik/lunas

		Agustinus Penga	Penggemukan Sapi	Baik/lunas
		Sisilia Bhara	Penggemukan Sapi	Baik/lunas

Sumber : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri

Anggur Merah di Desa Bowali Kecamatan Bajawa Kabupaten
Ngada Tahun Anggaran 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan usaha ekonomi koperasi Tunas Baru di Desa Bowali berjalan dengan baik yang terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok Melati dan kelompok Gote Gore. Jenis usaha kelompok Melati adalah usaha dagang sedangkan kelompok Gote Gore usaha penggemukan sapi. Topografi Desa Bowali sangat cocok untuk pengembangan hewan ternak, sehingga banyak masyarakat yang memiliki hewan ternak dan juga lahan yang cocok untuk budidaya sayuran.

Untuk pengembalian bunga hampir semua pemanfaat dana telah mengembalikan bunga dari dana pinjaman meskipun menurut laporan PKM masih ada yang menunggak pengembalian bunga dari dana pinjaman. Dan juga ada beberapa kendala teknis dalam proses penerimaan calon anggota baru dan kendala pendataan pada kelompok usaha dagang pada Pokmas Melati. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan program Anggur Merah di Desa Bowali yang tidak akan berjalan dengan baik.

Dari kondisi permasalahan di atas itulah yang peneliti ingin mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) Untuk

Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program Anggur Merah untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ngada.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program Anggur Merah di Kabupaten Ngada.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah memberikan masukan dan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya serta kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait tentang implementasi program Anggur Merah.

2. Manfaat akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan.

E. KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Publik

1.1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) dalam Subarsono (2005) adalah:

“apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*)”.

Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa :

- a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
- b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Definisi ini memang sangat luas karena mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah di samping apa yang harus dilakukan pemerintah ketika menghadapi masalah publik. Dari definisi Dye ini terdapat pemahaman bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dan bukan badan organisasi swasta kemudian menyangkut pilihan yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

James E. Anderson (1979:3) dalam Subarsono (2005) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. (Dye, 1981) dalam Subarsono (2005).

Dalam pandangan seorang pakar politik David Easton sebagaimana dikutip oleh Anderson (1979) dan Dye (1981)) dalam Subarsono (2005), kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, konversi, dan output. Dalam konteks ini ada dua variabel makro yang memengaruhi kebijakan publik, yakni lingkungan domestik, dan lingkungan internasional. Baik lingkungan domestik maupun lingkungan internasional/global dapat memberikan input yang berupa dukungan dan tuntutan terhadap sebuah sistem politik. Kemudian para aktor dalam sistem politik akan memproses atau mengonversi input tersebut menjadi output yang berwujud peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan tersebut akan diterima oleh masyarakat, selanjutnya masyarakat akan memberikan umpan balik dalam bentuk input baru kepada sistem politik tersebut. Apabila kebijakan tersebut insentif, maka masyarakat akan mendukungnya. Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut bersifat disinsentif.

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikuitp Dye, 1981) dalam Subarsono (2005). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada di dalam masyarakat. Ketika kebijakan

publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.(Subarsono, 2005:3).

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mengandung tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat di dalamnya.

Sementara itu, Anderson yang juga dikutip oleh Young dan Quinn (2002:5) dalam Subarsono (2005) , menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu:

“arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan(*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*)”.

Menurut Carl Friedrich dalam Winarno (2014) memandang kebijakan sebagai:

“suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang ditetapkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Menurut Anderson, konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara sembarangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan berserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk memengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat

pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus. Kebijakan tidak campur tangan mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi besar besar terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Salah satu definisi kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone (1971 : 18) dalam Winarno (2014). Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “ hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan dalam Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang menyangkut dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose (1969) dalam Winarno (2014) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang memiliki hubungan antara pemerintah dengan lingkungannya yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Sementara itu, Amir Santoso dalam Winarno (2014) dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang termasuk ke dalam kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah “serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavsky yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan (Amir Santoso).

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat yang bisa diramalkan.

Beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik (Young dan Quinn, 2002:5-6) dalam Subarsono (2005):

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasi oleh badan pemerintah yang berupaya merespon masalah di masyarakat yang berorientasi pada tujuan demi kepentingan orang banyak.

Kerangka kerja kebijakan publik menurut Subarsono (2005:7-8) akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

a. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.

- b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumberdaya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan memengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top-down approach atau bottom up approach, otoriter atau demokratis.

Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) dalam Subasono (2005:13-14) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah
- b. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

1.2. Lingkungan kebijakan

Lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara akan memengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponsnya, yakni memasukannya ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan.

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan memengaruhi *policy makers*. Faktor lingkungan tersebut antara lain: karakteristik geografi, seperti: sumber daya alam, iklim, dan topografi; variabel demografi, seperti: banyaknya penduduk, distribusi umur penduduk, lokasi spasial; kebudayaan politik; struktur sosial; dan sistem ekonomi. (Anderson, 1979).

Variabel lingkungan:

a. Variabel kebudayaan politik

Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda, dan ini berarti nilai dan kebiasaan hidup berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kebudayaan oleh seorang pakar Antropologi Clyde Kluckhohn didefinisikan sebagai *the total life way of people, the social legacy the individual acquires from his group* (keseluruhan cara hidup masyarakat dan warisan sosial yang diperoleh dari kelompoknya). Sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa kebudayaan masyarakat dapat membentuk atau memengaruhi tindakan sosial, tetapi bukan satu-satunya penentu. Kebudayaan hanya salah satu faktor lingkungan yang memengaruhi perilaku masyarakat. Kebudayaan politik adalah bagian dari kebudayaan masyarakat, yang mencakup nilai,

kepercayaan, dan sikap tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana melakukannya, serta bagaimana menjalin hubungan dengan warganegarannya.

- b. Kondisi sosial ekonomi. Kebijakan publik sering dipandang sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik antara berbagai kelompok dalam masyarakat, dan antara pemerintah dengan privat. Salah satu sumber konflik, khususnya dalam masyarakat yang maju, adalah aktivitas ekonomi. (Subarsono, 2005: 15-17).

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan kebijakan merupakan suatu keadaan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat yang memengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan meresponnya dan memasukan ke dalam agenda pemerintahan dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah bersangkutan

1.3. Jenis-jenis Kebijakan

Kategori tentang kebijakan dibuat oleh James Anderson (1979:126-132) dalam Subarsono (2005:20-21) sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif dijalankan.
- b. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau

kemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat

- c. Kebijakan material vs kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*private goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan yang berhubungan dengan *private goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

1.4. Sifat Kebijakan Publik

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori.

- a. Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy decisions*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah,

ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu. Biasanya tuntutan-tuntutan ini diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat dan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus “berbuat sesuatu” sampai susulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan.

- b. Keputusan-keputusan kebijakan (*policy demands*) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik.
- c. Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik.
- d. Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*) lebih merujuk pada “manifestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan menggunakan kalimat yang lebih sederhana, hasil-hasil kebijakan dapat diungkapkan sebagai apa yang dilakukan oleh suatu pemerintah dan keberadaannya perlu dibedakan dari apa yang dinyatakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu.

- e. Dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa sifat kebijakan publik mengandung tuntutan dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang mendesak agar pemerintah mengambil keputusan dan pernyataan resmi yang akan menghasilkan sebuah kebijakan yang mempunyai dampak bagi masyarakat atas permasalahan yang dihadapinya.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2014:147) mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang yang berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-

sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). (Winarno, 2014:147).

Sementara itu, Grindle (1980:6) dalam Winarno (2014:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa:

“secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”.

Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. (Winarno, 2014:148).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan undang-undang untuk menjalankan kebijakan yang di dalamnya terdapat suatu proses, keluaran atau hasil dan dampak yang mendapatkan dukungan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah

“apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. (Winarno, 2014:148).

Dari pendapat di atas implementasi menunjuk pada sebuah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber itu meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan di atas semuanya uang. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau atau batasan-

batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program (Winarno, 2014:149).

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan para birokrat yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab terhadap program yang dijalankan dengan menggunakan berbagai sumber-sumber.

Tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” yang sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik – pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana – diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditanamkan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individual adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2014:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-

tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan dari keputusan kebijakan tersebut dengan menggunakan dana untuk membiayai pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Menurut Widjaja (2005:432), Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai berikut: a) Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi; b) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan

DPRD Kabupaten/Kota; c) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara khusus, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif yang kemudian berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu mengarah pada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah adalah aparatur pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Implementasi kebijakan dalam pemerintah merupakan tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. (Young dan Quinn, 2002:5-6) dalam Subarsono (2005).

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah adalah merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat

oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut.

2.2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. (Winarno, 2014:177).

Menurut Edwards dalam Winarno (2014:177) ada empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Akan tetapi, banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan-hambatan ini mungkin menghalangi pelaksanaan kebijakan.

a. Transmisi

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini akan menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan keleluasaan yang tidak dapat mereka elakkan

dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah umum. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Seperti yang diketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkhis. Kondisi ini sangat memengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Ketiga, pada akhirnya penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

b. Kejelasan.

Faktor kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Edwards mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru,

menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentuk kebijakan pengadilan. (Winarno 2014:180).

c. Konsistensi.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Edwards, dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dengan implementasi, maka dapat mengambil generalisasi, yakni bahwa semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Dalam situasi seperti ini, penyimpangan-penyimpangan transmisi merupakan sebab utama kegagalan implementasi.

Yang berhubungan, tetapi secara konseptual berbeda, dari kejelasan komunikasi adalah konsistensi. Bila para pelaksana perintah-perintah tidak konsisten, mereka pasti tidak mampu dalam menghadapi semua tuntutan yang dibuat oleh mereka. Mereka mungkin secara efektif lumpuh, atau mereka memilih antara petunjuk-petunjuk atas dasar apa yang mereka pilih. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat konsistensi keputusan

menyangkut: kerumitan kebijakan publik, masalah-masalah yang mengawali program-program baru dan akibat banyaknya ketidakjelasan tujuan. (Winarno, 2014:184).

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu: (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan; dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2. Sumber-Sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber

yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi :

a. Staf.

Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun di sisi yang lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

b. Informasi.

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak.

c. Wewenang.

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Namun demikian, dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Bila wewenang formal tidak, atau sering disebut sebagai wewenang di atas kertas, seringkali disalahmengerti oleh para pengamat dengan wewenang yang efektif. Padahal keduanya mempunyai perbedaan yang cukup substansial. Wewenang di atas kertas atau wewenang formal adalah suatu hal, sedangkan apakah wewenang tersebut digunakan secara efektif adalah hal lain. Dengan demikian, bisa saja terjadi suatu badan mempunyai wewenang formal yang besar namun tidak efektif dalam menggunakan wewenang tersebut.

Menurut Lindblom (1968) dalam Winarno (2014:190) menyatakan bahwa kewenangan dapat dipahami melalui dua jalur yang berbagai orang menggunakan metode kontrol. Pada jalur pertama, setiap kali bila seseorang ingin menggunakan berbagai metode kontrol, ia menerapkan berbagai metode kontrol (antara lain persuasi, ancaman, dan tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang akan dikontrolnya. Pada jalur kedua, pihak pengontrol hanya kadang-kadang saja menggunakan metode-metode itu untuk membujuk orang-orang yang dikontrolnya agar mentaati peraturan yang ada bahwa mereka harus tunduk terhadapnya. Menurut Lindblom, sebab-sebab kewenangan terdiri dari dua hal pokok, yakni:

pertama, sebagian orang beranggapan bahwa mereka lebih baik jika ada seseorang yang memerintah. Kedua, kewenangan mungkin juga ada karena adanya ancaman, teror, dibujuk, diberi keuntungan dan lain sebagainya.

d. Fasilitas.

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

3. Kecenderungan-Kecenderungan atau Tingkah Laku

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dampak dari kecenderungan-kecenderungan menurut Edwards, banyak kebijakan masuk ke dalam “zona ketidakacuan”. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan yang lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

Para pejabat birokrasi pemerintah merupakan pelaksana-pelaksana yang paling umum dan penting dalam mengetahui pengaruh-pengaruh tertentu pada kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku mereka, bila dibandingkan dengan para hakim dan pelaksana kebijakan swasta atau non pemerintah. Badan-badan birokrasi pemerintah mempunyai beberapa karakteristik yang mungkin tidak dimiliki oleh badan-badan swasta lainnya. Pertama, badan-badan birokrasi pemerintah lebih bersifat homogen. Tingkah laku yang homogen ini berkembang karena model rekrutmen staf baru yang berlangsung secara selektif. Kedua, berkembangnya pandangan-pandangan parokial. Sifat parokialisme ini didukung oleh beberapa faktor, yakni: pertama, terlalu sedikitnya jumlah pembuat keputusan tingkat tinggi yang menghabiskan masa jabatannya dalam suatu badan atau departemen. Karena orang ingin percaya apa yang mereka lakukan untuk hidupnya, maka hubungan-hubungan lama akan

sangat memengaruhi tingkah laku para birokrat. Kedua adalah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, seperti diungkapkan Edwards, sering menemukan fakta bahwa bila kelompok-kelompok kepentingan dan komite-komite dalam badan legislatif mendukung suatu badan, maka mereka mengharapkan imbalan dukungan birokrasi yang berkesinambungan. Kondisi seperti ini akan menciptakan suatu lingkungan yang baik bagi perkembangan parokialisme.

Dapat disimpulkan bahwa suatu kecenderungan dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Ripley dan Franklin (dalam

Winarno, 2014:205), berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, mengidentifikasikan enam karakteristik birokrasi, yakni: pertama, birokrasi di manapun berada, dipilih sebagai instrumen sosial yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang didefinisikan sebagai urusan publik. Kedua, birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk masing-masing tahap. Ketiga, birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. Keempat, fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks. Kelima, birokrasi jarang mati, naluri untuk bertahan hidup tidak perlu dipertanyakan lagi. Keenam, birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh di kontrol oleh kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar dirinya.

Menurut Edwards dalam Winarno (2014:206), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerja organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi

negara dan sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari semua penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.

3. Kemiskinan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah)

3.1. Kemiskinan

Pada dasarnya, ada dua pendekatan yaitu pertama, menekankan pengertian subsistensi, yaitu "*subsistence poverty*", sedangkan kedua memahami kemiskinan dalam pengertian relative, yaitu kemiskinan sebagai "*relative deprivation*". Ilmuwan "aliran utama" umumnya

menekankan pengertian pertama, yaitu menganggap bahwa kemiskinan adalah persoalan ketidakmampuan memperoleh tingkat penghasilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan, sandang dan beberapa kebutuhan pokok lain.

Secara harafiah kata Miskin diberi arti tidak berharta benda (WJS Mukti, 1984), selanjutnya Soedarsono (2009) dalam H.M. Safi'i (2011:24) menyatakan:

“kemiskinan sebagai struktur tingkat hidup ulang yang rendah, mencapai tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibanding dengan standar hidup yang umumnya berlaku dalam masyarakat. Standar hidup yang rendah, tercermin dari tingkat kesehatan, moral, dan rendahnya harga diri”.

Menurut Mubyarto (1994 : 4) kemiskinan adalah:

“situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari oleh kekuatan yang ada padanya”.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan kemiskinan adalah suatu keadaan yang serba kekurangan sebagai standar hidup yang rendah tercermin dari tingkat kesehatan, moral, dan rendahnya harga diri.

Sejalan dengan pengertian tersebut Bank Dunia dalam Suyanto (1995:31) menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum.

Friedman (Ala, 1996 : 4) kemiskinan adalah:

“ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial”.

Menurut Ambar T (2004 : 3) konsep kemiskinan adalah:

“fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan, kemiskinan dapat dipandang sebagai ketimpangan”.

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan dan ketidaksamaan kesempatan mencapai standar hidup minimum yang merupakan fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan dan juga merupakan suatu ketimpangan.

Sementara Rowntree mendefinisikan kemiskinan sebagai keluarga yang seluruh penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya minum untuk mempertahankan hidup (Andre Bayo, 1985:4). Dilihat dari kebutuhan dasar, kemiskinan dapat dilihat dari kekurangan gizi, kelaparan, buruknya kesehatan, perumahan yang tidak memadai dan sebagainya.

Sar A Levitan mendefinisikan kemiskinan adalah:

“kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup layak, maka tidak ada definisi yang diterima secara universal”. (Andre Bayo Ala, 1981 : 3)

Sementara Bradley R. Schiller, kemiskinan adalah:

“ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial tertentu”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keluarga yang serba kekurangan barang dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Suparlan (1995 : xi) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1993 :3) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Pendapat lain dikemukakan oleh Ala dalam Setiawan (2001 : 120) yang menyatakan kemiskinan adalah adanya gap atau jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak.

Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan / BKKBN (1996:10) adalah suatu keadaan yang seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari berbagai definsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan dan pendapatan yang terbatas atau minim, dan kekurangan dalam memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Heru Nugroho kemiskinan adalah hasil produk dari kontruksi sosial, sehingga pembangunan yang dilakukan justru menimbulkan dominasi baru dan terjadinya dialektika pembangunan. Dialektika pembangunan yang terjadi antara lain adalah:

- a. Pembangunan yang diharapkan terjadi, *trickel down effect*, justru menimbulkan *trickel up effect* karena daya sedot akumulasi kapital lebih kuat pusat dibandingkan dengan pemerataan pembangunan melalui program-program anti kemiskinan.
- b. Pembangunan yang dilakukan hanya membebaskan “orang dari”, belum membebaskan “orang untuk”. Hal ini berarti bahwa pembangunan tersebut baru membebaskan diri dari rasa lapar, dan belum membebaskan diri untuk mengeksresikan kemampuan diri dan mengoreksi pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dibedakan dalam dua jenis, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (artificial). Kemiskinan alamiah timbul akibat kelangkaan sumber daya alam. Kondisi tanah yang tandus, tidak adanya pengairan dan kelangkaan prasarana lain merupakan penyebab utama kemiskinan. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh munculnya kelembagaan (seringkali akibat modernisasi atau pembangunan ekonomi sendiri) yang membuat anggota masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Kemiskinan dari perspektif alternatif:

- a. Deprivasi materiil, yang diukur dari kurangnya pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, kesehatan, papan dan kebutuhan konsumsi dasar lain.
- b. Isolasi, seperti dicerminkan oleh lokasi geografiknya maupun marginalisasi rumah tangga miskin secara sosial dan politik. Mereka sering tinggal di daerah terpencil, hampir tanpa sarana transportasi dan komunikasi.
- c. Alienasi, yaitu perasaan tidak punya identitas dan tidak punya kontrol atas diri sendiri. Ini timbul akibat isolasi dan hubungan sosial yang eksploitatif. Walaupun proses pembangunan berjalan seru dan menghasilkan teknologi baru, mereka tidak bisa ikut serta memanfaatkannya. Mereka kekurangan kecakapan yang bisa “dijual”.
- d. Ketergantungan. Inilah yang selama memerosotkan kemampuan si miskin untuk “bargaining” dalam dunia hubungan sosial yang sudah timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh. Buruh tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah, petani tidak bisa menetapkan harga hasil taninya.
- e. Ketidakmampuan membuat keputusan sendiri dan tiadanya kebebasan memilih dalam produksi, konsumsi, dan kesempatan kerja, serta kurangnya perwakilan sosio-politik mereka, tercermin dalam tidak adanya fleksibilitas dan berkurangnya kesempatan bagi si miskin di desa.

- f. Kelangkaan asset membuat penduduk miskin di desa bekerja dengan tingkat produktivitas yang sangat rendah.
- g. Kerentanan terhadap guncangan eksternal dan terhadap konflik-konflik sosial internal juga sangat berpengaruh terhadap status kemiskinan penduduk pedesaan. Kerentanan itu bisa timbul karena faktor alamiah (kemarau panjang, banjir, dan hama) karena perubahan pasar (merosot harga komoditi), kondisi kesehatan (penyakit).
- h. Tidak adanya jaminan kesehatan dari tindak kekerasan akibat status sosial rendah, karena lemah, karena faktor-faktor agama, ras, etnik, dsb. (Jazairy, et.al., 1992:29)

Kemiskinan dilihat dari faktor penyebabnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan kultural, kemiskinan sumber daya ekonomi, dan kemiskinan struktural. Menurut Surbarkti (Suyanto, 1995) bahwa kemiskinan kultural bukan bawaan melainkan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan berkepanjangan. Kemiskinan bukanlah sebab melainkan akibat. Sikap-sikap seperti ini diabadikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi. Kemiskinan sumber daya ekonomi akar kemiskinan itu yang terletak pada ketidakpunyaan sumber daya ekonomi, seperti tanah dan modal, pendidikan dan ketrampilan, karena pertumbuhan penduduk yang pesat tidak seiring dengan sumber daya ekonomi yang tersedia.

Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kekuasaan dan ekonomi dan politik.

Disebut kemiskinan struktural karena membuat sebagian masyarakat miskin adalah bukan orang perorangan melainkan struktur ekonomi dan politik yang tidak hanya bersifat eksploitasi terhadap pihak yang kurang memiliki sumber daya tetapi juga hanya berpihak kepada orang-orang yang memiliki akses ekonomi dan politik. Depari (1985) menjelaskan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan tertentu sebagai akibat tidak dimungkinkannya untuk memberikan kemudahan-kemudahan pada mereka dalam potensi dan lingkungannya.

Mengenai faktor penyebab kemiskinan menurut para ahli seperti Ghosse dan Griffin (1993), Mubyarto (1984), dan Korten (1988) yang menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 faktor yang diduga menjadi penyebab kemiskinan di desa yaitu :

- a. Karena adanya pemusatan pemilik tanah yang dibarengi dengan adanya proses fragmentasi pada arus bahwa masyarakat pedesaan;
- b. Karena nilai tukar hasil produksi warga pedesaan khususnya sektor pertanian yang jauh tertinggal dibanding hasil produksi lain, termasuk kebutuhan sehari-hari warga pedesaan;
- c. Karena lemahnya posisinya masyarakat desa khususnya petani dalam mata rantai perdagangan;
- d. Karena karakter struktur sosial masyarakat pedesaan yang terpolarisasi (Suyanto, 1995 : 106).

3.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018).

Kebijakan program penanggulangan kemiskinan sebenarnya telah dirintis pada pertengahan tahun tujuh puluhan dalam bentuk Program Pengembangan Wilayah (PPW), program penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat reaktif terhadap krisis moneter dan ekonomi, tetapi juga bersifat strategis guna mewujudkan masyarakat yang mandiri dan memiliki otonomi dalam pembangunan secara khusus.

Program penanggulangan kemiskinan merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”. (Buku Pedoman Umum P2KP, Edisi Oktober 2005).

Dapat disimpulkan bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan

yang bertujuan memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam program tersebut sekaligus pembangunan lokal di pedesaan.

Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tahun 2014-2018 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2011-2013 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018. Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah sebagai program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan menyeluruh memiliki posisi sangat strategis karena perannya sebagai berikut; (1) Mendukung pelaksanaan enam tekad pembangunan yang ditetapkan sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan pendapatan perkapita, menurunkan penduduk kemiskinan yang mencapai 20,03% keadaan Maret 2013, (2) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian; (3) Mendukung pelaksanaan 8 agenda pembangunan; dan (4) Mendukung penyiapan lapangan kerja di pedesaan terutama tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian.

1. Tujuan Pembangunan

Tujuan Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018 adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas perekonomian berbasis keunggulan Desa/Kelurahan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata > 6,5 %.
- b. Mendukung penurunan penduduk miskin menjadi 15 % akhir tahun 2018.
- c. Memberdayakan kelembagaan ekonomi dan sosial pedesaan yang dapat mendukung pelaksanaan 6 tekad pembangunan dan 8 agenda pembangunan daerah.
- d. Menambah jumlah wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Desa/Kelurahan.

2. Sasaran Pembangunan

Sasaran Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas dan daya saing basis ekonomi unggulan Desa/Kelurahan.
- b. Meningkatnya akses sumberdaya ekonomi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatnya Desa/Kelurahan yang mandiri secara ekonomi dan bebas dari kemiskinan.

3. Prinsip Pengembangan.

Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dilakukan dengan beberapa prinsip antara lain:

- a. *Pemberdayaan*, upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dan kapasitas pemerintah desa/kelurahan melalui pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta keberlanjutan pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan yang optimal;
- b. *Partisipatif*, upaya mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, baik dalam bentuk pikiran, tenaga maupun material sehingga tumbuh rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab;
- c. *Demokratis*, pengambilan keputusan dalam setiap tahapan kegiatan didasarkan atas musyawarah-mufakat dan kesetaraan gender;
- d. *Bertumpu pada sumber daya lokal*, penetapan jenis kegiatan didasarkan pada ketersediaan potensi dan kecocokan kegiatan sesuai kebutuhan setempat sehingga tercapai daya guna dan hasil guna pembangunan;
- e. *Efisiensi*, menjamin pencapaian target program dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. *Efektivitas*, pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat;

- g. *Transparansi*, Manajemen pengelolaan pembangunan desa mandiri anggur merah dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan;
- h. *Keterpaduan dan Keberlanjutan*, pembangunan desa mandiri anggur merah dapat dilaksanakan secara simultan dengan program-program pembangunan perdesaan lainnya dengan memperhatikan keterkaitan dan keberlanjutannya, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan mendasar setiap desa/kelurahan.

4. Lingkup Kegiatan Wilayah

Lingkup kegiatan Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018 sebagai berikut:

- a. Lingkup Kegiatan Utama.

Kegiatan utama Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang menjangkau seluruh Desa/kelurahan yang belum mendapatkan program Desa Mandiri Anggur Merah tahun 2011-2013 yaitu:

- Dana hibah Desa/Kelurahan yang digulirkan pada kelompok masyarakat sebesar Rp. 250 juta per Desa/Kelurahan melalui program Desa Mandiri Anggur Merah untuk mendukung

pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi Desa/kelurahan.

- Dana hibah Desa/Kelurahan untuk pembangunan rumah layak huni untuk KK miskin sebesar Rp.50 juta melalui Program P2LDT untuk pembangunan rumah.
- Pembiayaan PKM yang ditempatkan di Desa/ Kelurahan dengan gaji/ upah dan biaya operasional Rp.2 juta per bulan untuk pendamping 1 Desa/Kelurahan dan Rp.2,5 juta Per bulan untuk pendampingan 2 Desa/Kelurahan.
- Biaya operasional Desa/Kelurahan sebesar Rp.2,5 juta per tahun.
- Biaya Operasional Tim pengendali Kecamatan (Pemerintah Kecamatan, Polsek dan Koramil) sebesar Rp. 10 juta per tahun

b. Lingkup Kegiatan Sinergi program

Pembangunan terpadu berbasis desa/ kelurahan melalui Program Desa Mandiri Anggur Merah akan disinergikan dengan program lain. Berdasarkan sumber dana maka sinergi program sebagai berikut:

➤ APBD Provinsi

- Hibah Desa/ kelurahan sebesar Rp.50 juta untuk pembenahan destinasi wisata dan kesiapan sarana pendukung bagi Desa potensi wisata.

- Hibah Modal Koperasi sebesar Rp.20 juta per Koperasi bagi Koperasi Desa Mandiri Anggur Merah dan Koperasi lainnya.
- Dana operasional bagi staf pengelola program di Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- Pelatihan kewirausahaan bagi PKM berprestasi yang telah mengembangkan usaha sendiri atau bertugas sebagai manager Koperasi Desa Mandiri Anggur Merah.
- Sinergi lintas sektor program SKPD.
- APBD Kabupaten/Kota.
- Hibah desa sebagai replikasi Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur merah.
- Dana operasional dan pembinaan Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Program Replikasi.
- APBN dan Lembaga Internasional.
- Sinergi program Kementrian/Lembaga berbasis Desa/ Kelurahan antara lain Program OVOP (*one village one product*), Program Prukab, Program Bedah Desa, Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Program KB dan program lainnya.
- Sinergi program dalam melengkapi kebutuhan kemandirian Desa/Kelurahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

- Kegiatan melalui dana yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD)Provinsi/Kabupaten/Kota, Satuan Kerja (SATKER) dan lembaga Internasional merupakan kegiatan yang disinergikan dengan Dana Hibah Desa/ kelurahan untuk percepatan penurunan kemiskinan.
- Hibah CSR, NGO dan dukungan Pembinaan.
- SKPD Provinsi, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dapat mengambil bagian pembinaan secara swadaya.
- NGO lokal dapat memberikan dukungan pemberdayaan dan pendampingan kelompok.

5. Kegiatan Pembangunan

Kegiatan Program Desa Mandiri Anggur Merah mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan sebagai berikut:

a. Kegiatan Ekonomi Produktif

Kegiatan utama melalui alokasi dana sebesar Rp.250 jutadiarahkan untuk pengembangan ekonomi produktif unggulan desa/ kelurahan sebagai berikut:

- Pengembangan komoditas jagung dan ternak untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

- Pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan budidaya rumput laut.
- Pengembangan komoditas perkebunan berorientasi ekspor antara lain jambu mete, kakao dan kopi.
- Pengembangan kegiatan industri kecil dan kerajinan rumah tangga.
- Pengembangan usaha jasa, koperasi, UMKM dan perdagangan.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Desa/Kelurahan dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kegiatan peningkatan sumberdaya manusia antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan SDM Aparatur Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksanaan tata kelola Pemerintahan.
- Peningkatan SDM pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan/atau Koperasi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan Desa/ Kelurahan.

- PeningkatanSDM angkatan kerja sesuai dengan basis ekonomi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi produktif sesuai keunggulan Desa/ Kelurahan.

c. Pembangunan Infrastruktur

Kegiatan sosial dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi yaitu: 1) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat; 2) peningkatan mutu lingkungan permukiman dan rumah layak huni; 3) penyediaan air bersih dan penerangan rumah tangga; 4) peningkatan akses dalam wilayah dan keluar wilayah pedesaan; 5) peningkatan prsarana pengairan (embung, sumur bor, irigasi pedesaan); 6) peningkatan penghijauan dan konservasi lahan; 7) peningkatan akses informasi melalui desa berdering; 8) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

6. Sasaran Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

Sasaran lokasi pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah didasarkan pada kriteria yaitu:

- a. Memiliki presentase Rumah Tangga Miskin terbanyak pada wilayah kecamatan sesuai hasil pendataan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Infrastruktur pelayanan sosial dasar (air bersih, sanitasi lingkungan permukiman dan rumah layak huni) relatif rendah.

- c. aksesibilitas wilayah di dalam daerah dan keluar daerah masih rendah.
 - d. Sumber daya manusia relatif rendah yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk, presentase angka putus sekolah; angka buta huruf yang juga masih tinggi dan indikator pembangunan kesehatan rendah.
 - e. Khusus untuk desa, juga diperhatikan indikator desa terpencil, terisolir dan tertinggal dan kurang memiliki akses pembangunan.
 - f. Memiliki sumber daya atau potensi wilayah mendukung kegiatan ekonomi produktif.
7. Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Program.

Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah diatur sebagai berikut:

- a. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/Kelurahan bersama Masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/Kelurahan.
- b. Jika di Desa/Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
- c. Mekanisme Pembentukan Koperasi.
- d. PKM ditunjuk sebagai Manajer atau pengelola koperasi dengan tugas yaitu melaksanakan usaha koperasi, mengajukan rancangan

rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi kepada pengurus, memberikan pelayanan usaha kepada anggota, membuat studi kelayakan usaha koperasi, membuat laporan perkembangan usaha koperasi.

- e. Koperasi yang sudah terbentuk dan/ataubditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Provinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi, mengetahui kepala desa/lurah.
- f. Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan.
- g. Proposal dan syarat-syarat administratif diverifikasi oleh tim verifikasi provinsi.
- h. Hasil verifikasi Tim Verifikasi Provinsi berupa rekomendasi kepada Gubernur.
- i. Setelah dilakukan verifikasi, proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan.
- j. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan naskah hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/Lurah.
- k. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT.

- l. Bantuan Hibah Program yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi ke rekening Desa/Kelurahan adalah sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- m. Kepala Desa/Lurah menyalurkan dana dari rekening Desa/Kelurahan ke rekening Koperasi dalam bentuk pinjaman Desa/Kelurahan atau Modal Penyertaan dari Desa/Kelurahan.
- n. Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari Desa/Kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada Anggota Koperasi sebagai Pinjaman.
- o. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi.
- p. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukan untuk konsumsi.
- q. Besaran bunga pinjaman anggota ditetapkan dalam rapat anggota.
- r. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- s. Mekanisme penyaluran dana dari koperasi kepada anggota wajib melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan usaha anggota, jaminan dalam bentuk barang bilamana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang.

- t. Pengurus Koperasi bersama pemerintah Desa/Kelurahan dan PKM memantau perkembangan usaha anggota koperasi.
- u. Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke Koperasi.
- v. Koperasi akan melakukan perguliran ke anggota Koperasi yang lain.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang akan digunakan untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam program Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi
 - a. Transmisi, penyampaian isi dari kebijakan anggur merah kepada pelaksana serta masyarakat dari pengelola dalam implementasi kebijakam program Anggur Merah;
 - b. Kejelasan kapan dan bagaimana kegiatan program Anggur Merah dilaksanakan;

- c. Konsistensi perintah-perintah pelaksana dalam implementasi kebijakan program Anggur Merah.
2. Sumber-sumber
 - a. Ketersediaan sumber daya manusia dalam mengelola serta melaksanakan kebijakan program Anggur Merah;
 - b. Informasi mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan serta informasi ketaatan personil lain terhadap peraturan pelaksanaan kebijakan program Anggur Merah;
 - c. Kewenangan dalam melaksanakan kebijakan program Anggur Merah;
 - d. Fasilitas yang bersifat fisik dalam implementasi program Anggur Merah.
3. Kecenderungan atau tingkah laku

Dukungan para personil dalam melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dalam implementasi program Anggur Merah.
4. Struktur birokrasi

Bentuk organisasi serta prosedur dasar (SOP) dalam melaksanakan kebijakan program Anggur Merah.
5. Penanggulangan kemiskinan
 - a. Pengembangan Masyarakat
 - Peningkatan akses pelayanan sosial.
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam.
 - Partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan.
- b. Pengembangan ekonomi
- Pengembangan peluang usaha.
 - Terbukanya kesempatan kerja.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Lexy Moleong (2001:6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Definisi metode kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong (2001:3) adalah metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan jalan menggambarkan dan menuliskan peristiwa yang ada sekarang berdasarkan

fakta-fakta yang ada sekarang berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini digunakan untuk menggambarkan temuan yang diamati. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah membuat pencatatan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi di daerah tertentu.

2. Unit analisis

Untuk penelitian ini, peneliti memilih Desa Bowali Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun yang menjadi subyek dan obyek penelitian adalah sebagai berikut:

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. (Widoyoko, 2012:29).

Jadi dapat disimpulkan bahwa subyek penelitian merupakan orang yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, PKM (Pendamping Kelompok Masyarakat), perangkat koperasi, dan anggota pokmas (kelompok masyarakat) Anggur Merah yang berjumlah 15 orang.

Untuk menentukan narasumbernya dipakai teknik *purposive* yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri

spesifik yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Dengan demikian diusahakan agar narasumber tersebut memiliki ciri-ciri yang esensial sehingga dapat dianggap cukup representatif. (Nasution, 2007:98).

Yang menjadi narasumber antara lain sebagai berikut:

- Kepala Desa (1 orang)
- PKM (1 orang)
- Pengurus Koperasi (3 orang)
- Anggota Pokmas (Kelompok masyarakat) Anggur Merah (10 orang)

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial yang ingin diketahui “apa yang terjadi di dalamnya”. Menurut Spardley pada obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu. Dan juga berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan dan sejenisnya. (Sugiyono, 2013:297).

Jadi dapat disimpulkan obyek penelitian adalah apa yang ingin diketahui dan akan diselidiki dalam situasi sosial yang mencakup aktivitas, orang-orang dan tempat kegiatan penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) untuk Penanggulangan Kemiskinan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder oleh karena itu untuk mengumpulkan dan menghimpun data dimaksud digunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. (Usman dan Purnomo, 2006:54).

Observasi dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai beberapa bentuk kegiatan serta pelaksanaan program-program di lokasi penelitian. Hal ini sangatlah penting karena dalam pengumpulan data metode pengamatan ini diharapkan dapat mengungkapkan motif-motif perilaku, kebiasaan, serta hubungan antar individu. Pengamatan ini dilakukan peneliti dengan menggunakan indera mata tanpa menggunakan pertolongan alat standar lainnya. Sehingga pada akhirnya peneliti dapat memperoleh data observasi ini yang berupa data faktual, cermat, dan terperinci sesuai dengan keadaan serta konteks kegiatan-kegiatan terjadi.

Proses pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi yang berkaitan dengan implementasi program Anggur Merah di Desa Bowali Kabupaten Ngada.

b. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan bermaksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang menjawab pertanyaan itu. (Lexy Moleong, 2001:186).

Metode yang digunakan yaitu metode wawancara langsung. Wawancara langsung digunakan dengan cara peneliti mewawancarai responden secara langsung untuk memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan kegiatan yang dihadapi. Dalam hal ini informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara bertatap muka dan bertanya jawab dengan responden. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara secara terbuka, hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat bersifat obyektif.

Proses ini melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian yaitu Kepala Desa, PKM, perangkat koperasi dan anggota Pokmas (kelompok masyarakat) Anggur Merah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada pada daerah penelitian. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder. (Usman dan Purnomo, 2006:73).

Hal ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh data secara terperinci dengan jalan melihat, mencatat, dan mengabadikan dengan gambar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga dengan data-data tersebut peneliti dapat memanfaatkannya sebagai bahan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk bisa meramalkannya.

Dokumentasi yaitu dengan menelusuri dokumentasi yang ada di Desa Bowali yang berkaitan dengan implementasi program Anggur Merah yang berupa data-data.

4. Teknik analisis data

Menurut Paton, analisa data ialah proses mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian-uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. (Lexy Moleong, 2001:103).

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu hasil penelitian data dan informasi kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif atau gambaran umum dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengikuti konsep yang diberikan oleh Milles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus terjadi pada tiap tahapan penelitian sampai tuntas dan data yang dihasilkan mencapai tingkat jenuh. Adapun aktivitas yang ada dalam analisis data yaitu:

- a. *Data collection* : pengumpulan data dari lapangan baik data primer maupun sekunder, data yang diperoleh dicatat secara teliti dan rinci.
- b. *Data reduction* : data hasil reduksi (penyaringan atau pengurangan yaitu memilih hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Fungsi dari data reduction ini adalah untuk merangkum atau memilih data yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga ditemukan sebuah gambaran yang lebih jelas dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- c. *Data display* : penyajian data dalam bentuk uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Data display berfungsi untuk mempermudah dan memahami apa yang telah terjadi sehingga kita dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- d. *Conclusion* : pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal maupun tidak, namun juga sebagai sebuah temuan baru yang belum pernah ada. (Sugiyono, 2007:92).

Setelah data dikumpulkan (*data collection*) kemudian dilakukan reduksi data karena data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Langkah terakhir setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB II

PROFIL DESA BOWALI DAN PROGRAM ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH)

A. KEADAAN GEOGRAFIS

1. Batas Wilayah

Secara spesifik letak wilayah Desa Bowali berada pada Kecamatan Bajawa dan dilihat dari arah mata angin maka berbatasan langsung dengan:

Tabel II.1
Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Naru dan Desa Inelika	Bajawa dan Bajawa Utara
Sebelah Selatan	Kelurahan Faobata	Bajawa
Sebelah Timur	Desa Pape	Bajawa
Sebelah Barat	Desa Naru	Bajawa

Sumber Data : Profil Desa Bowali 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa batas wilayah Desa Bowali sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan lain yaitu Desa Inelika yang merupakan wilayah Kecamatan Bajawa Utara

sedangkan Desa Naru, Desa Pape, dan Kelurahan Faobata merupakan wilayah Kecamatan Bajawa.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah di Desa Bowali adalah sebagai berikut :

Tabel II.2
Luas Wilayah

No	Luas Wilayah	Jumlah	Persentase (%)
1	Luas perkebunan	15,40 Km ²	91,12
2	Luas kuburan	0,50 Km ²	2,96
3	Luas pekarangan	0,75 Km ²	4,44
4	Perkantoran	0,25 Km ²	1,48
Total Luas		16,9 Km ²	100

Sumber Data : Profil Desa Bowali 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa luas wilayah terkecil di Desa Bowali adalah perkantoran yaitu 0,25 Km² atau 1,48% dan luas wilayah terbesar di Desa Bowali adalah wilayah perkebunan yaitu 15,40 Km² atau 91,12%. Mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Bowali adalah petani. Masyarakat memanfaatkan lahan

perkebunan tersebut untuk bercocok tanam dan juga sebagai lahan untuk memelihara ternak.

3. Keadaan Iklim

Sebagai Desa yang terletak di ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut dan di kelilingi bukit serta gunung, hari-hari di Desa Bowali adalah kehidupan yang bergerak menyusup di balik perpaduan antara dingin dan kabut. Dengan kondisi wilayah yang cenderung basah mengakibatkan curah hujan pertahunnya cukup tinggi yakni hasil pencatatan curah hujan menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada tahun 2009, rata-rata curah hujan tercatat 1037 mm sedangkan rata-rata hari hujan sebanyak 10 hari, hal ini berpengaruh terhadap pengolahan lahan pertanian.

B. KEADAAN DEMOGRAFI

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kependudukan memberikan peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Penduduk mempunyai peranan ganda dalam proses pembangunan yaitu sebagai obyek maupun subyek dari sebuah pembangunan. Maka sumber daya penduduk harus ditingkatkan kualitasnya demi sebuah keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa.

Dari data monografi Desa Bowali pada tahun 2014 - 2015 tercatat jumlah penduduk sebanyak 781 jiwa, meliputi 351 jiwa

laki-laki dan 406 jiwa perempuan. Secara terperinci jumlah penduduk di Desa Bowali berdasarkan jenis kelamin disajikan ke dalam tabel di bawah ini :

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Penduduk (Jiwa)	Persentase %
1	Laki-laki	375	48,02
2	Perempuan	406	51,98
Jumlah total		781	100
Jumlah kepala keluarga		172 KK	
Kepadatan penduduk		46,21 jiwa/Km ²	

Sumber Data : Profil Desa Bowali 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Bowali menurut jenis kelamin ada perbedaan. Jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dari jumlah penduduk perempuan dengan komposisi sebagai berikut : Penduduk laki-laki berjumlah 375 jiwa atau 48,02% sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 406 jiwa atau 51,98% dengan total akhir penduduk di Desa Bowali berdasarkan jenis kelamin berjumlah 781 atau 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perempuan di Desa Bowali mempunyai potensi yang besar untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang ada di Desa Bowali. Perkembangan

penduduk di Desa Bowali sudah mencapai 781 jiwa dengan luas wilayah Desa Bowali seluruhnya 16,9 Km² maka rata-rata kepadatan penduduk adalah 46,21 jiwa/Km².

2. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Untuk mengetahui produktifitas penduduk di Desa Bowali maka dapat dilihat dari perkembangan penduduk berdasarkan tingkat usia, yang diklasifikasikan ke dalam tabel berikut ini :

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Kelompok Usia (Tahun)	Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	0 – 14	170	21,77
2	15 – 29	175	22,41
3	30 – 44	251	32,14
4	45 – 59	152	19,46
5	Lebih dari 60	33	4,22
Jumlah		781	100

Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikelompokkan kualitas sumber daya manusia di Desa Bowali berdasarkan tingkat

produktivitas masyarakat yang dilihat dari usia penduduk sebagai berikut :

- a. Penduduk yang berusia 0 – 14 tahun adalah penduduk yang belum produktif, yaitu berjumlah 170 jiwa
- b. Penduduk yang berusia 15 – 59 tahun adalah penduduk yang produktif, yaitu berjumlah 578 jiwa
- c. Penduduk yang berusia lebih dari 60 tahun adalah penduduk yang tidak produktif, yaitu berjumlah 33 jiwa

Dari pengelompokan penduduk menurut tingkat usia, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Bowali berada dalam kategori usia produktif, yaitu sejumlah 578 jiwa atau 74,01% dari jumlah seluruh penduduk. Sedangkan penduduk yang tidak produktif sejumlah 33 jiwa atau 4,22%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia cukup memadai.

C. KEADAAN EKONOMI

1. Mata Pencaharian Penduduk

Peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keterampilan dan keahlian yang dimiliki penduduk. Rendahnya pendidikan maka akan berpengaruh terhadap tingkat keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat dan

juga akan berpengaruh pada tingkat penghasilan dan kesejahteraan penduduk.

Penduduk di Desa Bowali memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda dan bervariasi antara penduduk yang satu dengan penduduk yang lain, maka untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.5

Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Mata Pencaharian	Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	385	91,23
2	Pegawai Negeri Sipil	18	4,27
3	Karyawan Perusahaan Swasta	17	4,03
4	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	2	0,47
Jumlah		422	100

Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014

Penduduk Desa Bowali sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, yang berjumlah 385 jiwa atau 91,23%. Hal ini dikarenakan Desa Bowali mempunyai lahan yang subur dan cocok untuk budidaya sayur dan juga untuk menanam rumput untuk pengembangan hewan ternak. Sedangkan mata pencaharian yang paling sedikit oleh penduduk di Desa Bowali adalah pensiunan PNS/POLRI/TNI yang berjumlah 2 jiwa atau

0,47%. dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk di Desa Bowali sangat bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga yang digunakan sebagai sumber penghidupan sehari-hari.

2. Kesejahteraan Penduduk

Tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Bowali adalah sebagai berikut:

Tabel II.6

Tingkat Kesejahteraan Penduduk

No	Tingkat Kesejahteraan Penduduk	Jumlah (KK)	Persentase (%)
1	Jumlah Kepala Keluarga Prasejahtera	165	95,93
2	Jumlah Kepala Keluarga Sejahtera	7	4,07
Total Jumlah Kepala Keluarga		172	100

Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah kepala keluarga prasejahtera adalah 165 kepala keluarga atau 95,93% sedangkan jumlah kepala keluarga yang tergolong sejahtera hanya

berjumlah 7 kepala keluarga atau 4,07%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum termasuk keluarga yang sejahtera

D. KEADAAN SOSIAL

1. Pendidikan

Selain sumber daya alam dan teknologi, sumber daya manusia merupakan unsur pendukung utama dalam proses pembangunan. Untuk itu perlu diadakan upaya bagi pengembangan sumber daya manusia. Upaya tersebut menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang berperan penting terhadap peningkatan kemampuan dan keahlian sekelompok masyarakat.

Upaya peningkatan kemampuan manusia melalui pendidikan akan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada penduduk untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Pendidikan bagi masyarakat diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pendidikan formal dan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengenai tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Bowali dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.7
Tingkatan Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	19	2,43
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	30	3,85
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	6	0,77
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	248	31,75
5	Usia 8-56 tahun tidak pernah sekolah	6	0,77
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	39	4,99
7	Tamat SD sederajat	252	32,26
8	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	37	4,74
9	Usia 18-56 tidak tamat SLTA	35	4,48
10	Tamat SMP/sederajat	30	3,85
11	Tamat SMA/sederajat	50	6,40
14	Tamat D-3/sederajat	7	0,89
15	Tamat S-1/sederajat	21	2,69
18	Tamat SLB A	1	0,13
	Jumlah	781	100

Sumber Data : Profil Desa Bowali 2014

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bowali, sebagian besar hanya tamat SD

sejumlah 252 jiwa atau 32,26% dan tingkat pendidikan strata 1 berjumlah 21 jiwa atau 2,69%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Bowali masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk menempuh pendidikan. Adapun prasarana pendidikan yang tersedia di Desa Bowali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8
Prasarana pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Unit
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2	Sekolah Dasar (SD)	1
Jumlah		2

Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014.

Prasarana pendidikan yang tersedia di Desa Bowali belum memadai, karena hanya TK dan SD saja yang ada di Desa Bowali. Hal ini akan membuat masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP dan SLTA harus keluar dari Desa dan tidak terbuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak di Desa Bowali.

2. Agama

Agama merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan dilindungi oleh Undang-Undang. Masyarakat Desa Bowali hanya menganut dua agama yaitu Katolik dan Kristen Protestan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II.9

Agama

No	Agama	Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Katolik	776	99,35
2	Kristen Protestan	5	0,65
Jumlah		781	100

Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Desa Bowali menganut agama Katolik yang berjumlah 776 jiwa atau 99,35%, dengan jumlah terkecil dianut oleh agama Kristen Protestan yang berjumlah 5 jiwa atau 0,65%. Walaupun masyarakat Desa Bowali menganut agama yang berbeda-beda, tetapi tetap hidup rukun dan damai terbukti dengan sampai saat ini belum pernah terjadi konflik baik sesama ataupun antar umat beragama. Masyarakat bebas untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang yakini.

3. Transportasi

Prasarana dan sarana transportasi juga diperlukan di dalam perkembangan masyarakat, sehingga melancarkan kegiatan masyarakat guna untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat baik potensi alam maupun peningkatan sumber daya manusia. Prasarana dan sarana transportasi darat yang ada di Desa Bowali dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.10

a. Prasarana Transportasi Darat

Jalan Desa	
Panjang jalan aspal	0,1 km
Panjang jalan makadam	1,7 km
Panjang jalan tanah	0,86 km
Panjang jalan sirtu	0,5 km
Panjang jalan konblok/semèn/beton	0,325 km
Jalan Antar Desa/Kelurahan/Kecamatan	
Panjang jalan aspal	1,5 km
Panjang jalan makadam	1,7 km
Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan	
Panjang jalan aspal	9 km
Jembatan Desa	
Jembatan Beton	9 unit

Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014.

Tabel II.11

b. Sarana Transportasi Darat

Sarana	Unit
Sepeda Motor	10 unit

Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014.

Dari dua tabel di atas dapat diketahui bahwa prasarana transportasi darat sudah memadai tetapi sarana transportasi belum memadai karena hanya 10 unit sepeda motor yang digunakan oleh masyarakat.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan juga dalam usaha masyarakat melaksanakan pembangunan. Dengan tercapainya tingkat kesehatan yang memadai, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pula semangat membangun bangsa. Prasarana dan sarana kesehatan yang ada di Desa Bowali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.12

Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Poliklinik/balai pengobatan	1 unit
2	Posyandu	2 unit
3	Perawat	1 orang

Jumlah	4
--------	---

Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana kesehatan di Desa Bowali kurang memadai, hal ini dikarenakan tidak adanya prasarana kesehatan berupa rumah sakit, sehingga apabila ingin berobat masyarakat Desa Bowali harus keluar dari Desa ke Kabupaten.

E. PEMERINTAHAN

1. Pemerintah Desa Bowali dan Badan Permusyawaratan

Desa Bowali

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa. Adapun Kepala Desa merupakan penanggungjawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga Desa.

a. Tugas, Wewenang, Kewajiban Kepala Desa Bowali

- Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

- Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang :
- memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - membuat dan menetapkan Keputusan Kepala Desa;
 - menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - membina kehidupan masyarakat Desa;
 - membina perekonomian Desa;
 - mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa mempunyai kewajiban:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- melaksanakan kehidupan demokrasi;
- memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- memelihara dan menjaga asset dan atau barang inventaris pemerintahan desa.
- mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

- membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
- memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang tersebut, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.

Sedangkan Perangkat Desa Bowali terdiri dari 3 (tiga) unit kerja yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan umum. Dan terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu dusun Boba I, dusun Boba II, dusun Fuy, dan dusun Radha. Adapun perangkat Desa tersebut ditunjuk, diangkat, dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat untuk disahkan Camat.

b. Tugas dan Fungsi Sekertaris Desa Bowali

- Sekertaris Desa sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- Sekertaris Desa mempunyai tugas :
 - melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - melaksanakan urusan keuangan;

- melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.
- Sekertaris Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - pelaksana administrasi pemerintahan;
 - pelaksana administrasi pembangunan;
 - pelaksana administrasi kemasyarakatan; dan
 - pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat, Kepala Desa dan Prangkat Desa lainnya.
- Sekertaris Desa dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- Sekertaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kepala Urusan.

c. Kepala Urusan

- Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf membantu Sekertaris Desa dalam bidang tugasnya.
- Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekertaris Desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- Kepala urusan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa
- Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
 - pelaksana administrasi kegiatan-kegiatan urusan sesuai bidang tugasnya masing-masing; dan
 - pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat, Sekertaris Desa dan Kepala Desa sesuai bidang tuganya masing-masing.

d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bowali berjumlah 5 orang, diantaranya: Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan Anggota BPD. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk Desa Bowali. BPD dipilih oleh perwakilan masyarakat Desa secara musyawarah mufakat.

Fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPD mempunyai wewenang:

- Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- Menyusun tata tertib BPD.

Untuk menjamin kelancaran jalannya urusan-urusan Desa Bowali tersebut, maka aparat Desa setidaknya harus memiliki kompetensi yang mumpuni yang berarti aparat Desa harus berpendidikan. Adapun Perangkat Desa dan pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.13
Pemerintahan Desa Bowali

Pemerintah Desa	
Jumlah aparat Pemerintahan Desa	12 orang

Kepala Desa	Ada
Sekretaris Desa	Ada
Kepala Urusan Pemerintahan	Ada – Aktif
Kepala Urusan Pembangunan	Ada – Aktif
Kepala Urusan Umum	Ada – Aktif
Jumlah Staf	3 orang
Jumlah Dusun	4 dusun
Kepala Dusun I	Aktif
Kepala Dusun II	Aktif
Kepala Dusun III	Aktif
Kepala Dusun IV	Aktif
Tingkat Pendidikan Aparat Desa	
Kepala Desa	SMK
Sekretaris Desa	SMA
Kepala Urusan Pemerintahan	SMA
Kepala Urusan Pembangunan	SMA
Kepala Urusan Umum	S1
Badan Permusyawaratan Desa	
Keberadaan BPD	Ada – Aktif
Jumlah Anggota BPD	5
Pendidikan Anggota BPD	
Ketua	SMA

Wakil Ketua	SMA
Sekretaris	S1
Anggota	SMA
Anggota	SMA

Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014.

Tabel II.14

Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa Bowali

Gedung Kantor	
Kondisi	Baik
Jumlah ruangan kerja	4 ruangan
Balai Desa	Tidak ada
Listrik	Ada
Air Bersih	Ada
Rumah dinas Kepala Desa dan perangkat	Tidak ada
Inventaris dan Alat Tulis Kantor	
Jumlah mesin tik	1 buah
Jumlah meja	10 buah
Jumlah kursi	100 buah
Jumlah almari arsip	6 buah
Komputer	1 buah

Mesin fax	-
Kendaraan dinas	1 buah
Administrasi Pemerintahan Desa	
Buku Data Peraturan Desa	Ada, terisi
Buku Keputusan Kepala Desa	Ada, terisi
Buku Administrasi Kependudukan	Ada, terisi
Buku Data Inventaris	Ada, terisi
Buku Data Aparat	Ada, terisi
Buku Data Tanah Milik Desa / Tanah Kas Desa	Ada, terisi
Buku Administrasi Pajak Dan Retribusi	Ada, terisi
Buku Data Tanah	Ada, terisi
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	Ada, terisi
Buku Agenda Ekspedisi	Ada, terisi
Buku Profil Desa	Ada, terisi
Buku Data Induk Penduduk	Ada, terisi
Buku Data Mutasi Penduduk	Ada, terisi
Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan	Ada, terisi
Buku Registrasi Pelayanan	Ada, terisi

Penduduk	
Buku Data Penduduk Sementara	Ada, terisi
Buku Anggaran Penerimaan	Ada, terisi
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai Dan Pembangunan	Ada, terisi
Buku Kas Umum	Ada, terisi
Buku Kas Pembantu Penerimaan	Ada, terisi
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin Dan Pembangunan	Ada, terisi
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Ada, terisi

Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014.

Tabel II.15
Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa /
BPD

Ruangan kerja	Ada
Balai BPD	Tidak ada
Listrik	Ada
Air bersih	Ada
Telepon	Tidak ada
Inventaris dan Alat Tulis Kantor	
Jumlah mesin tik	Tidak ada

Jumlah meja	2 buah
Jumlah kursi	10 buah
Jumlah almari arsip	2 buah
Komputer	1 unit
Administrasi BPD	
Buku administrasi keanggotaan BPD	Ada
Buku administrasi kegiatan BPD	Ada
Buku kegiatan BPD	Ada
Buku Himpunan Peraturan Desa yang ditetapkan BPD dan Kepala Desa	Ada

Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014.

Tabel II.16
Prasarana dan Sarana Dusun

Gedung kantor atau balai pertemuan	Tidak ada
Alat tulis kantor	Tidak ada
Barang inventaris	Ada
Buku administrasi	Ada

Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014.

Berdasarkan tabel II.13, II.4, II.15 dapat dilihat bahwa prasarana yang mendukung pemerintahan Desa Bowali sudah tergolong cukup baik dengan adanya gedung kantor, listrik dan air meskipun balai desa untuk pertemuan dengan masyarakat tidak ada tapi

partisipasi masyarakat Desa Bowali sangat tinggi untuk menghadiri pertemuan yang biasanya diselenggarakan di kantor Desa. Prasarana sarana untuk administrasi di kantor Desa Bowali sudah tergolong cukup baik untuk mendukung kinerja pemerintah desa dengan adanya buku-buku untuk pendataan pendataan yang dilakukan oleh aparatur desa sudah cukup baik dengan adanya buku dan terisinya buku pendataan tersebut.

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa Bowali

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan umum, pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan keuangan Desa Bowali, maka perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa. Adapun lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Bowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.17

Lembaga Kemasyarakatan Desa Bowali

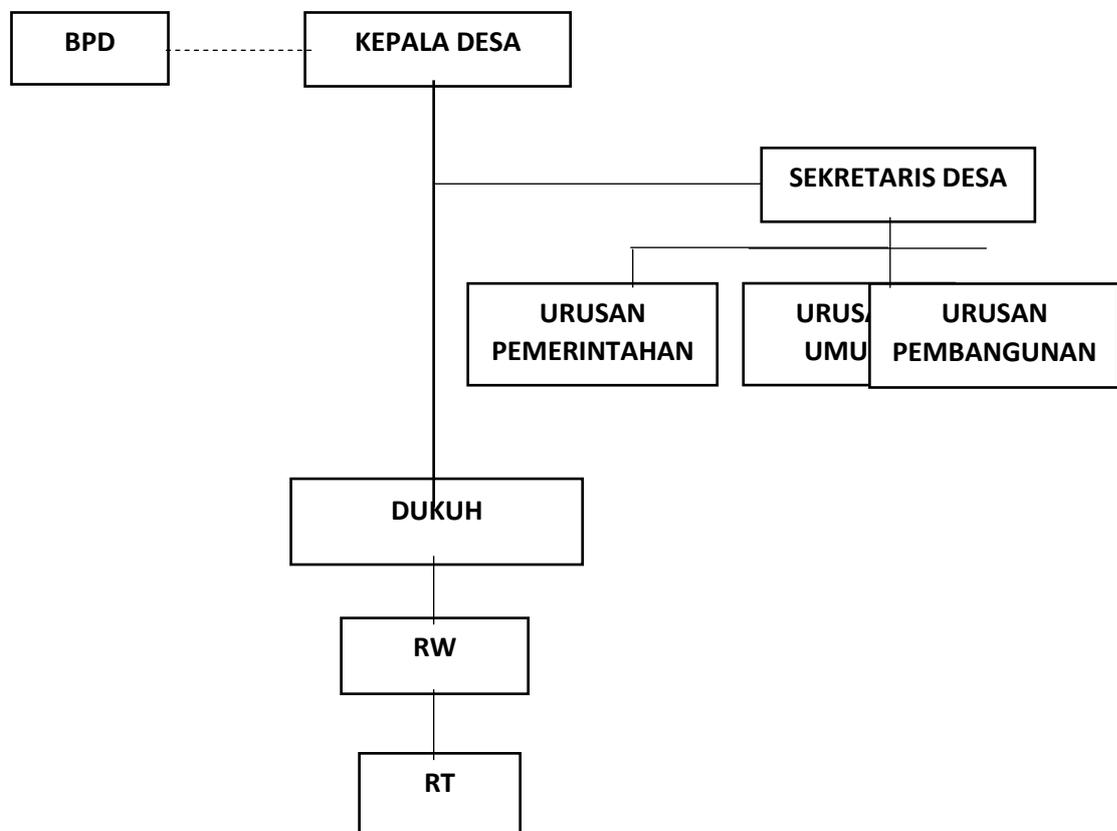
No	Lembaga Kemasyararakatan Desa	Ruang Lingkup Kegiatan
1	LKMD	3 jenis
2	PKK	5 jenis

3	RT	4 jenis
4	RW	12 jenis

Sumber Data :Profil Desa Bowali, 2014.

Gambar II. 1

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA BOWALI



Sumber Data : Profil Desa Bowali, 2014.

F. PROFIL PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH

Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tahun 2014-2018 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2011-2013 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018. Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah sebagai program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan menyeluruh memiliki posisi sangat strategis karena perannya sebagai berikut; (1) Mendukung pelaksanaan enam tekad pembangunan yang ditetapkan sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan pendapatan perkapita, menurunkan penduduk kemiskinan yang mencapai 20,03% keadaan Maret 2013, (2) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian; (3) Mendukung pelaksanaan 8 agenda pembangunan; dan (4) Mendukung penyiapan lapangan kerja di pedesaan terutama tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian.

1. Tujuan Pembangunan

Tujuan Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018 adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas perekonomian berbasis keunggulan Desa/Kelurahan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata > 6,5 %.
- b. Mendukung penurunan penduduk miskin menjadi 15 % akhir tahun 2018.
- c. Memberdayakan kelembagaan ekonomi dan sosial pedesaan yang dapat mendukung pelaksanaan 6 tekad pembangunan dan 8 agenda pembangunan daerah.
- d. Menambah jumlah wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Desa/Kelurahan.

2. Sasaran Pembangunan

Sasaran Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas dan daya saing basis ekonomi unggulan Desa/Kelurahan.
- b. Meningkatnya akses sumberdaya ekonomi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatnya Desa/Kelurahan yang mandiri secara ekonomi dan bebas dari kemiskinan.

3. Prinsip Pengembangan.

Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dilakukan dengan beberapa prinsip antara lain:

- a. *Pemberdayaan*, upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dan kapasitas pemerintah desa/kelurahan melalui pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta keberlanjutan pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan yang optimal;
- b. *Partisipatif*, upaya mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, baik dalam bentuk pikiran, tenaga maupun material sehingga tumbuh rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab;
- c. *Demokratis*, pengambilan keputusan dalam setiap tahapan kegiatan didasarkan atas musyawarah-mufakat dan kesetaraan gender;
- d. *Bertumpu pada sumber daya lokal*, penetapan jenis kegiatan didasarkan pada ketersediaan potensi dan kecocokan kegiatan sesuai kebutuhan setempat sehingga tercapai daya guna dan hasil guna pembangunan;
- e. *Efisiensi*, menjamin pencapaian target program dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan;

- f. *Efektivitas*, pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat;
- g. *Transparansi*, Manajemen pengelolaan pembangunan desa mandiri anggur merah dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan;
- h. *Keterpaduan dan Keberlanjutan*, pembangunan desa mandiri anggur merah dapat dilaksanakan secara simultan dengan program-program pembangunan perdesaan lainnya dengan memperhatikan keterkaitan dan keberlanjutannya, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan mendasar setiap desa/kelurahan.

4. Lingkup Kegiatan Wilayah

Lingkup kegiatan Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018 sebagai berikut:

a. Lingkup Kegiatan Utama.

Kegiatan utama Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang menjangkau seluruh Desa/kelurahan yang belum mendapatkan program Desa Mandiri Anggur Merah tahun 2011-2013 yaitu:

- Dana hibah Desa/Kelurahan yang digulirkan pada kelompok masyarakat sebesar Rp. 250 juta per Desa/Kelurahan melalui

program Desa Mandiri Anggur Merah untuk mendukung pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi Desa/kelurahan.

- Dana hibah Desa/Kelurahan untuk pembangunan rumah layak huni untuk KK miskin sebesar Rp.50 juta melalui Program P2LDT untuk pembangunan rumah.
- Pembiayaan PKM yang ditempatkan di Desa/ Kelurahan dengan gaji/ upah dan biaya operasional Rp.2 juta per bulan untuk pendamping 1 Desa/Kelurahan dan Rp.2,5 juta Per bulan untuk pendampingan 2 Desa/Kelurahan.
- Biaya operasional Desa/Kelurahan sebesar Rp.2,5 juta per tahun.
- Biaya Operasional Tim pengendali Kecamatan (Pemerintah Kecamatan, Polsek dan Koramil) sebesar Rp. 10 juta per tahun

b. Lingkup Kegiatan Sinergi program

Pembangunan terpadu berbasis desa/ kelurahan melalui Program Desa Mandiri Anggur Merah akan disinergikan dengan program lain. Berdasarkan sumber dana maka sinergi program sebagai berikut:

➤ APBD Provinsi

- Hibah Desa/ kelurahan sebesar Rp.50 juta untuk pembenahan destinasi wisata dan kesiapan sarana pendukung bagi Desa potensi wisata.

- Hibah Modal Koperasi sebesar Rp.20 juta per Koperasi bagi Koperasi Desa Mandiri Anggur Merah dan Koperasi lainnya.
- Dana operasional bagi staf pengelola program di Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- Pelatihan kewirausahaan bagi PKM berprestasi yang telah mengembangkan usaha sendiri atau bertugas sebagai manager Koperasi Desa Mandiri Anggur Merah.
- Sinergi lintas sektor program SKPD.
- APBD Kabupaten/Kota.
- Hibah desa sebagai replikasi Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur merah.
- Dana operasional dan pembinaan Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Program Replikasi.
- APBN dan Lembaga Internasional.
- Sinergi program Kementrian/Lembaga berbasis Desa/ Kelurahan antara lain Program OVOP (*one village one product*), Program Prukab, Program Bedah Desa, Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Program KB dan program lainnya.
- Sinergi program dalam melengkapi kebutuhan kemandirian Desa/Kelurahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

- Kegiatan melalui dana yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota, Satuan Kerja (SATKER) dan lembaga Internasional merupakan kegiatan yang disinergikan dengan Dana Hibah Desa/ kelurahan untuk percepatan penurunan kemiskinan.

- Hibah CSR, NGO dan dukungan Pembinaan.

- SKPD Provinsi, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dapat mengambil bagian pembinaan secara swadaya.

- NGO lokal dapat memberikan dukungan pemberdayaan dan pendampingan kelompok.

5. Kegiatan Pembangunan

Kegiatan Program Desa Mandiri Anggur Merah mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Ekonomi Produktif

Kegiatan utama melalui alokasi dana sebesar Rp.250 juta diarahkan untuk pengembangan ekonomi produktif unggulan desa/kelurahan sebagai berikut:

- Pengembangan komoditas jagung dan ternak untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- Pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan budidaya rumput laut.
- Pengembangan komoditas perkebunan berorientasi ekspor antara lain jambu mete, kakao dan kopi.
- Pengembangan kegiatan industri kecil dan kerajinan rumah tangga.
- Pengembangan usaha jasa, koperasi, UMKM dan perdagangan.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Desa/Kelurahan dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kegiatan peningkatan sumber daya manusia antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan SDM aparatur Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksanaan tata kelola Pemerintahan.

- Peningkatan SDM pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
dan/atau Koperasi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan Desa/ Kelurahan.
- Peningkatan SDM angkatan kerja sesuai dengan basis ekonomi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi produktif sesuai keunggulan Desa/ Kelurahan.

c. Pembangunan Infrastruktur

Kegiatan sosial dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi yaitu: 1) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat; 2) peningkatan mutu lingkungan permukiman dan rumah layak huni; 3) penyediaan air bersih dan penerangan rumah tangga; 4) peningkatan akses dalam wilayah dan keluar wilayah pedesaan; 5) peningkatan prsarana pengairan (embung, sumur bor, irigasi pedesaan); 6) peningkatan penghijauan dan konservasi lahan; 7) peningkatan akses informasi melalui desa berdering; 8) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

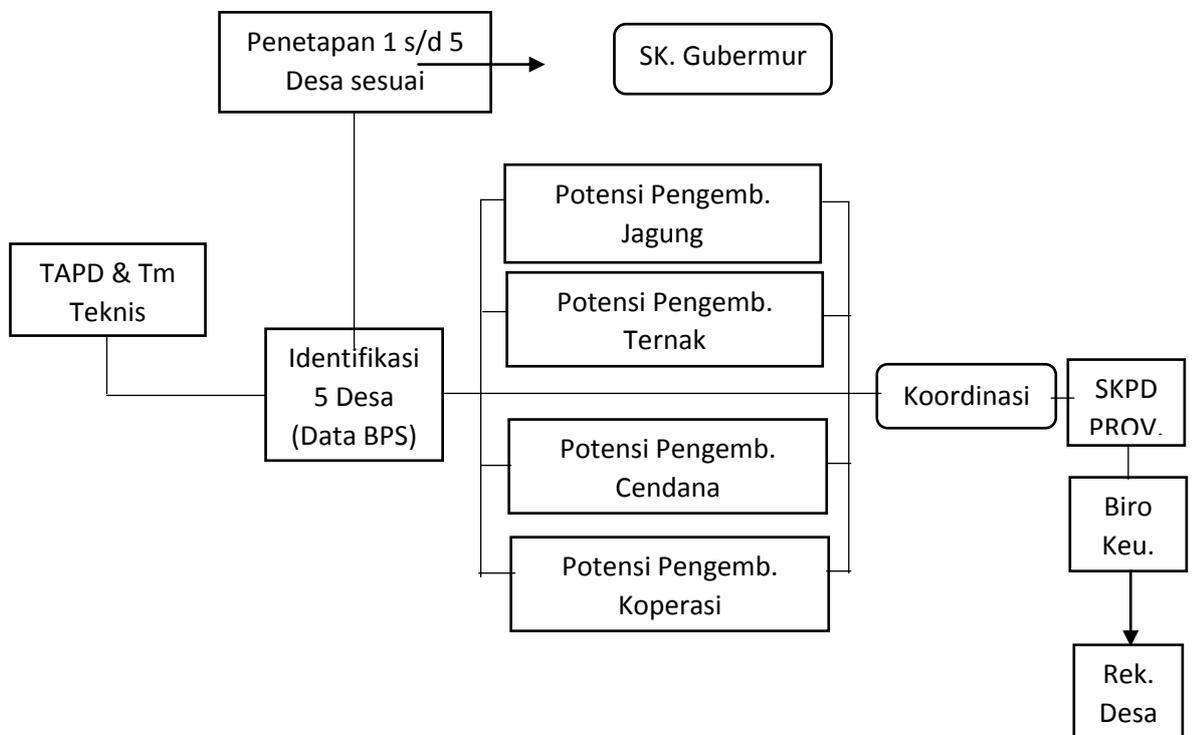
6. Sasaran Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

Sasaran lokasi pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah didasarkan pada kriteria yaitu:

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi melakukan identifikasi terhadap nama-nama Desa berdasarkan kriteria BPS NTT, yaitu Desa yang memiliki presentase rumah tangga miskin terbanyak pada setiap kecamatan dan meminimasi 1-5 Desa/Kelurahan;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi dibantu Tim Teknis Provinsi melakukan pendataan terhadap karakteristik Desa dan kondisi sosial ekonomi dari setiap Desa yang telah diidentifikasi, agar mempunyai gambaran awal mengenai kondisi Desa/Kelurahan, sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan karakteristik lokal setiap Desa/Kelurahan;
- c. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi dibantu Tim Teknis Provinsi melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mendiskusikan nama-nama Desa/Kelurahan yang telah diidentifikasi untuk mendapatkan masukan dalam rangka penentuan Desa/Kelurahan untuk setiap Kecamatan;
- d. Desa dan Kelurahan yang telah disepakati bersama antara TAPD Provinsi dan TAPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- e. Keputusan Gubernur tersebut diserahkan (1) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi

produktif; (2) SKPD tingkat Provinsi untuk Sinkronisasi dengan program dan kegiatan setiap tahun, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi; (3) Biro Keuangan Setda Provinsi NTT untuk mengatur alokasi dana yang akan ditransfer ke Bank NTT bekerjasama dengan SKPD pengelola, menurut jumlah Desa/Kelurahan pada setiap Kabupaten/Kota.

Gambar II.2
Mekanisme Penetapan Desa



Sumber Data : Peraturan Gubernur NTT Nomor 4 Tahun 2014

7. Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Program.

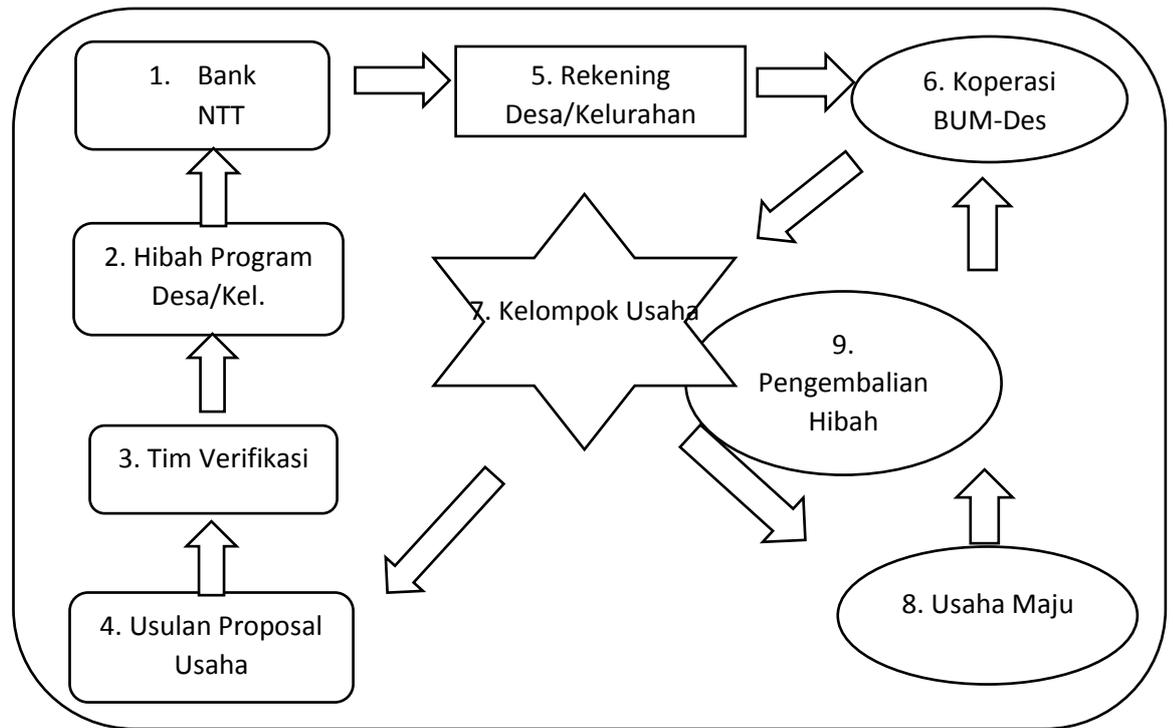
Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah diatur sebagai berikut:

- a. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/Kelurahan bersama Masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/Kelurahan.
- b. Jika di Desa/Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
- c. Mekanisme Pembentukan Koperasi.
- d. PKM ditunjuk sebagai Manajer atau pengelola koperasi dengan tugas yaitu melaksanakan usaha koperasi, mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi kepada pengurus, memberikan pelayanan usaha kepada anggota, membuat studi kelayakan usaha koperasi, membuat laporan perkembangan usaha koperasi.
- e. Koperasi yang sudah terbentuk dan/atau ditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Provinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi, mengetahui kepala desa/lurah.

- f. Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan.
- g. Proposal dan syarat-syarat administratif diverifikasi oleh tim verifikasi provinsi.
- h. Hasil verifikasi Tim Verifikasi Provinsi berupa rekomendasi kepada Gubernur.
- i. Setelah dilakukan verifikasi, proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan.
- j. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan naskah hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/Lurah.
- k. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT.
- l. Bantuan Hibah Program yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi ke rekening Desa/Kelurahan adalah sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- m. Kepala Desa/Lurah menyalurkan dana dari rekening Desa/Kelurahan ke rekening Koperasi dalam bentuk pinjaman Desa/Kelurahan atau Modal Penyertaan dari Desa/Kelurahan.

- n. Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari Desa/Kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada Anggota Koperasi sebagai Pinjaman.
- o. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi.
- p. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukan untuk konsumsi.
- q. Besaran bunga pinjaman anggota ditetapkan dalam rapat anggota.
- r. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- s. Mekanisme penyaluran dana dari koperasi kepada anggota wajib melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan usaha anggota, jaminan dalam bentuk barang bilamana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang.
- t. Pengurus Koperasi bersama pemerintah Desa/Kelurahan dan PKM memantau perkembangan usaha anggota koperasi.
- u. Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke Koperasi.
- v. Koperasi akan melakukan perguliran ke anggota Koperasi yang lain.

Gambar II.3
Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan Dana



Sumber Data : Peraturan Gubernur NTT Nomor 4 Tahun 2014

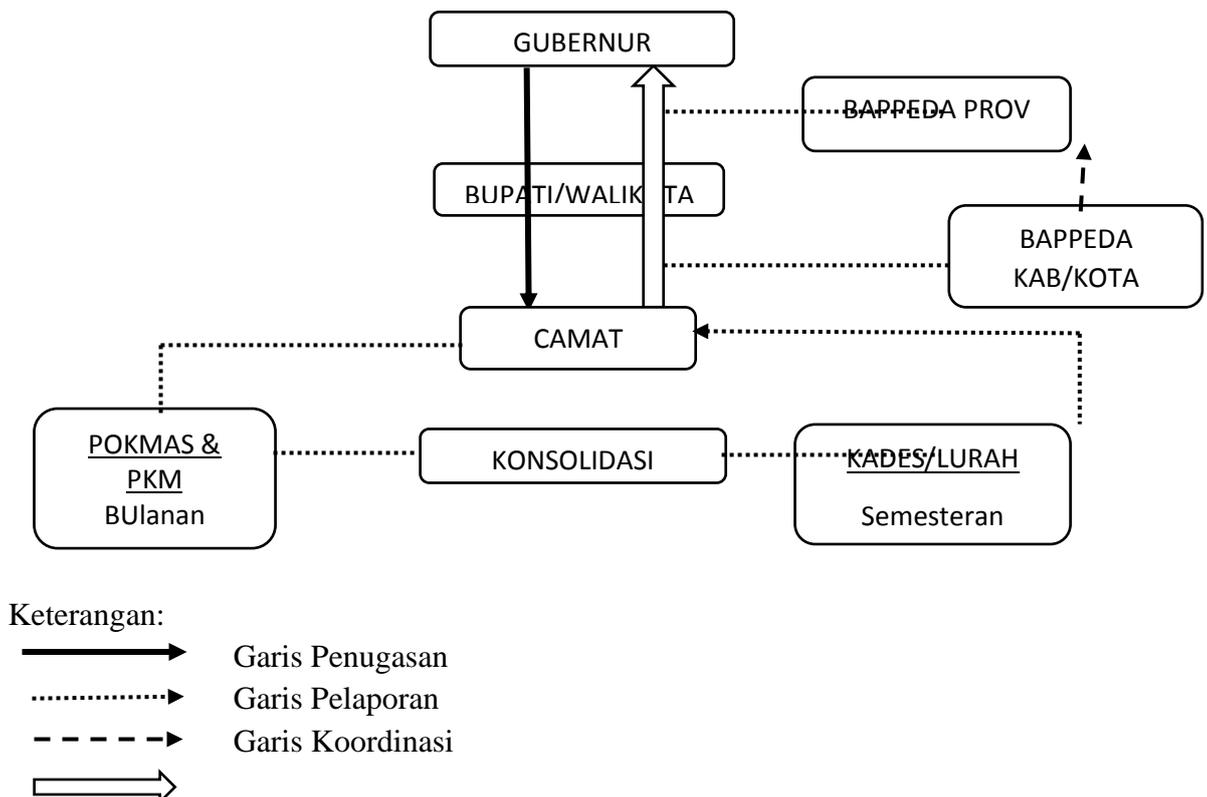
8. Pelaporan

Laporan Penyelenggaraan pembangunan terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah berfungsi sebagai bahan untuk menilai efisiensi dan efektivitas terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu mekanisme penyelenggaraannya ditentukan sebagai berikut:

- a. PKM bersama kelompok masyarakat menyampaikan laporan perkembangan usaha bulanan kepada Kepala Desa/Lurah;

- b. Kepala Desa/Lurah menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap semester kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
- c. Camat menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;
- d. Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota menyampaikan laporan semesteran kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi;
- e. Kepala Bappeda Provinsi menyampaikan laporan evaluasi kepada Gubernur untuk dijadikan sebagai bahan pembinaan dan supervisi.

Gambar II.4
Mekanisme Pelaporan



Garis Pertanggungjawaban

Sumber Data : Peraturan Gubernur NTT Nomor 4 Tahun 2014

9. Perkembangan Penerima Dana Program Anggur Merah pada Tahap I tahun 2014 dan Tahap II tahun 2016 di Desa Bowali.

Tabel II.18

Penerima Dana Program Anggur Merah Tahap I Tahun 2014

No	Nama POKMAS Koperasi Tunas Baru	Nama Anggota	Jenis Usaha	Perkembangan
1	Melati	Getrudis Wea	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Dominikus Wawo	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Yohana Meo	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Martina Nau Ria	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Ester Meo	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Irene Ene	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Theresia Uge	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Elisabeth Moa	Usaha Dagang	Baik/lunas

		Maria Moi Meka	Usaha Dagang	Baik/lunas
		Theresia Bhebhe	Usaha Dagang	Baik/lunas
2	Gote Gore	Antonius Paghe	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Georgius L. Wedjo	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Yoseph Meka	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Anatolia Y.S. Wedjo	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Antonius Deghe	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Elisabeth Era	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Veronika Liu	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Maria Mudha	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Martinus Wawo	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Monika Wae	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Yoseph Manu	Penggemukan	Baik/lunas

		sapi	
	Adriana Meo	Penggemukan sapi	Baik/lunas
	Yuliana Bue	Penggemukan sapi	Baik/lunas
	Adrianus Manu	Penggemukan sapi	Baik/lunas
	Theresia Wae	Penggemukan sapi	Baik/lunas
	Nikolaus Leu	Penggemukan sapi	Baik/lunas
	Yustina W. Rani	Penggemukan sapi	Baik/lunas
	Yohanes Wunu	Penggemukan sapi	Baik/lunas
	Sisilia Ado	Penggemukan sapi	Baik/lunas
	Frederikus Tena	Penggemukan sapi	Baik/lunas
	Leonardus Meka	Penggemukan sapi	Baik/lunas
	Veronika M. Rua	Penggemukan sapi	Baik/lunas

		Yoseph Selo	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Koryati A. Delima	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Marianus Dewa	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Veronika O. Radho	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Martina O. Tena	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Rafael Roga	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Thomas Longa	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Methodius Mita	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Margaretha M. Naru	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Rafael Lou	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Klementina Meo	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Nikolaus Gheno	Penggemukan	Baik/lunas

			sapi	
		Mau Markus	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Paulus Bajo	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Agustinus Penga	Penggemukan sapi	Baik/lunas
		Sisilia Bhara	Penggemukan sapi	Baik/lunas

Sumber Data : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan

*Mandiri Anggur Merah di Desa Bowali Kecamatan Bajawa
Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2014*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan usaha ekonomi koperasi Tunas Baru di Desa Bowali berjalan dengan baik yang terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok Melati dan kelompok Gote Gore. Jenis usaha kelompok Melati adalah usaha dagang sedangkan kelompok Gote Gore usaha penggemukan sapi. Topografi Desa Bowali sangat cocok untuk pengembangan hewan ternak, sehingga banyak masyarakat yang memiliki hewan ternak dan juga lahan yang cocok untuk budidaya sayuran.

Tabel II.19

Penerima Dana Program Anggur Merah Tahap II Tahun 2016

No	Nama POKMAS	Nama Anggota	Jenis Usaha	Dana (Rp)
----	-------------	--------------	-------------	-----------

	Koperasi Tunas Baru			
1	Melati	Theresia Bhebhe	Usaha Dagang	10.000.000
		Rosalia Dhewa	Usaha Dagang	5.000.000
		Yohana Meo	Usaha Dagang	5.000.000
		Martina Nau Ria	Usaha Dagang	5.000.000
		Ester Meo	Usaha Dagang	5.000.000
		Irene Ene	Usaha Dagang	5.000.000
		Elisabeth Dea	Usaha Dagang	5.000.000
		Klementina Meo	Usaha Dagang	5.000.000
		Getrudis Wea	Usaha Dagang	5.000.000
2	Gote-Gore	Nikolaus Gheno	Penggemukan sapi	5.000.000
		Maria Wene	Penggemukan sapi	5.000.000
		Elisabeth Nay	Penggemukan sapi	5.000.000
		Magdalena Muza	Penggemukan sapi	5.000.000
		Maria Goreti Bupu	Penggemukan sapi	5.000.000
		Bertolomeus Foju	Penggemukan sapi	5.000.000

		Klara Uge	Penggemukan sapi	5.000.000
		Hendrikus Lami	Penggemukan sapi	5.000.000
		Petrus Nga'i	Penggemukan sapi	5.000.000
		Hermanus Dedo	Penggemukan sapi	5.000.000
		Emanuel Dewa	Penggemukan sapi	5.000.000
		Maria Dhone	Penggemukan sapi	5.000.000
		Dominika Odje	Penggemukan sapi	5.000.000
		Maria Uge Bay	Penggemukan sapi	5.000.000
		Margaretha Ngadha	Penggemukan sapi	5.000.000
		Agustina Ripo Ka'u	Penggemukan sapi	5.000.000
		Kristina Mo'i Loda	Penggemukan sapi	5.000.000
		Yulius T. Napa	Penggemukan	5.000.000

		sapi	
	Yuliana Wae Doe	Penggemukan sapi	5.000.000
	Nikolaus Pili	Penggemukan sapi	5.000.000
	Karolus Lodo	Penggemukan sapi	5.000.000
	Margaretha Lobe	Penggemukan sapi	5.000.000
	Yustina Uge	Penggemukan sapi	5.000.000
	Agustinus Bhaga	Penggemukan sapi	5.000.000
	Yoseph Bhodo	Penggemukan sapi	5.000.000
	Mersiana Odje	Penggemukan sapi	5.000.000
	Margaretha Wawo	Penggemukan sapi	5.000.000
	Agustinus Ho'o	Penggemukan sapi	5.000.000
	Petrus Kewi Odje	Penggemukan sapi	5.000.000

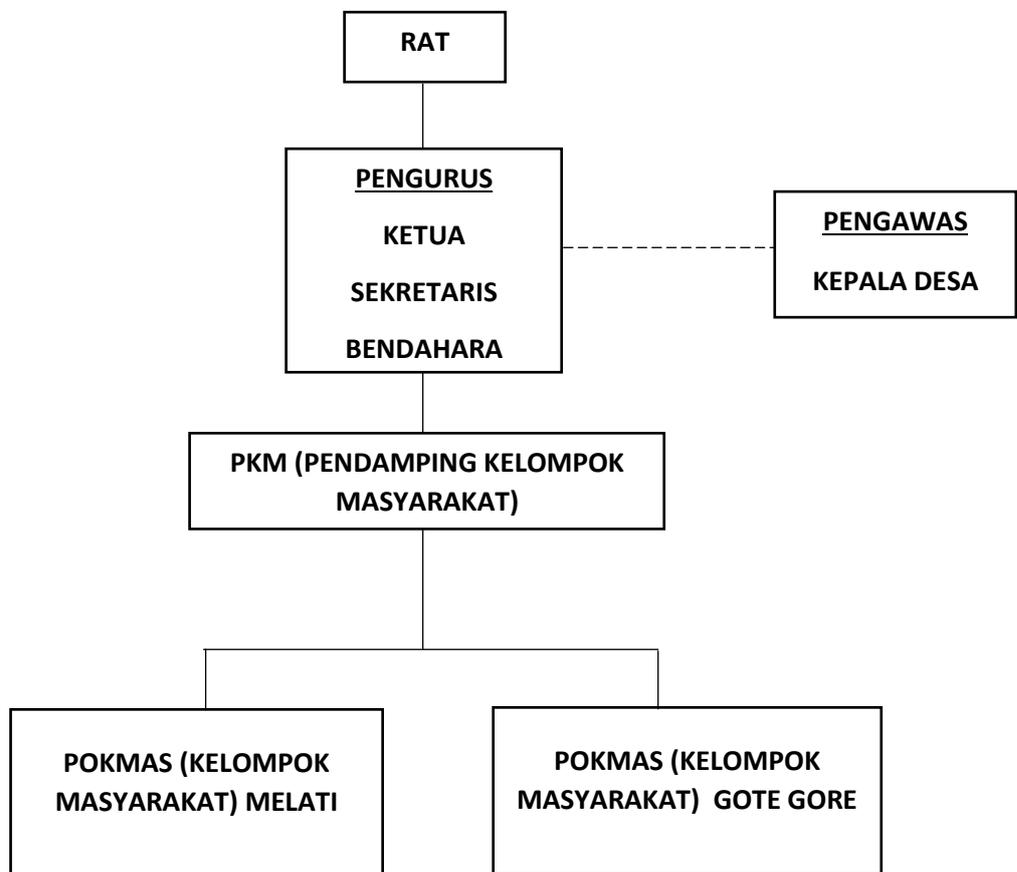
	Agustinus Milo	Penggemukan sapi	5.000.000
	Bernadetha Pajo	Penggemukan sapi	5.000.000
	Yuliana Meo Ta'i	Penggemukan sapi	5.000.000
	Ludsgardis Y.I. Nanga	Penggemukan sapi	5.000.000
	Maria Mo'i Ene	Penggemukan sapi	5.000.000
	Yakobus Ma'u	Penggemukan sapi	5.000.000
	Petrus Ria Gale	Penggemukan sapi	5.000.000
	Kristina Lengi	Penggemukan sapi	5.000.000
	Veronika Liu	Penggemukan sapi	5.000.000
	Matheus Anu	Penggemukan sapi	5.000.000
	Koryati A. Delima	Penggemukan sapi	5.000.000
TOTAL			250.000.000

*Sumber Data : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan
Mandiri Anggur Merah di Desa Bowali Kecamatan Bajawa
Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2016*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada perubahan yang signifikan terhadap penerima dana kelompok Melati dan Gote-Gote. Pada kelompok Melati jumlah anggota penerima dana Anggur Merah berkurang yang sebelumnya di tahap I berjumlah 10 (sepuluh) orang menjadi berjumlah 9 (sembilan) orang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pergantian anggota koperasi Anggur Merah yang baru dan jumlah anggota yang ingin bergabung dalam kelompok masyarakat Melati hanya 9 (sembilan orang). Dapat dilihat di Pokmas Melati Ibu Theresia Bhebhe menerima Rp. 10.000.000, hal tersebut merupakan kesepakatan bersama anggota Anggur Merah, pengurus koperasi, dan Kepala Desa agar dana Anggur Merah yang sebesar Rp. 250.000.000 bisa bergulir terus ke masyarakat tanpa di simpan di Koperasi.

Pada Pokmas Gote-Gore dapat dilihat perubahan pada penerima dana Anggur Merah, yaitu anggota lama diganti dengan anggota baru agar dana Anggur Merah tersebut dapat diterima oleh seluruh masyarakat miskin yang ada di Desa Bowali. Hanya ada beberapa saja anggota lama yaitu Veronika Liu, Matheus Anu, Koryati A. Delima dan Nikolaus Gheno. Sedangkan yang lain merupakan anggota baru. Pada Pokmas Gote-Gore ini masing-masing menerima Rp.5.000.000.

Gambar II.5
Struktur Organisasi Koperasi Tunas Baru Anggur Merah



*Sumber Data : Sekretaris Koperasi Tunas Baru Anggur Merah Desa
Bowali, 2014*

Berdasarkan struktur organisasi Koperasi Tunas Baru Anggur Merah pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa ada hubungan yang signifikan antara koperasi dan desa. Koperasi Tunas Baru Anggur Merah tidak berdiri sendiri tetapi merupakan koperasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan dikawal langsung dalam pelaksanaan dan perkembangan koperasi oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa Bowali yang berfungsi sebagai pengawas. Koperasi Tunas Baru Anggur Merah dibentuk oleh Pemerintah Desa Bowali untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Tim Provinsi program Anggur Merah yaitu program Anggur Merah diwajibkan diwadahi oleh koperasi.

Dana hibah murni sebesar Rp.250.000.000 diberikan langsung oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Desa Bowali. Dana tersebut diberikan lagi oleh Pemerintah Desa kepada Koperasi Tunas Baru Bowali sebagai pengelola dana untuk masyarakat miskin yang bergabung menjadi anggota koperasi. Pemerintah Desa turut andil dalam pelaksanaan dan pengembangan Koperasi Tunas Baru yaitu sebagai pengawas koperasi dalam menjalankan pelaksanaan program Anggur Merah dan juga sebagai tim untuk mengverifikasi masyarakat miskin yang akan menjadi anggota koperasi yang dibantu oleh Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) sehingga masyarakat tersebut layak dan pantas menerima dana program Anggur Merah.

Pemerintah Desa Bowali menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap semester kepada Bupati melalui Camat. Camat menyampaikan laporan kepada Bappeda Kabupaten Ngada yang selanjutnya Bappeda Kabupaten Ngada menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Anggur Merah kepada

Gubernur melalui Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berfungsi sebagai bahan untuk menilai efisiensi dan efektivitas terhadap perkembangan pelaksanaan program Anggur Merah.

Pengurus Koperasi Tunas Baru Anggur Merah yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara bertugas untuk: 1) mengelola koperasi; 2) mendorong dan memajukan usaha anggota; 3) menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; 4) menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota; 5) menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; 6) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; 7) menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien; 8) memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi; 9) melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) berfungsi sebagai fasilitator dalam proses identifikasi dan pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat. Di dalam koperasi Tunas Baru Anggur Merah terdapat dua kelompok masyarakat (Pokmas) yaitu Pokmas Melati sebagai pengusaha dagang dan Pokmas Gote-Gore sebagai penggemukan sapi. Pokmas tersebut diberikan pendampingan dan bimbingan dalam menjalankan usaha ekonomi produktifnya.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota Berwenang: 1) Menetapkan kebijakan umum koperasi; 2) Mengubah Anggaran Dasar; 3) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus; 4) Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama Koperasi; 5) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB III

ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti akan mengemukakan hasil penelitian Implementasi Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Bowali yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan berupa penyajian data-data yang akan diulas dengan analisa data dari penelitian yang telah dilaksanakan, yang diambil dan digali dari sumber data primer dan sekunder.

Pendekatan deskriptif dipakai untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini penulis berusaha untuk menggambarkan keadaan dari hal yang telah diteliti.

Adapun didalam mengumpulkan data dan informasi, penyusun menggunakan interview guide atau wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan obyek bahasan penelitian, lalu penyusun juga mendapat atau memperoleh data berupa dokumentasi tertulis yang sifatnya resmi yang tersedia di lingkungan Pemerintahan Desa Bowali.

A. DESKRIPSI NARASUMBER

Deskripsi narasumber perlu untuk diketahui karena berisi tentang data-data mengenai narasumber dalam penelitian ini, sehingga diharapkan melalui data-data narasumber ini dapat memberikan sumbangan kepada peneliti dalam upaya untuk menjelaskan tentang implementasi Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa

Bowali. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menentukan narasumber dengan melihat menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan status/jabatan narasumber.

Tabel III.1
Identitas Narasumber

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Agama	Pendidikan	Pekerjaan / Jabatan
1	Fransiskus Ana Meo	46 tahun	Laki-laki	Katolik	SLTA	Kepala Desa Bowali
2	Mateus Anu	54 tahun	Laki-laki	Katolik	SD	Ketua Koperasi
3	Theofilus Nono	30 tahun	Laki-laki	Katolik	S-1	Sekretaris Koperasi
4	Koryati Ana Delima	30 tahun	Perempuan	Katolik	SLTA	Bendahara Koperasi
5	Petrus Martinus Sedu Wea	30 tahun	Laki-laki	Katolik	S-1	Pendamping Kelompok Masyarakat
6	Martina Nau Ria	61 tahun	Perempuan	Katolik	SD	Pedagang/Anggota Anggur Merah
7	Yohana Meo	42 tahun	Perempuan	Katolik	SD	Pedagang/Anggota Anggur Merah
8	Theresia Bhebhe	57 tahun	Perempuan	Katolik	SD	Pedagang/Anggota Anggur Merah
9	Elisabeth Moa	57 tahun	Perempuan	Katolik	SD	Pedagang/Anggota Anggur Merah
10	Ester Meo	45 tahun	Perempuan	Katolik	SLTA	Pedagang/Anggota Anggur Merah
11	Nikolaus Gheno	35 tahun	Laki-laki	Katolik	SD	Petani/Anggota Anggur Merah
12	Mau Markus	60 tahun	Laki-laki	Katolik	SLTA	Petani/Anggota Anggur Merah
13	Hendrikus Lame	52 tahun	Laki-laki	Katolik	SD	Petani/Anggota Anggur Merah
14	Agustinus Bhaga	48 tahun	Laki-laki	Katolik	SD	Petani/Anggota Anggur Merah
15	Yakobus Ma'u	56 tahun	Laki-laki	Katolik	SD	Petani/Anggota Anggur Merah

Sumber Data : Data primer

1. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel III.2

Data Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – laki	9	60
2	Perempuan	6	40
Jumlah		15	100

Sumber Data : Data Primer

Dari tabel di atas tentang jenis kelamin dari informan menjelaskan bahwa, narasumber berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 orang dengan presentase sebesar 60% dari jumlah seluruh narasumber. Untuk narasumber perempuan berjumlah 6 orang dengan presentase sebesar 40% dari jumlah seluruh narasumber dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, jumlah narasumber lebih didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 9 orang, sedangkan perempuan hanya berjumlah 6 orang. Namun jika dilihat dari peranannya dari lima narasumber perempuan ini sudah cukup mewakili, karena masing-masing merupakan pengurus

koperasi Anggur Merah dan anggota penerima dana program Anggur Merah yang aktif dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program Anggur Merah.

2. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur

Tabel III.3
Data Narasumber Berdasarkan Umur

No	Usia Narasumber (Tahun)	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	20 – 30	3	20
2	31 – 40	1	6,67
3	41 – 50	4	26.66
4	51 – 60	6	40
5	61 – 70	1	6,67
Jumlah		15	100

Sumber Data : Data Primer

Dari tabel di atas tentang usia narasumber menunjukkan bahwa, terdapat 3 orang narasumber berusia 20 – 30 tahun dengan presentase sebesar 20%,

dan 1 orang narasumber lainnya berusia sekitar 31 – 40 tahun dengan presentase sebesar 6,67%. 4 orang narasumber berusia 41 – 50 tahun dengan persentase sebesar 26,66%. Yang paling banyak adalah narasumber berusia 51 – 60 tahun yaitu 6 orang dengan persentase sebesar 40%. Dan juga ada narasumber yang berusia antara 61 – 70 tahun yaitu 1 orang dengan presentase sebesar 6,67%.

Dalam penelitian ini, usia dari narasumber bervariasi karena peneliti memfokuskan pada status atau jabatan di dalam program Anggur Merah yang akan mewakili tentang implementasi Anggur Merah dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bowali.

3. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan / Jabatan

Tabel III.4

Data Narasumber Berdasarkan Pekerjaan / Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	6,67
2	Pengurus Koperasi	3	20
3	Pendamping Kelompok	1	6,67

	Masyarakat		
4	Petani (Anggota Koperasi Anggur Merah)	5	33,33
5	Pedagang (Anggota Koperasi Anggur Merah)	5	33,33
Jumlah		15	100

Sumber Data : Data Primer

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi narasumber adalah pengurus koperasi Anggur Merah dan masyarakat atau anggota koperasi Anggur Merah yang terdiri dari petani dan pedagang yang terlibat langsung di dalam program Anggur Merah. Narasumber tersebut memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi dalam mendukung ketajaman analisa. Narasumber di atas mempunyai karakter dan pandangan yang beragam.

4. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Tabel III.5

Data Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	9	60
2	SLTA	4	26.66
4	S1	2	13,34
Jumlah		15	100

Sumber Data : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi adalah S1 yaitu 13,34% dan tingkat pendidikan terendah adalah sekolah dasar (SD) yaitu 60%. Pendidikan masyarakat di Desa Bowali masih sangat kurang karena sebagian besar masyarakatnya hanya tamatan SD. Keadaan narasumber berdasarkan tingkat pendidikan perlu dijelaskan untuk mengetahui pola pikir yang digunakan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Selain itu tingkat pendidikan yang memadai juga mempermudah narasumber memahami tentang pelaksanaan program Anggur Merah.

B. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Proses analisis dan mendeskripsikan realitas Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” di Desa Bowali Kabupaten Ngadamenggunakan empat variabel utama yakni komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) serta menganalisis penanggulangan kemiskinan yang merupakan tujuan dari program Anggur Merah ini yang dipandang penulis lebih memadai untuk digunakan dalam menjelaskan fenomena Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah dengan penekanan pada proses implementasi kebijakan. Di samping itu variabel tersebut lebih proporsional dan

konsisten dalam melihat dan memahami proses kompleks dari kegiatan implementasi kebijakan program yang juga didasarkan oleh pertimbangan bahwa konteks implementasi kebijakan tersebut lebih memperhatikan persoalan prosedural implementasi dalam keseluruhan aktivitas implementasi yang ada di dalamnya.

1. Komunikasi

Komunikasi yang intensif diantara para pelaku program akan menjadi jaminan keberhasilan pelaksanaan program. Komunikasi dalam hal ini meliputi tiga aspek penting yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Syarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa sesungguhnya yang harus mereka lakukan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bagaimana komunikasi antara para pelaku program akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program “Anggur Merah”. Paling tidak dengan berfungsinya para pendamping sebagai jembatan komunikasi dua arah akan lebih menjamin berbagai *input* program Anggur Merah akan relevan dengan persoalan, kebutuhan dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk komunikasi yang dilaksanakan di Desa Bowali dalam pelaksanaan program Anggur Merah :

Tabel III.6

Bentuk Komunikasi Program Anggur Merah di Desa Bowali

No	Bentuk-Bentuk Komunikasi	Jumlah
1.	Sosialisasi Program Anggur Merah dari tim Provinsi dan Kabupaten	2 (dua) kali sosialisasi yaitu pada bulan Juli 2014 dan pada bulan November 2014
2.	Pertemuan Bulanan antara Kepala Desa, PKM, pengurus dan anggota koperasi Anggur Merah	Dilaksanakan pada tanggal 1-5 setiap bulan

Sumber Data : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh tim Provinsi dan Kabupaten hanya dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada awal masuknya program Anggur Merah di Desa Bowali pada bulan Juli tahun 2014 dan pada bulan November tahun 2014 dilakukan sosialisasi sekaligus pemeriksaan dari Tim Pemeriksa Provinsi NTT. Sedangkan sepanjang tahun 2015 tidak ada sosialisasi yang dilakukan maupun pemeriksaan program Anggur Merah yang dilakukan oleh tim dari Provinsi maupun Kabupaten. Pada tanggal 1-5 setiap bulan ada pertemuan rutin antara Kepala Desa, Pendamping Kelompok Masyarakat, Pengurus Koperasi, dan Anggota Koperasi. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang masalah yang dihadapi oleh anggota koperasi dan membahas perkembangan program Anggur Merah sekaligus untuk para anggota koperasi untuk membayar simpanan wajib setiap bulannya.

Realitas yang dijumpai peneliti, sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan program “Anggur Merah” dipandang cukup maksimal, indikasinya jelas bahwa pemahaman masyarakat terhadap program sudah cukup baik dan tidak terjadi penyalahgunaan dana program. Hal ini dikarenakan, para pendamping bersama pihak pemerintah Desa yang lebih bersentuhan langsung dengan pelaksanaan program dan memanfaatkan momentum pertemuan-pertemuan baik formal maupun non formal untuk mensosialisasikan program tersebut, hal itu tentu akan sangat mendukung. Masyarakat di Desa Bowali pada umum sudah mengerti dan paham tentang program Anggur Merah ini karena sistem program didasarkan pada sistem koperasi yang mana masyarakat sudah terbiasa dengan koperasi-koperasi sebelumnya dan tidak ada kesalahpahaman dalam mentafsirkan program yang disosialisasikan oleh para pendamping program Anggur Merah tersebut.

Merujuk pada penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa komunikasi dalam kerangka Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” di Desa Bowali sudah dilakukan dengan seefektif mungkin. Hal ini terlihat dari hasil beberapa wawancara peneliti dengan masyarakat penerima dana program yang secara umum mereka sudah mengetahui persis tentang sasaran dari program Anggur Merah.

a. Transmisi

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan program “Anggur Merah” dilakukan melalui proses sosialisasi Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah”, dilaksanakan dengan sistem koordinasi mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai pada masyarakat desa melalui peran dari Kepala Desa dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM). Pendamping kelompok masyarakat menjelaskan bahwa :

“awalnya tim dari bappeda provinsi maupun kabupaten memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada kami selaku pendamping kelompok masyarakat dan selanjut saya selaku PKM yang ditugaskan di desa bowali menemui kepala desa untuk menyampaikan bahwa daerah atau desa yang bersangkutan mendapatkan alokasi dana program anggur merah, setelah itu bersama kepala desa kami mencari waktu untuk mensosialisasikan program ini ke masyarakat, dan saya sendiri mengeluarkan surat yang mengetahui kepala desa untuk masyarakat desa bowali dalam rangka menghadiri sosialisasi anggur merah tersebut. Awal sosialisasi tentunya saya menjelaskan kepada masyarakat apa itu program desa mandiri anggur merah. Untuk desa bowali sendiri merupakan desa yang dampingi saya sendiri. Desa bowali mendapatkan program anggur merah tahun anggaran 2014.

Di desa bowali dengan inisiatif mereka sendiri membentuk koperasi yang bernama koperasi tunas baru, karena dengan banyak pertimbangan salah satunya koperasi yang ada di desa bowali banyak anggota yang dari luar desa dan kemauan kepala desa untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang yang bukan penduduk desa bowali. Hal ini merupakan suatu persyaratan untuk program anggur merah ini bisa

dialokasikan dan dikelola bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Dan dengan koperasi program ini mempunyai alur yang jelas untuk dikelola” (Petrus Martinus Sedu Wea, 21 Februari 2016)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan sosialisasi program bagi para pelaku program di tingkat Kabupaten, selanjutnya Bappeda Kabupaten dengan melibatkan pihak Provinsi yang menghadirkan seluruh para pendamping yang telah lulus dalam keseluruhan tahapan seleksi melakukan sosialisasi program di Desa yang menjadi sasaran program Anggur Merah. Sementara di tingkat desa dengan dukungan pihak kecamatan dan pendamping diharapkan dapat melakukan penyampaian informasi ketingkat yang lebih bawah lagi, yakni masyarakat secara umum. Oleh karenanya koordinasi yang baik antara pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Kecamatan serta pemerintah Desa dalam hal ini sangat penting, sehingga sasaran dan tujuan yang diinginkan dari program dapat tercapai.

Selanjutnya Kepala Desa Bowali menjelaskan bahwa :

“pada waktu itu bersama dengan pendamping kelompok masyarakat dan tim anggur merah dari bappeda provinsi dan kabupaten mensosialisasikan dan menjelaskan bahwa dana anggur merah yang digulirkan dari provinsi itu desa terima kemudian dari itu dialih ke koperasi di sana masyarakat masuk anggota koperasi baru bisa aktif untuk peminjaman. Jadi dana tersebut koperasi yang mengelolanya, pemerintah desa hanya mengawal proses program anggur merah tersebut supaya tidak

ada kemacetan. Sedangkan mekanisme koperasi itu tetap jalan sesuai dengan aturan koperasi Tapi memang program anggur merah ini yang kami dapat informasinya itu memang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin” (Fransiskus Ana Meo, 12 Januari 2016).

Ketua Koperasi juga menjelaskan bahwa:

“tim bappeda provinsi dan kabupaten memberikan sosialisasi pada bulan juli 2014 dan menjelaskan bahwa program anggur merah ini untuk memberdayakan ekonomi rakyat lewat koperasi dan memang wajib berwadhakan koperasi. Maka dari itu kami membentuk koperasi yang baru dan khusus untuk anggur merah ini yang bernama koperasi Tunas Baru.

Pada saat sosialisasi di minta agar dana anggur merah ini dilimpahkan ke salah koperasi yang ada di desa bowali karena persyaratannya dana yang digulirkan ke masyarakat ini harus lewat koperasi. Koperasi di desa bowali ini ada dua yaitu koperasi ma’e rebho dan koperasi sobo karo. Tapi kami pemerintah desa ini tidak mau dan membentuk koperasi yang baru yaitu koperasi Tunas Baru dengan alasannya keanggotaan dua koperasi tersebut ada yang dari luar desa bahkan luar kecamatan. Maka dari itu kami mau anggota koperasi anggur merah ini adalah murni masyarakat desa bowali sendiri dan pengurus koperasinya ada masyarakat bowali sendiri tanpa campur tangan orang luar. Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan kemampuan dan kreativitas masyarakat bowali. Ada rapat anggota bersama dengan kepala desa dan masyarakat yaitu untuk menentukan besaran jumlah bunga dari setiap anggota yang meminjam yaitu 0,5% dari Rp.5.000.000 yaitu Rp.300.000 dengan jumlah anggota koperasi semuanya berjumlah 50 orang berarti bunganya seluruhnya menjadi Rp.15.000.000. Dari Rp.15.000.000 dibagi menjadi 70% untuk koperasi dan 30% untuk pendapatan desa. Ada juga besaran simpanan pokoknya 50 ribu, simpanan wajib setiap bulannya 10 ribu, uang solidaritas kedukaannya 5 ribu dan uang buku anggotanya 15 ribu. Masyarakat desa sangat terbantu karena mengembangkan ekonomi mereka.yaitu ada dua bagian yang mereka terima dengan dana sebesar 5 juta yaitu untuk penggemukan sapi dan

usaha dagang. Dari pengurus dan pemerintah desa mengverifikasi masyarakat yang akan menerima dan anggur merah untuk penggemukan sapi yaitu sudah harus siap lahan dan pakan, pakan tersebut berupa rumputan kinggres dan pisang. Sedangkan mama lele (usaha dagang sembako) hanya membeli bahan sembako untuk dijual ke pasar Inpres Bajawa.”(Mateus Anu, 12 Januari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa program Anggur Merah harus berwadhakan koperasi. Dan mekanismenya mengikuti mekanisme koperasi. Pemerintah Desa hanya mengawal, mengawasi, dan mengontrol pelaksanaan program tersebut agar tidak terjadi kemacetan dan penyalahgunaan program.

Berdasarkan data dokumentasi pengelolaan dan penyaluran Bantuan Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah diatur sebagai berikut:

- Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/Kelurahan bersama Masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/Kelurahan.
- Jika di Desa/Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
- PKM ditunjuk sebagai Manajer atau pengelola koperasi dengan tugas yaitu melaksanakan usaha koperasi, mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi kepada pengurus, memberikan pelayanan usaha kepada anggota, membuat

studi kelayakan usaha koperasi, membuat laporan perkembangan usaha koperasi.

- Koperasi yang sudah terbentuk dan/ataubditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Provinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi, mengetahui kepala desa/lurah.
- Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan.
- Proposal dan syarat-syarat administratif diverifikasi oleh tim verifikasi provinsi.
- Hasil verifikasi Tim Verifikasi Provinsi berupa rekomendasi kepada Gubernur.
- Setelah dilakukan verifikasi, proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan.
- Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan naskah hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/Lurah.
- Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT.
- Bantuan Hibah Program yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi ke rekening Desa/Kelurahan adalah sebesar Rp.250.000.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Kepala Desa/Lurah menyalurkan dana dari rekening Desa/Kelurahan ke rekening Koperasi dalam bentuk pinjaman Desa/Kelurahan atau Modal Penyertaan dari Desa/Kelurahan.
- Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari Desa/Kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada Anggota Koperasi sebagai Pinjaman.
- Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi.
- Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukan untuk konsumsi.
- Besaran bunga pinjaman anggota ditetapkan dalam rapat anggota.
- Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- Mekanisme penyaluran dana dari koperasi kepada anggota wajib melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan usaha anggota, jaminan dalam bentuk barang bilamana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang.
- Pengurus Koperasi bersama pemerintah Desa/Kelurahan dan PKM memantau perkembangan usaha anggota koperasi.

- Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke Koperasi.
- Koperasi akan melakukan perguliran ke anggota Koperasi yang lain. (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014)

Selanjutnya menjelaskan bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewajiban:

- Mengendalikan teknis pengelolaan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam kelompok usaha bersama;
- Mengendalikan pemanfaatan dana bantuan operasional Desa yang dialokasikan melalui APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota secara efisien dan efektif;
- Untuk mencegah kegagalan pembangunan yang diakibatkan oleh lemahnya pengendalian pembangunan maka Pemerintah Desa bertugas sebagai pengendalian terhadap pembangunan;
- Mengawasi kinerja Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) serta Kelompok Masyarakat (Pokmas). (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014).

b. Kejelasan

Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi

tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa Bowali:

“sosialisasi awal belum terlalu jelas, dari penjelasan mereka belum bisa dimengerti. Dari penyampaian awal yang ditangkap belum sempurna. Yang membuat saya bingung adalah mekanisme penyaluran uang atau dana tersebut. Saya kira dana tersebut diberikan ke desa dan langsung diberikan kepada masyarakat miskin yang sudah lolos seleksi tapi setelah diberikan penjelasan secara personal oleh pendamping kelompok masyarakat baru saya mengerti bahwa dana tersebut memang hibahnya untuk desa tapi proses pelaksanaan program tersebut harus membentuk koperasi karena program tersebut berwadahkan koperasi agar alurnya jelas.

Saya rasa tidak ada masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini, artinya masyarakat di desa bowali ini sangat setuju dengan masuknya program anggur merah ini karena masyarakat sangat terbantu berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi mereka. Apalagi kemarin mereka tidak mempunyai uang untuk modal usaha tapi dengan adanya dana ini bisa menambah modal mereka dan masyarakat bisa mengelola sendiri dana yang mereka untuk kebutuhan mereka.

”(Fransiskus Ana Meo, 12 Januari 2016).

Anggota koperasi Pokmas Melati juga menyampaikan hal yang serupa:

“pada saat itu kami masyarakat miskin diundang ke kantor desa, bilangny ada sosialisasi berkaitan dengan dana yang dihibahkan ke desa yaitu dan anggur merah. Dan penjelasan mereka pada saat itu kurang dimengerti dan membingungkan karena bilangny dana itu dihibahkan ke desa kenapa harus membentuk koperasi, kenapa tidak dibagikan langsung ke masyarakat. Tapi untungnya kami masyarakat di sini sudah

terbiasa dengan koperasi yang ada di desa maupun di kabupaten, jadi kalau mengenai koperasi kami sudah paham mengenai peraturannya. Kami merasa senang karena program tersebut membantu kami untuk modal usaha”(Theresia Bhebhe, 14 Januari 2016).

Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) juga menjelaskan:

“pada sosialisasi bersama tim dari provinsi dan kabupaten ada beberapa penjelasan yang saya rasa masyarakat merasa kurang paham yaitu mengenai penyaluran uang atau dana anggur merah ini, tapi setelah program ini berjalan masyarakat sudah mulai paham bagaimana alur program ini”(Petrus Martinus Sedu Wea, 21 Februari 2016)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan adanya ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan oleh tim pengelola program Anggur Merah dari Provinsi dan Kabupaten berkenaan dengan program Anggur Merah yang akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Dana program ini merupakan hibah murni ke desa yang jumlah kepala keluarga miskin terbanyak, dan program anggur merah harus berwadahkan koperasi sehingga dana yang dialokasikan ke desa dialihkan lagi ke koperasi sehingga koperasi yang mengelola dana tersebut. Dapat dilihat juga partisipasi masyarakat miskin yang antusias dengan program Anggur Merah ini karena membantu mereka dalam menambah modal usaha.

c. Konsistensi.

Implementasi kebijakan berlangsung efektif apabila perintah-perintah pelaksanaan tersebut konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Adanya konsistensi kebijakan, jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) menjelaskan bahwa:

“di desa bowali sendiri tidak ada peraturan-peraturan program anggur merah yang berubah-ubah karena mengikuti petunjuk teknis yang sudah ada dan tidak ada instruksi yang keluar dari jalur. Semuanya jelas dan sudah diatur dalam Peraturan Gubernur NTT nomor 4 tahun 2014”(Petrus Martinus Sedu Wea, 21 Februari 2016).

Disampaikan pula oleh Bendahara Koperasi:

“dari awal program ini berjalan sampai saat ini tidak ada peraturan-peraturan program anggur merah yang berubah. Semuanya ikut alur koperasi dan besar bunga dan juga besar simpanan juga sudah ditentukan dalam rapat anggota sampai saat ini masih tetap sama tidak ada yang berubah-ubah”(Koryati Ana Delima, 14 Januari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa peraturan program Anggur Merah tidak berubah-ubah dan tetap konsisten sampai saat ini programnya berjalan seperti biasanya. Hal tersebut tentunya tidak akan membuat kebingungan bagi pelaksana program Anggur

Merah ini dan juga mempermudah bagi pelaksana program menjalankan fungsinya secara baik.

Merujuk pada semua penjelasan tentang komunikasi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa komunikasi dalam kerangka Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” di Desa Bowali cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dan para pelaksana program Anggur Merah di Desa Bowali pada umumnya mengerti dan paham dengan alur program tersebut meskipun di awal penjelasan mereka mengalami kebingungan. Dan juga karena program Anggur Merah ini berwadahkan koperasi maka mempermudah masyarakat dan pelaksana program dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan koperasi yang ada di Desa maupun di Kabupaten. Dalam perjalanannya program ini tidak mengalami perubahan atau tidak konsistensi semuanya sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 dan petunjuk teknis yang ada.

2. Sumber-Sumber

Sumber daya merupakan aspek penting bagi implementasi program pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di atas kertas mungkin hanya menjadi rencana belaka yang tidak ada realisasinya. Sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif meliputi jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai

serta dengan jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas. Disamping itu, perlu pula memperhatikan aspek sumberdaya finansial, sumberdaya waktu dan dengan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program, akan sangat memungkinkan program dapat terlaksana sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Berikut ini adalah sumber-sumber yang ada di Desa Bowali dalam pelaksanaan program Anggur Merah :

Tabel III.7

Sumber Daya dalam Program Anggur Merah

No	Sumber-Sumber	Jumlah
1	Sumber Daya Manusia	
	➤ Pendidikan	
	• Kepala Desa	SLTA (1 orang)
	• Pendamping Kelompok Masyarakat	S-1 (1 orang)
	• Ketua Koperasi	SD (1 orang)
	• Sekretaris Koperasi	D-3 (1 orang)
	• Bendahara Koperasi	SLTA (1 orang)
	• Anggota Pokmas Melati	SD (5 orang)
	• Anggota Pokmas Gote-Gore	SD (4 orang) dan SLTA (1 orang)

2.	Sumber Daya Finansial ➤ APBD Provinsi NTT	Rp.250.000.000
3	Sumber Daya Alam ➤ Dengan kondisi alam di Desa Bowali, cocok untuk penggemukkan sapi yaitu lahan dan pakan untuk sapi	- Rumput-rumputan - kinggres - pisang

Sumber Data : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sumber daya untuk pelaksanaan program Anggur Merah khususnya sumber daya manusia masih sangat minim dilihat dari tingkat pendidikannya. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan program Anggur Merah yang dapat mengakibatkan kegagalan yang dikarenakan belum ada pelatihan-pelatihan yang diberikan dari tim Anggur Merah Provinsi maupun Kabupaten kepada pelaksana program di Desa Bowali. Dalam sumberdaya finansial, Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana sebesar 250 juta kepada Pemerintah Desa Bowali dan sudah membawa dampak yang baik bagi masyarakat miskin di desa Bowali. Desa Bowali merupakan Desa yang cocok dalam penggemukan sapi karena didukung dengan kondisi alam yang memungkinkan sapi tersebut akan tumbuh sehat dan terjual di pasaran.

a. Staf

Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun di sisi yang lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Bowali:

“Berkaitan dengan sumber daya manusia yang saya bandingkan dengan koperasi yang ada di tingkat kabupaten misalnya koperasi Sangosai itu orang-orang yang bekerja di dalamnya mempunyai sumber daya yang cukup paling tidak pendidikannya sarjana tapi kami di koperasi anggur merah di desa bowali ini saya jujur pendidikannya sangat kurang misalnya ketua koperasi pendidikan terkahirnya hanya SD hanya dia sudah mempunyai pengalaman memimpin koperasi lain di desa Bowali ini misalnya koperasi Ma’e Rebho. Dia hanya bermodal pengalamannya. Dari sisi administrasi koperasi anggur merah ini akan dibenahi terus. Anggur merah itu jelas programnya tapi dari sisi sumber daya manusianya masih sangat minim. Tapi bagi masyarakat yang menerima dana tersebut mereka sudah siap karena mereka sudah biasa dengan koperasi-koperasi sebelumnya yang ada di desa maupun yang ada di kabupaten dan buktinya sampai saat ini tidak ada kendala apapun mengenai pengembalian modal pada saat jatuh tempo pengembalian dana anggur merah” (Fransiskus Ana Meo, 12 Februari 2016).

Ketua Koperasi juga menjelaskan:

“memang saya akui bahwa pendidikan kami para pengurus koperasi masih sangat rendah. Saya saja hanya tamatan SD, sebagai ketua koperasi tentunya pendidikan tersebut sangat kurang sekali. Hanya sekretaris dan PKM yang mempunyai pendidikan

tinggi. Saya dipilih menjadi ketua koperasi oleh masyarakat karena pengalaman saya memimpin koperasi yang ada di desa ini. Seiring berjalannya waktu kami akan membenahi secara terus menerus koperasi ini. Koperasi ini baru dibentuk bersamaan dengan masuknya program anggur merah maka dari itu membutuhkan waktu untuk membuat koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Tapi sampai saat ini tidak ada masalah apapun yang ada semuanya berjalan lancar” (Mateus Anu, 12 Februari 2014).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan kemampuan sumber daya manusia para pengurus koperasi yakni berkaitan dengan pendidikan masih sangat minim. Para pengurus hanya berdasarkan pengalaman berkecimpung dalam koperasi-koperasi sebelumnya. Perintah-perintah implementasi program Anggur Merah mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif.

Mengenai sumber daya finansial, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan dana hibah murni sebesar Rp.250.000.000 kepada Desa Bowali yang diambil dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dana tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Desa:

“dana yang diterima dari provinsi sebesar 250 juta rupiah yang merupakan dana hibah murni dari pemerintah provinsi dialokasikan ke desa. Dengan dana tersebut saya rasa bisa mengembangkan

ekonomi masyarakat di desa bowali ini” (Fransiskus Ana Meo, 12 Februari 2016)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan adanya peluang besar untuk desa mengembangkan potensi desa dan membawa dampak yang bagi untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Bowali.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berlangsungnya pelaksanaan program Anggur Merah ini membutuhkan kemampuan seseorang dalam mengatasi dan memberikan jalan keluar yang baik agar permasalahan tersebut tidak membuat program Anggur Merah mengalami kegagalan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Koperasi:

“Dalam suatu organisasi pasti mempunyai masalah, jika ada masalah yang terjadi maka kami melakukan pendekatan dan menghimbau bilamana ada pertemuan di kantor dan membahas masalah tersebut sehingga masyarakat yang bermasalah tersebut bisa sadar dan bisa membayar simpanan wajib setiap bulannya dan bisa tepat waktu dalam pengembalian modal tersebut. Bila mana anggota koperasi anggur merah mandet atau tidak membayar uang simpanan wajib dan tidak mengembalikan modal beserta modalnya maka akan dibicarakan secara kekeluargaan di desa bersama Pendamping kelompok masyarakat program anggur merah dan apabila tetap melawan maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Apabila pemerintah desa tidak bisa mengatasi maka akan desa menghubungi Polisi dan TNI untuk proses lebih lanjut karena Polisi dan TNI juga turut serta mengawasi dan menjaga program anggur merah ini berjalan dengan lebih baik. Tapi selama proses program ini berjalan tidak ada masalah apapun yang ada di desa bowali”(Theofilus Nono, 29 Januari 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut di atas menunjukkan ada sikap yang tegas dari para pelaksana program Anggur Merah yaitu dengan

menggunakan pendekatan dan himbauan kepada masyarakat penerima program dan Polisi serta TNI juga turut serta dalam mengawasi program Anggur Merah. Hal tersebut terdapat dalam dokumentasi peneliti yaitu Kesepakatan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Komando Resort Militer 161/Wirasakti. Nomor : Hk. 1260 Tahun 2013, Nomor : 2299/Xii/2013 Nomor : B/1541/Xii/2013 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Di Desa/Kelurahan Se Provinsi Nusa Tenggara Timur.(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2013).

Menjelaskan bahwa Maksud dari kesepakatan kerjasama ini adalah meningkatkan koordinasi dalam rangka membantu sosialisasi, pendampingan dan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa/Kelurahan se Provinsi NTT. Tujuan dari kesepakatan kerjasama ini adalah agar tercipta perikatan secara yuridis formal dengan maksud untuk meningkatkan koordinasi dan peran para pihak dalam rangka sosialisasi, pendampingan dan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa/Kelurahan se Provinsi NTT.

Segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam hubungannya dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak dan apabila tidak dicapai kesepakatan, maka

para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kupang. Dengan adanya pendamping dan pengawasan program dari Pendamping Kelompok Masyarakat dan juga Polisi serta TNI akan membuat program Anggur Merah berjalan dengan baik dan tidak mengalami kegagalan.

Permasalahan dalam implementasi program Anggur Merah ini juga diakibatkan oleh kondisi alam kondisi pasar yang tidak tentu. Kepala Desa menjelaskan hal tersebut:

”Kendala terjadi pada tahap kedua yang dihadapi adalah penundaan pembagian dana anggur merah ke anggota koperasi anggur merah karena pada bulan agustus sampai dengan desember musim kemarau panjang sehingga pakan untuk ternak sapi itu mengalami kekeringan seperti rumput kinggres dan pisang. Maka dari saya mengambil keputusan dana anggur merah yang seharusnya dibagi pada bulan agustus 2015 ditunda sampai pada tanggal 5 januari 2016. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya apabila dana tersebut di bagi pada bulan kemarau maka sapi yang sudah dibeli tidak mempunyai pakan dan sapi tersebut bisa menjadi kurus bahkan bisa mati maka masyarakat anggur merah tersebut khususnya kelompok penggemukkan sapi bisa mengalami kerugian dan bisa menambah beban bagi mereka, mau tidak mau mereka mencari uang 5 juta beserta bunganya dari sumber yang lain agar bisa mengganti dana anggur merah yang mereka terima tersebut di batas akhir pengembalian dana. Berkaitan dengan mama lele (pedagang) permasalahan hanya terjadi pada kondisi pasar yaitu kurang adanya pembeli sehingga pada tahap kedua ada beberapa mama lele (pedagang) yang tidak mendaftar lagi sebagai anggota”(Fransiskus Ana Meo, 12 Februari 2016).

Anggota koperasi Pokmas Gote-Gore juga menyampaikan :

“pada saat mau pembagian dana anggur merah tahap ke dua terjadi penundaan sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 yang seharusnya dan tersebut dibagikan kepada kami pada bulan Agustus 2015. Penundaannya karena pada waktu itu pada bulan Agustus, September, Oktober, dan November tahun 2015 mengalami kekeringan sehingga rumput-rumput kami yang ditanam sebagai pakan sapi mengalami kekeringan. Maka kepala desa membuat keputusan untuk menunda pembagian dana tersebut sampai musim hujan tiba. Saya rasa keputusan dari kepala desa memang betul karena jika dana tersebut dipaksakan untuk dibagi pada saat kemarau maka sapi yang kami beli akan kurus bahkan bisa mati dan kami menjadi tambah beban sehingga harus mencari uang modal tersebut di tempat lain untuk menutup modal anggur merah tadi” (Mau Markus, 28 Januari 2016).

Anggota koperasi Pokmas Melati menyampaikan :

“sebagai pedagang saya menghadapi masalah yaitu semenjak pasar inpes ini dipindah ke Bobou pembeli semakin berkurang dan dagangan saya hampir tidak laku sama sekali. Pernah satu hari hanya laku Rp.1000 karena itupun hanya membeli plastik kresek. Maka pada akhir jatuh tempo saya meminjam dari koperasi lain untuk mengembalikan modal anggur merah tersebut. Maka pada tahap ke dua ini saya tidak lagi mendaftar menjadi anggota” (Elisabeth Moa, 14 Januari 2016)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program Anggur Merah bukan hanya dari faktor sumber daya manusia tapi juga faktor alam yaitu musim kemarau panjang yang terjadi di Desa Bowali, sehingga pelaksanaan program Anggur merah ditunda sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 yang seharusnya bulan Agustus 2015.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa permasalahan yang menghambat adalah faktor pasar yaitu kurangnya pembeli sehingga

pedagang mengalami kerugian. Faktor-faktor tersebut yang menggagalkan perkembangan program Anggur Merah dan juga dapat menambahkan beban bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan suatu program memerlukan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni. Maka para pelaksana program membutuhkan program pelatihan secara intensif yang dilaksanakan oleh para pengelola program atau tim Bappeda Provinsi dan Kabupaten. Dengan adanya pelatihan tersebut akan meningkatkan kemampuan para pelaksana program yang akan berdampak baik pada keberhasilan program Anggur Merah tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bendahara Koperasi, menjelaskan bahwa:

“Sampai saat ini belum ada pelatihan sama sekali bagi kami pengurus koperasi, kami hanya mengandalkan ketua koperasi meskipun dia hanya tamatan SD tapi dia sudah berpengalaman menjadi ketua koperasi di koperasi yang ada di desa bowali ini. Sehingga beliau bisa mengajarkan kami tentang hal-hal yang mengenai koperasi. Dan kami juga didampingi PKM dalam mengelola dana anggur merah tersebut. Secara tidak langsung kami sambil belajar bagaimana menjalankan koperasi ini” (Koryati Ana Delima, 14 Januari 2016).

Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) juga menjelaskan bahwa:

“untuk pengurus koperasi sendiri belum ada pelatihan-pelatihan tersebut mungkin kurang koordinasi dengan Bappeda selaku pengelola program untuk berkomunikasi dengan dinas koperasi untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pengurus. Tapi setelah beberapa kali kami rapat koordinasi mungkin ke depan akan ada pelatihan-pelatihan untuk koperasi yang mengelola dana anggur merah ini.

Kalau untuk PKM sendiri untuk mengelola dana ini melalui koperasi sampai saat ini memang belum ada tapi untuk pelatihan PKM untuk mengidentifikasi masalah, mengatasi masalah, itu sudah diberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Pelatihannya diberi dari provinsi dan kabupaten seperti Bappeda, dinas koperasi, dinas pertanian, dinas peternakan” (Petrus Martinus Sedu Wea, 21 Februari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan kurangnya koordinasi antara pelaksana program dengan pengelola program dalam hal ini para pengurus koperasi dengan Bappeda Kabupaten maupun Provinsi. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan program Anggur Merah jika para pelaksana program tidak mempunyai pelatihan yang cukup. Dan juga hal ini menunjukkan kurangnya komunikasi antara para pengelola program dan pelaksana program, komunikasi hanya terjadi pada saat sosialisasi awal program Anggur Merah ini.

Di Desa Bowali dalam perekrutan pengurus koperasi dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat Desa Bowali sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Bowali:

“dalam perekrutan pengurus koperasi yaitu ketua koperasi dipilih secara langsung oleh masyarakat demikian juga dengan sekretaris dan bendahara. Sempat ada pergantian ketua koperasi, ketua koperasi yang sekarang adalah ketua koperasi yang baru yang saya tunjuk langsung karena kemarin ada pergantian ketua koperasi sedangkan bendahara dan sekretaris masih tetap. Saya tunjuk langsung karena pengalamannya mengurus koperasi ma’e rebho yang ada di desa bowali kalau dalam tingkat pendidikannya masih kurang karena hanya tamatan SD tapi pengalamannya itu yang saya butuhkan setidaknya dia mengerti mekanisme koperasi” (Fransiskus Ana Meo, 12 Januari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan adanya demokrasi yang baik di dalam Pemerintah Desa Bowali yaitu masyarakat sendiri turut serta dalam penentuan pelaksana program Anggur Merah di Desa Bowali. Sebagian besar kemampuan sumber daya manusia masyarakat di Desa Bowali masih sangat minim, maka dari itu masyarakat menunjukan wakilnya dalam pelaksanaan program Anggur Merah yang mempunyai pengalaman di koperasi sebelumnya.

Masyarakat Desa Bowali yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan program Anggur Merah yaitu menjadi anggota koperasi Anggur Merah juga melalui seleksi yang dilakukan oleh Pedamping Kelompok Masyarakat (PKM), pengurus koperasi, dan Kepala Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Bendahara Koperasi:

“Masyarakat yang mau menjadi anggota baru itu mendaftarnya di saya selaku bendahara dan kemudian nama-nama tersebut saya antarkan ke kepala desa kemudian kepala desa yang mengverifikasi bersama dengan pendamping kelompok masyarakat di desa ini apakah pantas atau layak menjadi anggota koperasi anggur merah ini. Persyaratannya adalah masyarakat harus masuk dalam kelompok masyarakat atau pokmas. Pokmas di koperasi Anggur Merah ini ada dua yaitu pokmas melati untuk usaha dagang dan pokmas Gote-Gore untuk penggemukan sapi. Bagi masyarakat yang mau masuk ke dalam pokmas melati atau usaha dagang harus memiliki tempat usaha untuk menjual barang dagangannya tersebut. Dan bagi masyarakat yang mau masuk ke dalam pokmas gote-gore atau penggemukan sapi harus memiliki lahan dan pakan untuk sapi yang mereka pelihara tersebut. Pakannya berupa kinggres dan pisang dan juga rumput-rumputan untuk sapi. Jadi tidak semua masyarakat menerimanya dikarenakan dana tersebut dibagi kepada 50 orang penerima dana. Dan pada tahap berikutnya terdapat pergantian anggota bagi mereka yang belum menerima. Jadi yang belum bisa menjadi

anggota anggur merah bisa mempersiapkan persyaratan tersebut” (Koryati Ana Delima, 14 januari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang ingin menjadi penerima dana program Anggur Merah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal tersebut berdampak bagi keberhasilan program Anggur Merah.

Perekrutan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengendali Tingkat Provinsi dan Kabupaten melalui Bappeda melalui beberapa tahap perekrutan. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) menyampaikan hal tersebut :

“untuk menjadi PKM saya mengikuti seleksi yang diadakan oleh Bappeda Kabupaten yang pertama seleksi administrasi, dan ujian tertulis untuk syarat dari PKM sendiri minimal S1 dari semua jurusan dan batas usia 40 tahun. Jika dinyatakan lulus kami melakukan magang dan pelatihan PKM” (Petrus Martinus Sedu Wea, 21 Februari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan hanya Pendamping Kelompok Masyarakat yang diseleksi khusus oleh Tim Pembina dan Pengendali Tingkat Provinsi dan Kabupaten melalui Bappeda. Hal tersebut membawa dampak yang baik bagi perkembangan program Anggur Merah karena memiliki kemampuan sumber daya manusia yang cukup baik dalam meningkatkan perkembangan program Anggur Merah tersebut. Berdasarkan dokumentasi berikut merupakan mekanisme seleksi Pendamping Kelompok Masyarakat:

- Pendaftaran calon PKM (Pendamping Kelompok Masyarakat) akan dilaksanakan setiap Kabupaten/Kota oleh Tim Pembina dan

Pengendali Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Bappeda Kabupaten/Kota;

- Seleksi terhadap calon PKM akan dilakukan secara bertahap oleh tim Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu seleksi terhadap administrasi dan tertulis;
- Calon PKM yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti test tertulis yang dilaksanakan di tempat pendaftaran masing-masing;
- Bagi calon PKM yang telah lulus test administrasi dan tertulis akan diumumkan Sekretaris Daerah melalui media massa lokal;
- PKM definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Keputusan Gubernur tersebut ditindaklanjuti dengan kontrak kerja tahunan antara Kepala Bappeda Provinsi NTT dengan PKM dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah.
- Calon PKM yang telah lulus seleksi administrasi dan tertulis wajib magang sebagai bentuk pelatihan mandiri pada PKM senior untuk pendampingan masyarakat, kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan partisipatif. Selanjutnya setelah magang dilaksanakan maka para PKM akan mendapatkan pelatihan yang waktunya disesuaikan untuk meningkatkan kompetensinya.(Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014).

b. Informasi.

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang ataukah tidak. Hal tersebut disampaikan oleh Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM):

“iya ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari provinsi tentang bagaimana mengelola program itu kami sebagai PKM wajib pelajari terlebih dahulu sebelum memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga sebelum mendampingi masyarakat. Untuk sementara berjalan lancar baik itu pengurus koperasi, masyarakat penerima program, maupun pengelola program yang ada di Kabupaten tidak melanggar peraturan yang ada dan sampai saat ini belum ada yang melanggar, semoga sampai seterusnya aman-aman saja” (Petrus Martinus Sedu Wea, 21 Februari 2016).

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Koperasi:

“Tidak ada panduan yang berikan dari tim anggur merah provinsi maupun kabupaten, mereka hanya menjelaskan kalau program anggur merah ini harus berwadhakan koperasi dan uangnya nanti masuk ke rekening desa dan dari desa diberikan kepada koperasi untuk selanjutnya

dibagikan kepada masyarakat penerima program anggur ini. Saya sebagai ketua koperasi sampai saat ini tidak ada pengurus yang menyimpang dari peraturan yang ada, semuanya lancar dan aman” (Mateus Anu, 12 Februari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pedoman atau petunjuk dan panduan hanya diberikan ke Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM), sedangkan pada pengurus koperasi hanya diberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program Anggur Merah tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana program tersebut yang tidak sesuai dengan pedoman atau petunjuk teknis program yang ada. Sedangkan berkaitan dengan pelaksana program yang tidak mematuhi peraturan, di koperasi Tunas Baru Anggur Merah sampai saat ini semua pengurusnya mematuhi peraturan yang ada.

c. Wewenang

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Para pelaksana program Anggur merah mempunyai wewenang masing-masing sesuai dengan fungsinya. Agar tercapainya perkembangan program Anggur Merah secara baik dan berhasil, memerlukan sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak menyalahgunakan kewenangannya tersebut. Memberikan sanksi kepada pelaksana program Anggur Merah yang menyalahgunakan

kewenangannya juga diperlukan untuk memberikan efek jera.

Selanjutnya Kepala Desa menjelaskan:

“saya selaku pengawas program Anggur Merah melihat bahwa para pengurus koperasi dan PKM maupun anggota koperasi sampai saat ini tidak menyalahgunakan kewenangan mereka. Dan berdasarkan keputusan bersama dari hasil rapat anggota kami bersepakat bahwa barangsiapa yang melanggar atau menyalahgunakan kewenangan mereka apalagi yang menyalahgunakan uang atau dana program anggur merah tersebut akan dikenai sanksi yaitu pertama mengembalikan dana program tersebut dan kedua semua pelayanan yang ada di Desa tidak akan dilayani serta apabila ada program lain dari pemerintah yang datang orang tersebut tidak boleh menerima. Saya rasa sanksi tersebut akan memberikan efek jera dan mengajarkan mereka untuk bertanggungjawab dalam setiap melaksanakan amanah” (Fransiskus Ana Meo, 12 Februari 2016)

Pendamping Kelompok Masyarakat juga menjelaskan:

“saya sebagai PKM bertanggungjawab ke pengelola program anggur merah yang ada di kabupaten maupun yang ada di provinsi. Apabila saya menyalahgunakan kewenangan maka saya akan mendapat surat teguran dan apabila terulang lagi maka kontrak saya sebagai PKM akan dicabut. Tapi selama kewenangan yang diberikan kepada saya maupun ke pengurus koperasi tidak ada yang menyalahgunakannya”.

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaksana program Anggur Merah yaitu pengurus koperasi dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) sampai saat ini kewenangannya tidak ada yang disalahgunakan. Dan apabila disalahgunakan maka akan dikenai sanksi yang tegas. Apabila ada

salah satu pelaksana program yang kewenangannya disalahgunakan maka program Anggur Merah tersebut akan mengalami kegagalan dan tidak membawa dampak yang bagi masyarakat. Berikut adalah kewenangan Pendamping Kelompok Masyarakat dan sanksi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 yang termuat dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Pendamping Kelompok Masyarakat mempunyai kewenangan dan sanksi sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas dan tinggal di Desa/Kelurahan tempat tugasnya.
- Melakukan identifikasi potensi masalah dan merumuskannya serta membuat rencana kerja di wilayah kerjanya.
- Memfasilitasi proses identifikasi usaha ekonomi produktif masyarakat/kelompok.
- Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat/kelompok dalam menjalankan usaha ekonomi produktif.
- Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha masyarakat/kelompok ekonomi produktif dan mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, laporan triwulan dan laporan akhir tahun sesuai dengan format laporan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, laporan triwulan dan laporan akhir tahun selambat-lambatnya tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya.
 - Menanam segala jenis tanaman produktif tahunan (pisang, hortikultura, dan perkebunan) sejumlah seratus pohon dalam jangka waktu setahun.
 - Bersama Kepala Desa /Lurah membentuk Koperasi tingkat Desa /Kelurahan.(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, 2013).
- ❖ Sanksi kepada Pengurus Koperasi, Pendamping Kelompok Masyarakat, Aparat Desa/Kelurahan dan Anggota Koperasi.
- Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dimaksudkan jika terjadi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran oleh anggota Koperasi, Pengurus Koperasi, Aparat Desa/Kelurahan dan PKM maka yang bersangkutan harus mengembalikan uang tersebut dan dimasukkan dalam kas koperasi.
 - Sanksi Program

Sanksi program dimaksudkan jika terjadi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran oleh suatu anggota Koperasi,

Pengurus Koperasi, Aparat Desa/Kelurahan dan PKM yang ada pada Desa/Kelurahan sasaran, maka untuk yang bersangkutan tidak akan mendapat pinjaman sampai setelah ada penyelesaian atas permasalahan yang dibuat. Khusus bagi PKM maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi program pemutusan hubungan kerja.

➤ Sanksi Hukum

Sanksi hukum dimaksudkan jika terjadi penyimpangan secara sadar terhadap penggunaan anggaran oleh anggota Koperasi, Pengurus Koperasi, Aparat Desa/Kelurahan dan PKM, maka perlu dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan sanksi hukum tersebut, maka setiap kecamatan telah terbentuk Tim Pengendali Program Tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur Kecamatan, Polsek dan Koramil.(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, 2013).

Berdasarkan data dokumentasi di atas menunjukkan bahwa ada sanksi yang tegas terhadap kewenangan yang disalahgunakan terlebih pada penyimpangan penggunaan anggaran maka akan

berurusan dengan Polisi dan Koramil (TNI). Sanksi tersebut berdampak baik pada perkembangan program Anggur Merah ini.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi :

“Dalam sarana dan prasarana ini memang kami di koperasi desa bowali belum ada apa-apa karena koperasi ini juga baru terbentuk dan pengisian administrasinya masih manual dan hanya berdasarkan pengalaman saya memimpin koperasi yang sudah sudah. Dan perlengkapan sarana dan prasarana lainnya seperti ruangan, meja, kursi, lemari penyimpanan berkas-berkas data anggur merah sampai saat ini belum ada dan berkas data anggur merah tersebut disimpan di rumah bendahara dan koperasi. Dan ruangan kerja kami masih gabung dengan ruangan kerja yang ada di desa misalnya ruangan kaur atau ruangan bendahara dan sekretaris desa yang pada waktu itu kosong maka kami menempatnya. Jadi ruangan kerja kami tidak tentu, misalnya hari ini di ruangan kaur, besoknya di ruangan sekretaris atau bendahara” (Mateus Anu, 12 Februari 2016)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa :

“pada saat ini belum ada ruangan atau bangunan khusus untuk koperasi tersebut. Saat ini ruangan koperasi Anggur Merah masih bergabung dengan ruangan kaur atau ruangan lain yang kosong. Koperasi Anggur Merah ini adalah koperasi yang baru jadi membutuhkan waktu agar bisa melengkapi sarana dan prasarana khusus koperasi anggur merah” (Fransiskus Ana Meo, 12 Januari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas dan juga hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Anggur Merah di Desa Bowali masih sangat minim yaitu tidak ada ruangan atau bangunan khusus untuk koperasi, meja, kursi, dan lemari penyimpanan data mengenai Anggur Merah. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya ruangan atau bangunan khusus untuk koperasi. Hal ini akan mengakibatkan pelaksanaan program menjadi terhambat dan data-data yang mengenai koperasi bisa hilang karena belum ada tempat penyimpanannya. Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang keberhasilan implementasi program Anggur Merah

Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” di Desa Bowali melibatkan cukup banyak aktor, mulai dari pejabat pemerintah tingkat provinsi hingga tingkat desa termasuk di dalamnya tokoh masyarakat. Setiap aktor ini tentunya memiliki perannya masing-masing dan antara yang satu dengan lainnya saling bersinergi dalam mencapai sasaran program. Sumberdaya sebagaimana dikemukakan di atas, masih kurang memadai. Sumberdaya manusia dalam hal ini pengurus koperasi

Anggur Merah yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam pengelolaan program belum optimal dan pada umumnya pengetahuan tentang koperasi masih sangat minim.

Dalam sumberdaya finansial, Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana sebesar 250 juta di Desa Bowali dan sudah membawa dampak yang baik bagi masyarakat miskin. Para pelaksana program Anggur Merah di Desa sampai saat tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya kewenangan dan penggunaan anggaran yang disalahgunakan. Meskipun begitu tetap ada sanksi yang tegas dan mempunyai efek jera bagi penyalahgunaan program. Dalam hal fasilitas, di Desa Bowali koperasi Anggur Merah belum mempunyai ruangan sendiri dan sampai saat ini masih menempatkan ruangan di kantor Desa Bowali. Hal ini dikarenakan koperasi Anggur Merah di Desa Bowali baru terbentuk bertepatan dengan masuk program Anggur Merah di Desa Bowali yang merupakan syarat dari pembentukan program Anggur Merah di Desa Bowali.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan

pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

3. Kecenderungan atau Tingkah Laku

Disposisi atau sikap para pelaksana dalam implementasi program “Anggur Merah” merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksanaan program ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi yang paling penting adalah harus pula memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Hal tersebut diungkapkan oleh Bendahara Koperasi:

“Komunikasi yang terjalin dengan masyarakat penerima anggur merah ini berjalan dengan baik karena setiap bulannya pada tanggal 1 sampai dengan 5 diundang ke kantor desa untuk diberi pengarahan dari kepala desa, PKM dan ketua koperasi dan juga untuk memberitahukan perkembangan keuangan mereka yang ada di koperasi sehingga tidak ada tutup-menutupi apalagi mengenai keuangan”(Koryati Ana Delima, 14 Januari 2016)

Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) juga menjelaskan:

“saya selaku PKM sendiri mempunyai tugas untuk mendampingi setiap kelompok yang ada di koperasi Anggur Merah tersebut yaitu Pokmas Melati dan Pokmas Gote-Gore. Jadi selalu ada komunikasi dengan masyarakat tersebut terutama membantu mereka dalam mengatasi masalah mereka. Begitu pun dengan pengurus koperasi kami berkomunikasi terus menerus dalam ha mendiskusikan masalah-

masalah yang ada dan mencari jalan keluar. Dan setiap 6 bulan pengurus koperasi melaporkan keadaan keuangan anggur merah kepada anggota anggur merah atau masyarakat penerima program desa mandiri anggur merah ini dan selanjutnya saya selaku PKM melaporkan laporan keuangan tersebut ke Bappeda provinsi melalui bidang ekonomi Bappeda kabupaten. Jadi saya rasa tidak ada hal yang kami sembunyikan apalagi mengenai dana tersebut secara transparan disampaikan ke masyarakat” (Petrus Martinus Sedu Wea, 21 Februari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa terjalinnya komunikasi yang baik antara pengurus koperasi, Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) dan anggota koperasi. Hubungan komunikasi antara pengelola program Anggur Merah dan pelaksana program Anggur Merah membawa dampak yang baik dalam perkembangan program Anggur Merah di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil observasi yaitu pada tanggal 4 Februari 2016 ada pertemuan pengurus koperasi bersama dengan anggota koperasi pengarahannya yaitu pengarahannya tentang program Anggur Merah tahap ke dua. Hal tersebut menunjukkan adanya komunikasi yang terjalin terus menerus antara pengelola dan pelaksana program yang dapat melancarkan pelaksanaan program Anggur Merah.

Berdasarkan dokumentasi perkembangan program Anggur Merah pada hari Kamis, 6 November 2014 ada pemeriksaan dari Tim Pemeriksa Provinsi NTT sesuai dengan Surat Tugas Gubernur NTT Nomor :IP.709/227/ST/K/2014 tanggal 24 Oktober. Tim Pemeriksa Inspektorat NTT yaitu Meo Martina, Yohanes Don Bosco Bria, ST, dan Philipus Agur. Dari data dokumentasi tersebut menunjukkan adanya

komunikasi yang baik dari Pemerintah Provinsi dalam mengontrol program Anggur Merah ini. Dan menunjukkan adanya transparansi keuangan yang diperiksa tersebut disampaikan kepada masyarakat penerima program Anggur Merah.

Dalam hal akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada program Anggur Merah sangat baik karena semua masyarakat yang terkena dampak program tersebut diundang dalam forum pertemuan dengan masyarakat di Kantor Desa. Hal tersebut akan membuat implementasi Anggur Merah di Desa Bowali berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil observasi saat ini sudah bergulir dana Anggur Merah pada periode yang kedua yaitu dimulai pada tanggal 5 Januari 2016 dan tidak ada masalah apapun. Sapi-sapi sudah dibeli dan dipelihara oleh anggota koperasi Anggur Merah dan sudah diberi cap AMB (Anggur Merah Bowali). Hal tersebut membuktikan bahwa implementasi Anggur Merah di Desa Bowali berjalan dengan lancar karena dukungan dari Kepala Desa sebagai pengontrol dan pengawas serta pengurus koperasi dan pendamping kelompok masyarakat yang bekerja dengan baik serta jujur dalam melaksanakan program Anggur Merah.

4. Struktur Birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa salah satu aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya, yang sering dimaknai sebagai *Standard Operating Procedures* (SOPs). Prosedur-prosedur biasanya dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum yang digunakan dalam organisasi-organisasi (baik publik maupun swasta). Dengan menggunakan SOPs, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOPs juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. Sebagaimana disampaikan oleh Pendamping Kelompok Masyarakat:

“di koperasi Anggur Merah Bowali belum ada prosedur-prosedur operasional standar yang mengatur jalannya koperasi. Tapi di koperasi Anggur Merah ini sudah ada kejelasan dalam pembagian pengurus koperasi yaitu ketua, bendahara, sekretaris dan saya sendiri PKM bersama kepala

desa selaku penasihat” (Petrus Martinus Sedu Wea, 21 Februari 2016).

Selanjutnya juga disampaikan oleh Ketua Koperasi :

“belum ada prosedur standar yang mengatur tentang koperasi ini. Selama ini kami hanya mengikuti pada kebiasaan koperasi telah dijalankan. Koperasi Tunas Baru Anggur Merah ini merupakan koperasi yang baru saja dibentuk. Kami menjalankan koperasi sesuai fungsi kami masing-masing” (Mateus Anu, 12 Februari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa koperasi Anggur Merah di Desa Bowali belum memiliki *Standart Operating Procedures*(SOP) dan koperasi dijalankan mengikuti kebiasaan koperasi yang telah dijalankan dan semua pengurus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya SOP dapat dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan koperasi untuk mencapai keberhasilan.

Berdasarkan data dokumentasi fungsi pengurus koperasi adalah sebagai berikut:

a. Keanggotaan Koperasi

- Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota.
- Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan.

- Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
- Kewajiban Anggota yaitu mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota dan juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
- Hak Anggota yaitu menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau pengurus. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

b. Perangkat Organisasi Koperasi

➤ Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota Berwenang:

- Menetapkan kebijakan umum koperasi;
- Mengubah Anggaran Dasar;
- Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;

- Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-undang.

c. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota

Pengawas bertugas:

- Mengusulkan calon Pengurus;
- Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus;
- Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota

d. Pengurus

Pengurus dipilih dari perseorangan baik anggota maupun non anggota

Pengurus bertugas untuk:

- Mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
- Mendorong dan memajukan usaha Anggota;
- Mengusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
- Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan Rapat Anggota;
- Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

e. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM)

- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kelompok usaha ekonomi masyarakat;

- Melakukan koordinasi bimbingan teknis pelaksanaan pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah;
- Melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Desa Mandiri Anggur Merah. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, 2013)

Dalam suatu organisasi koperasi terdapat pembagian tugas dan fungsi masing-masing pada setiap pengurus. Koordinasi yang dilakukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan atau pencapaian tujuan program. Dengan adanya koordinasi diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpah tindih. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Koperasi :

“kami sudah mempunyai tupoksi atau fungsi masing-masing dan juga saling berkerja sama dan tidak saling melimpahkan tugas begitu saja atau mengharapakan satu orang saja yang bekerja. Dan saling berkoordinasi ketika mendapatkan suatu masalah yang ada dalam koperasi” (Theofilus Nono, 29 Januari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa adanya saling koordinasi dengan semua pengurus Anggur Merah. Namun berdasarkan hasil observasi pada tanggal 14 Januari 2016, belum adanya koordinasi yang baik sesama pengurus koperasi Anggur Merah. Hal ini dibuktikan dengan pada saat melakukan persiapan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sekretaris dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) tidak ada ditempat yang menyebabkan penundaan persiapan

RAT tersebut. Begitu pula pada bulan Februari belum juga adanya kepastian untuk melakukan persiapan RAT. Hal ini membuktikan bahwa pengurus koperasi Anggur Merah di Desa Bowali belum berkoordinasi secara baik sehingga akan menghambat pelaksanaan program Anggur Merah di Desa Bowali.

Struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Di Koperasi Anggur Merah Desa Bowali belum memiliki SOP (*standard operating procedures*) dan belum adanya koordinasi secara baik antara pengurus di dalam koperasi Anggur Merah.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Program Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah di Desa Bowali diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan Desa Bowali. Meningkatkan kapasitas ekonomi Desa Bowali diharapkan dapat mendorong peningkatan pembangunan bidang lainnya di Desa Bowali yaitu diantaranya perluasan dan percepatan pengelolaan potensi yang belum dikelola dan juga peningkatan kinerja

potensi unggulan yang sudah di kelola. Hal tersebut membawa dampak dalam mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat Desa Bowali. Berdasarkan data dokumentasi yaitu pada profil Desa Bowali terdapat 165 Kepala Keluarga adalah keluarga prasejahtera. Hal ini berarti seluruh masyarakat di Desa Bowali masih prasejahtera dan pada umumnya pekerjaan mereka adalah petani. Dengan adanya program Anggur Merah ini membawa dampak yang baik bagi seluruh masyarakat di Desa Bowali.

a. Pengembangan Masyarakat

Program Desa Mandiri Anggur Merah dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap masyarakat penerima dana Anggur Merah misalnya dalam peningkatan akses pelayanansosial yaitu terjaminnya kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di Desa Bowali. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Koperasi Pokmas Gote-Gore :

“secara pribadi saya sangat berterima kasih pada program Anggur Merah ini karena sangat membantu bagi masyarakat desa bowali khususnya saya sendiri untuk mengembangkan ekonomi dan dari hasil tersebut bisa membiayai anak saya yang sedang sekolah” (Hendrikus Lame, 28 Januari 2016).

Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota Koperasi Pokmas Melati :

“dengan adanya program ini bisa menambah modal bagi saya untuk berjualan dan hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah dan juga kebutuhan anak sekolah serta kesehatan kami sekeluarga” (Martina Nau Ria, 14 Januari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa program Anggur Merah dapat membawa dampak yang baik bagi masyarakat di Desa Bowali yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan untuk anak sekolah dan juga terjaminnya kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan data dokumentasi program ini berdampak pada indeks pembangunan manusia (IPM) mencerminkan tiga aspek utama yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan ekonomi pada masyarakat di Desa Bowali dapat terpenuhi. (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014).

Program Desa Mandiri Anggur Merah ini juga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa Bowali. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Kepala Desa :

“iya di Desa Bowali sendiri masyarakat yang menerima program ini dapat meningkatkan kemampuan untuk membudidayakan pakan untuk sapi dan berlomba-lomba untuk merawat sapi agar sehat dan mempunyai harga yang tinggi dipasaran. Bagi Pokmas penggemukan sapi ini sangat cocok dengan lahan dan kondisi alam yang ada di desa bowali dan biasanya sapi yang sudah siap jual sangat layak dijual dilihat dari tubuh sapi yang besar tersebut. Sedangkan bagi pengurus koperasi ini merupakan masyarakat Desa Bowali dan tidak ada pengurus dari luar Desa Bowali. Ini sangat menguntungkan bagi kami masyarakat Bowali karena dengan program ini bisa mengembangkan kemampuan masyarakat dalam berkoperasi” (Fransiskus Ana Meo, 12 Februari 2016).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Anggota Koperasi

Pokmas Gote-Gore :

“Desa Bowali ini sangat cocok dengan memelihara sapi karena kondisi lahan yang cocok untuk menanam pakan untuk sapi” (Nikolaus Gheno, 28 Januari 2016)

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa adanya peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Bowali yang tentunya membawa keuntungan bagi masyarakat di Desa Bowali karena memanfaatkan kekayaan alam mereka sendiri.

Berdasarkan data dokumentasi menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Desa dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kegiatan peningkatan sumber daya manusia yaitu pertama, peningkatan SDM aparatur Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Kedua, peningkatan SDM pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Koperasi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan Desa. Dan ketiga, peningkatan SDM angkatan kerja sesuai dengan basis ekonomi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi produktif sesuai keunggulan Desa. (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014).

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan dengan mengikuti kaidah yang benar yaitu mengikuti suatu siklus kegiatan pemberdayaan melalui tahap-tahap inisiasi, sosialisasi, pemberian program, penguatan kemampuan baik petani sebagai individu maupun kelompoknya. Sebagaimana diungkapkan oleh Pendamping Kelompok Masyarakat :

“partisipasi masyarakat di desa bowali tinggi terhadap program Anggur Merah ini. Pada sosialisasi awal banyak masyarakat yang datang dan secara antusias berminat mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi Anggur Merah dan sekarang sudah masuk tahap dua masih banyak masyarakat yang minat untuk bergabung menjadi anggota koperasi” (Petrus Martinus Sedu Wea, 21 Februari 2016).

Anggota Koperasi Pokmas Gote-Gore juga mneyampaikan hal serupa:

“pada saat sosialisasi kami semua masyarakat datang untuk menghadiri dan kami sangat senang dengan adanya program ini karena sangat membantu perekonomian menjadi lebih baik. (Agustinus Bhaga, 28 Januari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bowali terhadap program Anggur Merah ini sangat tinggi. Masyarakat Desa Bowali turut serta dalam pelaksanaan program Anggur Merah karena program tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Bowali.

Program Desa Mandiri Anggur Merah dalam pengembangan masyarakat di Desa Bowali membawa dampak yang baik bagi usaha penanggulangan kemiskinan yang merupakan tujuan

utama dari program ini. Masyarakat dapat menikmati hasilnya dengan bisa memenuhi kebutuhan sehari-sehari, menambah modal usaha, dan juga dapat membantu dalam membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka serta terjaminnya kesehatan. Potensi alam Desa Bowali sangat cocok untuk pengembangbiakan ternak diantaranya sapi yang merupakan program unggulan di Desa Bowali. Sehingga sapi yang dipelihara tersebut berkembangnya cepat dan menjadi sapi yang sehat dan besar serta mempunyai harga tinggi di pasaran. Hal ini otomatis akan membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang semulanya hanya petani musiman di kebun atau ladang. Begitu pula dengan partisipasi masyarakat yang tinggi serta turut serta dalam pelaksanaan program Anggur Merah ini.

b. Pengembangan Ekonomi

Kegiatan utama melalui alokasi dana sebesar Rp.250.000.000 diarahkan untuk pengembangan ekonomi produktif unggulan yang ada di Desa Bowali yaitu pengembangan komoditas ternak dan usaha dagang untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat diarahkan untuk mengembangkan ekonomi desa dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumber daya lokal (sumber daya alam, manusia, kelembagaan, serta sumber daya fisik) yang dimiliki oleh

Desa Bowali. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Koperasi Pokmas Gote-Gore:

“dengan adanya program ini terbuka kesempatan kerja baru bagi saya yang sebelumnya adalah seorang petani musiman bisa memelihara sapi untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga saya. Kami semua masyarakat di sini tidak ada yang menganggur karena masing-masing mempunyai lahan untuk pertanian sendiri hanya saja dengan adanya program ini bisa menambah uang untuk kehidupan kami” (Yakobus Mau, 28 Januari 2016).

Anggota Koperasi Pokmas Melati menyampaikan :

“saya kan pedagang beras dan jagung jadi dengan adanya dana anggur merah bisa menambahkan modal bagi saya. Saya sangat terbantu oleh program Anggur Merah karena bunganya kecil hanya 0,5%” (Yohana Meo, 14 Januari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa program Anggur Merah memberikan modal usaha dan masyarakat mengembangkannya sesuai dengan kelompok mereka dan sesuai dengan potensi alam yang sangat cocok untuk pakan ternak sapi. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa potensi alam Desa Bowali yang cocok untuk pengembangan sapi.

Dalam pengembangan ekonomi, program Anggur Merah mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat anggota koperasi yaitu dengan memberikan modal usaha dengan bunga yang kecil. Dengan demikian dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bowali melalui Program Desa Mandiri Anggur Merah ini membawa

dampak yang baik bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian mereka.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi sebagai aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program. Komunikasi dalam kerangka Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” di Desa Bowali cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dan para pelaksana program Anggur Merah di Desa Bowali pada umumnya mengerti dan paham dengan alur program tersebut meskipun di awal penjelasan mereka mengalami kebingungan. Dan juga karena program Anggur Merah ini berwadahkan koperasi maka mempermudah masyarakat dan pelaksana program dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan koperasi yang ada di Desa maupun di Kabupaten. Dalam perjalanannya program ini tidak mengalami perubahan atau tidak konsistensi semuanya sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 dan petunjuk teknis yang ada.
2. Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” di Desa Bowali melibatkan cukup banyak aktor, mulai dari pejabat

pemerintah tingkat provinsi hingga tingkat desa termasuk di dalamnya tokoh masyarakat. Setiap aktor ini tentunya memiliki perannya masing-masing dan antara yang satu dengan lainnya saling bersinergi dalam mencapai sasaran program. Sumber daya sebagaimana dikemukakan di atas, masih kurang memadai. Sumberdaya manusia dalam hal ini pengurus koperasi Anggur Merah yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam pengelolaan program belum optimal dan pada umumnya pengetahuan tentang koperasi masih sangat minim. Dalam sumberdaya finansial, Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana sebesar 250 juta di Desa Bowali dan sudah membawa dampak yang baik bagi masyarakat miskin. Para pelaksana program Anggur Merah di Desa sampai saat tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya kewenangan dan penggunaan anggaran yang disalahgunakan. Meskipun begitu tetap ada sanksi yang tegas dan mempunyai efek jera bagi penyalahgunaan program. Dalam hal fasilitas, di Desa Bowali koperasi Anggur Merah belum mempunyai ruangan sendiri dan sampai saat ini masih menempatkan ruangan di kantor Desa Bowali. Hal ini dikarenakan koperasi Anggur Merah di Desa Bowali baru terbentuk bertepatan dengan masuk program Anggur Merah di Desa Bowali yang merupakan syarat dari pembentukan program Anggur Merah di Desa Bowali.

3. Kepala Desa sebagai pengontrol dan pengawas serta pengurus koperasi dan pendamping kelompok masyarakat bekerja dengan baik serta jujur

dalam melaksanakan program Anggur Merah yaitu adanya komunikasi yang terjalin terus menerus antara pengelola dan pelaksana program yang dapat melancarkan pelaksanaan program Anggur Merah, akuntabilitas dan juga transparansi terhadap pengelolaan dana program Anggur Merah.

4. Struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Di Koperasi Anggur Merah Desa Bowali belum memiliki SOP (*standard operating procedures*) dan belum adanya koordinasi secara baik antara pengurus di dalam koperasi Anggur Merah.
5. Dalam pengembangan masyarakat dan pengembangan ekonomi, program Anggur Merah mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat anggota koperasi yaitu masyarakat dapat menikmati hasilnya dengan bisa memenuhi kebutuhan sehari-sehari, menambah modal usaha, dan juga dapat membantu dalam membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka serta terjaminnya kesehatan.. Dengan demikian dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bowali melalui Program

Desa Mandiri Anggur Merah ini membawa dampak yang baik bagi masyarakat miskin di Desa Bowali

Mengacu dari pemikiran di atas, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program “Anggur Merah” di Desa Bowali karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Ketersediaan anggaran yang dialokasikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi produktif cukup memadai;
- b. Tersedianya tenaga pendamping;
- c. Tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program yang optimal.

Ada beberapa hal yang menghambat program Anggur Merah ini adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas dan kuantitas pelaksana program kurang memadai;
- b. Sosialisasi program belum dilaksanakan secara optimal;
- c. Kurang koordinasi antara pelaksana program;
- d. Kurangnya fasilitas dalam program Anggur Merah.

Terhadap kenyataan di atas, tentunya disadari bahwa usaha-usaha untuk mewujudkan kemandirian masyarakat menuju pada upaya peningkatan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan melalui

proses pemberdayaan yang dikemas dalam program “Anggur Merah” tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh pemerintah daerah maupun Desa setempat. Dalam konteks itulah perlu didorong upaya-upaya yang berkaitan dengan proses membangun kerjasama dan kemitraan sinergis antara gerakan kemandirian masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam penanggulangan kemiskinan.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat penulis ajukan sebagai sumbangan pemikiran untuk perbaikan dan keberlanjutan program “Anggur Merah” ke depan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Ngada dan Pemerintah Desa Bowali perlu secara berkala melakukan penguatan kapasitas yaitu memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan koperasi dan pengembangan ekonomi kepada pelaksana program Anggur Merah sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian, terutama kepada Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) dan pengurus koperasi sehingga upaya perwujudan kemandirian masyarakat desa melalui program “Anggur Merah” dapat tercapai sesuai tujuan program.
2. Perlu adanya penyediaan dan peningkatan fasilitas yang memadai dalam penyelenggaraan program Anggur Merah.

3. Perlu meningkatkan komunikasi yaitu dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program baik di tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten sampai pada pemerintah tingkat Desa.
4. Para pendamping dan Pemerintah Desa perlu melakukan pertemuan rutin dalam rangka memberikan penyadaran kritis (pencerahan) secara terus menerus kepada masyarakat bahwa setiap kebijakan atau program dirumuskan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan mereka.
5. Perlu ada koordinasi yang baik antara pengelola program Anggur Merah dan pelaksana program Anggur Merah dan perlu membuat SOP (*standard operating procedures*) dalam koperasi Anggur Merah Bowali untuk penguatan pengawasan dan tidak menimbulkan birokrasi yang rumit dan kompleks dan juga akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi fleksibel.

Daftar Pustaka

- Agnes Sunartiningsih, 2013. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Yogyakarta:Pajar Hatma Indra Jaya
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013
- Buku Pedoman Umum Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Edisi Oktober 2005
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015
- Eko, Sutoro, dkk. 2005. *Pemberdayaan Kaum Marginal*. Yogyakarta : APMD Press
- Himawan Pambudi, 2007.*Jurnal Hukum, Birokrasi, Partisipasi Politik dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Jentera
- Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Bowali Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2014
- Mas'ood, Mohtar. 2003. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moleong, J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mubyarto. 1994. *Politik Pertanian dan Pembangunan Perdesaan* : Sinar Harapan
- Nasution, S. 2007. *Metode Reseach (Penelitian Ilimiah)*. Jakarta: Bumi Askara
- Nugroho Tri, E.W. 2005. *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : APMD Press

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018

Prof. Sediono M.P. Tjondronegoro, 2008. *Negara Agraris Ingkari Agraria
(Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia)*, Bandung :
AKATIGA

Ratnawati, Tri. 2006. *Potret Pemerintahan Lokal Di Indonesia Di Masa
Perubahan (Otonomi Daerah Tahun 2000-2005)*. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar

Saifi'i, H.M. 2011. *Ampih Miskin, Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan
dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta : Averroes Press

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*.
Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodhs)*. Bandung: CV.
Alfabeta

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji
Masalah dan Kebijakan Sosial)*. Bandung : CV Alfabeta

Usman, Husaini dan A.S, Purnomo. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta:
Bumi Askara

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.
Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*)

Widoyoko, S.Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

I. Identitas

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Status/Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan

6. Komunikasi

- d. Transmisi, penyampaian isi dari kebijakan anggur merah kepada pelaksana serta masyarakat dari pengelola dalam implementasi kebijakam program Anggur Merah;
- Bagaimana kejelasan komunikasi atau penyampaian isi program Anggur Merah yang disampaikan pengelola program kepada pelaksana program dan kepada masyarakat dan seperti apa bentuk komunikasi tersebut?
 - Apakah ada sosialisasi mengenai program Anggur Merah yang dilakukan oleh pengelola program Anggur Merah kepada pelaksana program Anggur maupun kepada masyarakat?

e. Kejelasan kapan dan bagaimana kegiatan program Anggur Merah dilaksanakan;

- Apakah seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana menjadi kabur atau tidak jelas dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana program itu dilaksanakan?
- Apakah ada kerumitan dalam memahami isi dari program anggur merah tersebut?
- Apakah ada musyawarah untuk mufakat bersama dengan masyarakat dan sosialisasi tentang tujuan-tujuan program anggur merahdan seberapa sering sosialisasi kepada pelaksana program dan masyarakat mengenai program Anggur Merah tersebut?
- Sebelum program Anggur Merah ini dilaksanakan di masyarakat apakah ada masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan program Anggur Merah tersebut?

f. Konsistensi perintah-perintah pelaksana dalam implementasi kebijakan program Anggur Merah.

- Apakah ada komunikasi yang tidak konsisten atau berubah-ubah yang mengakibatkan salah penafsiran atau kesalahpahaman tentang program Anggur Merah tersebut?

7. Sumber-sumber

e. Ketersediaan sumber daya manusia dalam mengelola serta melaksanakan kebijakan program Anggur Merah;

- Bagaimana kemampuan sumber daya manusia pelaksana program Anggur Merah dalam melaksanakan tugas yang diberikan?
 - Bagaimana pendidikan pelaksana program dan berapa jumlah pelaksana program Anggur Merah tersebut?
 - Bagaimana kecakapan pelaksana kebijakan dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pengimplementasian program Anggur Merah?
 - Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk pelaksana program Anggur Merah untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan program tersebut?
 - Bagaimana bentuk perekrutan pelaksana program dan apakah ada persyaratan dan kriteria khusus untuk pelaksana program tersebut?
- f. Informasi mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan serta informasi ketaatan personil lain terhadap peraturan pelaksanaan kebijakan program Anggur Merah;
- Apakah ada petunjuk atau pedoman dan panduan kepada pelaksana program mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya?
 - Apakah selama pelaksanaan program Anggur Merah ini berlangsung terdapat pelaksana program yang tidak taat atau tidak mematuhi dan menyimpang dari peraturan-peraturan pelaksanaan kebijakan program Anggur Merah?
- g. Kewenangan dalam melaksanakan kebijakan program Anggur Merah;

- Apakah ada kewenangan yang disalahgunakan oleh pelaksana program yang menghambat pelaksanaan program Anggur Merah?
- Apakah ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaksana program bila kewenangan mereka disalahgunakan?

h. Fasilitas yang bersifat fisik dalam implementasi program Anggur Merah.

- Seperti apa dukungan sarana dan prasarana lainnya yang ada di Desa Bowali yang mendukung berjalannya program Anggur Merah?
- Apakah fasilitas yang diberikan sudah memenuhi untuk berjalannya program Anggur Merah tersebut?
- Bagaimana para pelaksana program mendapatkan fasilitas dan perlengkapan yang mereka butuhkan untuk pelaksanaan program Anggur Merah tersebut?

8. Kecenderungan atau tingkah laku

Dukungan para personil dalam melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dalam implementasi program Anggur Merah.

- Bagaimana hubungan komunikasi yang terjalin antara pelaksana program dengan masyarakat?

- Apakah program anggur merah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan?

9. Struktur birokrasi

Bentuk organisasi serta prosedur dasar (SOP) dalam melaksanakan kebijakan program Anggur Merah.

- Seperti apa mekanisme atau cara kerja struktur organisasi program Anggur Merah di Desa Bowali?
- Siapa-siapa saja yang termasuk di dalam struktur organisasi tersebut?
- Apakah sudah ada prosedur dasar yang digunakan untuk melaksanakan program Anggur Merah tersebut?
- Dalam struktur organisasi seperti apa pembagian tugas dan fungsi masing-masing pelaksana program Anggur Merah?
- Dalam pembagian tugas tersebut apakah ada permasalahan yang terjadi seperti ada yang kerja dan ada yang tidak atau masing-masing orang tidak menjalankan tugas dan fungsinya atau ada dominasi salah satu pihak?
- Bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam struktur organisasi berkaitan dengan program Anggur Merah?

10. Penanggulangan kemiskinan

c. Pengembangan Masyarakat

- Peningkatan akses pelayanan sosial.
 - Apakah dengan adanya program Anggur Merah ini sudah mampu meningkatkan terjaminnya kesehatan dan pendidikan?
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - Apakah dengan adanya program Anggur Merah ini dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja?
 - Apakah dengan adanya program Anggur Merah ini dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing di masyarakat dalam berwirausaha?
- Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam.
 - Apakah dengan adanya program Anggur Merah ini ketersediaan potensi setempat sumber daya alam yang ada di sekitar Desa dapat dimanfaatkan dan kecocokan kegiatan sesuai kebutuhan?
- Partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan.
 - Bagaimana partisipasi masyarakat miskin yang ada di Desa Bowali terhadap program Anggur Merah?

d. Pengembangan ekonomi

- Pengembangan peluang usaha.
 - Apakah dengan adanya program Anggur Merah ini peluang usaha yang ada dapat dikembangkan menjadi lebih baik?

- Terbukanya kesempatan kerja.
 - Apakah dengan adanya program Anggur Merah ini membawa dampak yang baik bagi masyarakat miskin dan pengangguran yang ada sehingga dapat bekerja dan berpenghasilan?

Pedagang Beras, Jagung dan kacang-kacangan (Anggota Koperasi Pokmas Melati)



Pertemuan bulanan Koperasi Tunas Baru Anggur Merah Di Kantor Desa Bowali



Pakan atau makanan ternak sapi



Sapi program AnggurMerahBowaliPokmasGote-Gore





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2014**

TENTANG

SISTEM PEMBANGUNAN TERPADU DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR
MERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan kebijakan pembangunan daerah berbasis desa/kelurahan melalui pembangunan terpadu desa/kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2014-2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3633);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4678);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 070);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN TERPADU DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH TAHUN 2014-2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Desa adalah Desa yang berada di Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di Daerah Kabupaten/Kota.
4. Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah adalah kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan potensi dan karakteristik pengembangan ekonomi rakyat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa/kelurahan untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
6. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten atau kota dan/atau desa/kelurahan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota dan/atau Desa.
7. 8 (depalan) Agenda adalah prioritas Pembangunan Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2018 meliputi Agenda Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan, Agenda Pembangunan Kesehatan, Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata, Agenda Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah, Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Agenda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agenda Pembangunan Kelautan dan Perikanan serta Agenda Khusus: Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan Bencana, dan Pembangunan Daerah Perbatasan.
8. 6 (Enam) Tekad Pembangunan adalah tekad pemerintah menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Cendana, Provinsi Koperasi, NTT sebagai Destinasi Pariwisata Dunia dan sebagai Provinsi kepulauan berbasis Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa/kelurahan serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam penyelenggaraan pembangunan terpadu Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2014-2018.

- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah terlaksananya (8) delapan Agenda pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan 6 (enam) Tekad pembangunan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pembangunan terpadu desa/kelurahan mandiri anggur merah dilakukan dengan penugasan dan/atau penyerahan sebagian urusan pemerintah provinsi kepada pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan terpadu desa/kelurahan mandiri anggur merah disinergikan dengan program dan kegiatan lain yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta program dan kegiatan yang ada pada Kementerian/Lembaga, Lembaga-lembaga internasional serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pertanggungjawaban dana, monitoring evaluasi dan pelaporan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan.

Pasal 5

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan lebih lanjut dalam SISTEM PEMBANGUNAN TERPADU DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH TAHUN 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan sistematika sebagai berikut:

- a. PENDAHULUAN;
- b. KARAKTERISTIK WILAYAH;
- c. PERENCANAAN 2014-2018;
- d. PELAKSANA PROGRAM;
- e. KERANGKA PENGELOLAAN DANA;
- f. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
- g. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN;
- h. PENUTUP.

BAB III PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggung jawab serta taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Penghargaan merupakan wujud pengakuan atas capaian prestasi dan kinerja yang menunjukkan peningkatan atas suatu pekerjaan yang telah dihasilkan secara berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada:
 - a. Kelompok yang mencapai prestasi tertinggi dalam mencapai target penurunan KK miskin dan usaha produktif mencapai hasil optimal;
 - b. Pendamping Kelompok Masyarakat dan Kelembagaan pembinaan yang bertanggungjawab atas kelompok terbaik.
- (3) Bentuk penghargaan dan mekanisme penilaian akan diatur tersendiri dan penghargaan akan diserahkan pada setiap tanggal 20 Desember tahun berjalan bertepatan dengan hari ulang tahun NTT.

Pasal 8

- (1) Sanksi merupakan bentuk pembinaan atas capaian prestasi dan kinerja yang tidak mencapai target berupa Sanksi Administrasi, Sanksi Program dan Sanksi Hukum.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi penyimpangan anggaran oleh anggota kelompok, pengurus kelompok, aparat desa/kelurahan atau pihak lain, maka yang bersangkutan harus mengembalikan uang tersebut dan dimasukkan dalam kas kelompok dan/atau rekening desa/kelurahan.
- (3) Sanksi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran yang ada pada desa/kelurahan sasaran, maka untuk tahun berikutnya desa/kelurahan tersebut baru akan mendapatkan bantuan program pemberdayaan lain setelah ada penyelesaian atas permasalahan yang buat.
- (4) Sanksi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi penyimpangan secara sadar terhadap penggunaan anggaran oleh pihak tertentu, maka perlu dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2013 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 036) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Januari 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
FRANSISKUS SALEM



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJPD 2005-2025 dan tahun kedua pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030. Untuk mengoptimalkan kedua kebijakan pembangunan daerah tersebut maka telah ditetapkan lima strategi pokok pembangunan daerah yaitu: kemitraan, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan keterpaduan sektor.

Berdasarkan strategi pokok tersebut selanjutnya ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang menjadi landasan seluruh program dan kegiatan pembangunan. Secara umum penjabaran strategi pokok pembangunan dalam arah kebijakan pembangunan dilakukan melalui; (i) peningkatan investasi pembangunan diwujudkan melalui penggalan sumber dana, peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hasil pembangunan; (ii) Optimalisasi Pelaksanaan 6 Tekad Pembangunan, (iii) Peningkatan dan Percepatan kegiatan utama Pembangunan yaitu Sumber Daya Manusia, Ekonomi kerakyatan, Konektivitas Wilayah, Perumahan dan air bersih, Kelistrikan, tata kelola pemerintahan, Pelayanan Publik berbasis desa/kelurahan

Penjabaran strategi pemberdayaan untuk mewujudkan anggaran pembangunan yang lebih besar berpihak pada kepentingan rakyat (belanja publik) dari belanja pemerintah (belanja aparatur) dengan penerapan penganggaran program/kegiatan lebih pro-rakyat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Program Desa Mandiri Anggur Merah sebagai program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan menyeluruh memiliki posisi sangat strategis karena perannya sebagai berikut; (1) Mendukung pelaksanaan enam tekad pembangunan yang ditetapkan sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan pendapatan perkapita, menurunkan penduduk kemiskinan yang mencapai 20,03% keadaan Maret 2013, (2) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian; (3) Mendukung pelaksanaan 8 agenda pembangunan; dan (4) Mendukung penyiapan lapangan kerja di pedesaan terutama tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian.

Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah didukung alokasi dana APBD yaitu dana segar (*Fresh money*) Rp. 250 juta untuk ekonomi produktif, Rp.50 juta untuk pembangunan rumah layak huni, pendamping kelompok masyarakat (PKM), operasional pengendalian pembangunan tingkat desa, kelurahan dan unsur tripika yaitu pemerintah kecamatan didukung Polsek dan Koramil diharapkan dapat menciptakan masyarakat desa/kelurahan maju dan produktif. Program Desa Mandiri Anggur Merah disinergikan pelaksanaannya dengan PNPM Mandiri, Program Kementrian/Lembaga, Program Hibah Lembaga Internasional, CSR BUMN dan Replikasi Program Desa Mandiri Anggur Merah melalui APBD Kabupaten/Kota serta partisipasi masyarakat pada Gerakan Pulang Kampung (GPK). Untuk mendukung pembangunan ekonomi pada lokasi program Desa Mandiri Anggur Merah maka melalui kemitraan Bank NTT dan Bank mitra lainnya, akan mendorong kemitraan dengan Koperasi Desa Mandiri Anggur Merah dan Koperasi lainnya.

Optimalisasi strategi pembangunan termasuk suksesnya pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2013-2018 yaitu **“Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Visi tersebut merupakan harapan bersama untuk dapat diwujudkan melalui sinergi investasi pembangunan pemerintah, masyarakat, swasta, asosiasi profesi, kelembagaan agama dan kelembagaan masyarakat. Kebijakan program pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan dilaksanakan melalui kebijakan 8 agenda pembangunan, 6 tekad pembangunan dan Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah.

8 agenda pembangunan pemerintah Provinsi didukung Kementrian/Lembaga dan sinergi dengan Program kabupaten/Kota serta sumber pendanaan lainnya sebagai berikut (i) Agenda Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan, (ii) Agenda Pembangunan Kesehatan, (iii) Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata, (iv) Agenda Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah, (v) Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, (vi) Agenda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (vii) Agenda Pembangunan Perikanan dan Kelautan, dan (viii) Agenda Khusus: Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan Bencana dan Pembangunan Daerah Perbatasan

Dalam upaya peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan mempercepat penurunan kemiskinan maka ditetapkan kebijakan enam tekad pembangunan yang merupakan kelanjutan empat tekad yang dilaksanakan tahun 2009-2013. Selanjutnya untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah berbasis keunggulan wilayah maka pada tahun 2014-2018 dilaksanakan 6 tekad pembangunan yaitu menjadikan NTT sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Koperasi dan Provinsi Cendana serta mewujudkan NTT sebagai destinasi utama pariwisata dunia dan NTT sebagai Provinsi Kepulauan basis perikanan dan kelautan.

Pelaksanaan enam tekad merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah sesuai basisnya yaitu desa pertanian terpadu, desa perikanan dan kelautan terpadu, desa/kelurahan wisata terpadu, Kelurahan jasa terpadu dan desa/kelurahan industri terpadu. Pembangunan potensi ekonomi tersebut untuk mencapai target pembangunan sebagai berikut; (i) Meningkatkan pendapatan perkapita Nusa Tenggara Timur dari rata-rata 35% dari rata-rata nasional menjadi 40-50 % di tahun 2018, (ii) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 5.5 % menjadi di atas 7,5 % di akhir tahun 2018, (iii) menurunkan angka kemiskinan dari 20,03 % pada bulan Maret 2013 menjadi 15 % pada akhir tahun 2018.

Dari total penduduk miskin bulan Maret tahun 2013 sebanyak 993.560 orang atau 20,03 % dominan ada di pedesaan yang mencapai 879.990 atau 88,57 % dan di perkotaan sebagian kecil yaitu 113.57 orang atau 11,43%. Selanjutnya berdasarkan penyebab kemiskinan antara lain; (i) Garis kemiskinan pada September 2012 sebesar Rp. 222.507 perkapita/bulan naik sebesar 6,26 persen menjadi Rp.235.805 perkapita/bulan pada Maret 2013; (ii) Pada Maret 2013, sumbangan komoditi makanan terhadap Garis

Kemiskinan sebesar 78,65 persen, tidak jauh berbeda dengan September 2012 yang sebesar 79,16 persen, (iii) Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,466 pada September 2012 menjadi 3,393 pada Maret 2013 dan (i) Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,908 menjadi 0,875 pada periode yang sama.

Kerentanan penduduk terhadap kemiskinan berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga yang dipergunakan BKKBN menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan keluarga pada tahun 2011 didominasi keluarga pra sejahtera yang mencapai 606.166 Keluarga atau 57,17 % dari total keluarga sebanyak 1.060.355. Tingkat kesejahteraan lainnya yaitu keluarga sejahtera I sebanyak 274.170 (25,86%), Keluarga sejahtera II sebanyak 126.416 (11,92 %), keluarga sejahtera III sebanyak 45.789 (4,32 %) dan keluarga sejahtera III+ 7.794 (0,74 %).

Atas dasar itu pembangunan perdesaan sangat penting dan perlu dibangun untuk memperkuat fondasi perekonomian daerah, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pembangunan perdesaan identik dengan pembangunan pertanian, yang memerlukan dukungan kebijakan dan rencana aksi multi sektoral antara lain: (1) peningkatan kegiatan investasi, input produksi, pengelolaan pertanahan, pengembangan lahan usaha, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, (2) pengembangan SDM, pemberdayaan masyarakat (petani-nelayan), serta penyediaan pelayanan sosial dasar, (3) penyediaan insentif untuk kegiatan produksi, industrialisasi pertanian, pengembangan sistem perdagangan dan pemasaran produk, dan penjaminan harga produk pertanian, (4) penyediaan prasarana dan sarana perdesaan, serta pengembangan kawasan permukiman perdesaan, dan (5) peningkatan pengelolaan lingkungan untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

Pembangunan pertanian berpengaruh fundamental terhadap pembangunan daerah dan perekonomian daerah karena dominan penduduk sangat tergantung dari sektor pertanian yang kurang berkembang. Sejalan dengan itu "Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah 2011-2013 dilanjutkan dengan meningkatkan sinergi dan keterpaduannya dengan program lain menjadi Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2014-2018. Komponen kegiatan yang dialokasikan meningkat karena ada sinergi dengan program lainnya. Komponen Dana Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah meliputi dukungan dana APBD Provinsi, APBD Kabupten/kota, hibah kerjasama bilateral dan multilateral, CSR BUMN dan sinergi Program Kementrian/Lembaga.

Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah akan dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan terpadu dengan melibatkan semua stakeholders melalui pengembangan ekonomi produktif dan kegiatan bidang pembangunan lain yang dibutuhkan desa/kelurahan. Kegiatan ekonomi produktif yang dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan keunggulan ekonomi komparatif desa/kelurahan sasaran. Untuk menjamin konsistensi pelaksanaannya maka ditetapkan **Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah 2014-2018** yang akan menjadi acuan seluruh pemangku pembangunan.

1.2. TUJUAN PEMBANGUNAN

Tujuan Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018 adalah :

1. Meningkatkan kapasitas perekonomian berbasis keunggulan desa/kelurahan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata >6,5 %
2. Mendukung penurunan penduduk miskin menjadi 15 % akhir tahun 2018
3. Memberdayakan kelembagaan ekonomi dan sosial pedesaan yang dapat mendukung pelaksanaan 6 tekad pembangunan dan 8 agenda pembangunan daerah;
4. Menambah jumlah wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Desa/Kelurahan.

1.3. SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan daya saing basis ekonomi unggulan desa/kelurahan;
2. Meningkatnya akses sumberdaya ekonomi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatnya Desa/kelurahan yang mandiri secara ekonomi dan bebas dari kemiskinan.

1.4. PRINSIP PEMBANGUNAN

Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah 2014-2018 dilakukan dengan beberapa prinsip antara lain :

1. *Pemberdayaan*, upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dan kapasitas pemerintah desa/kelurahan melalui pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta keberlanjutan pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan yang optimal;
2. *Partisipatif*, upaya mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, baik dalam bentuk pikiran, tenaga maupun material sehingga tumbuh rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab;
3. *Demokratis*, pengambilan keputusan dalam setiap tahapan kegiatan didasarkan atas musyawarah-mufakat dan kesetaraan gender;
4. *Bertumpu pada sumber daya lokal*, penetapan jenis kegiatan didasarkan pada ketersediaan potensi dan kecocokan kegiatan sesuai kebutuhan setempat sehingga tercapai daya guna dan hasil guna pembangunan;
5. *Efisiensi*, menjamin pencapaian target program dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan;
6. *Efektivitas*, pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat;
7. *Transparansi*, Manajemen pengelolaan pembangunan desa mandiri anggur merah dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan;

2

8. *Keterpaduan dan Keberlanjutan*, pembangunan desa mandiri anggur merah dapat dilaksanakan secara simultan dengan program-program pembangunan perdesaan lainnya dengan memperhatikan keterkaitan dan keberlanjutannya, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan mendasar setiap desa/kelurahan.

1.5. LINGKUP KEGIATAN WILAYAH

Lingkup kegiatan Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018 sebagai berikut:

1. Lingkup Kegiatan Utama

Kegiatan utama Pembangunan Terpadu Desa/kelurahan mandiri Anggur Merah yang menjangkau seluruh Desa/kelurahan yang belum mendapatkan program Desa Mandiri Anggur Merah tahun 2011-2013 yaitu;

- Dana hibah Desa/Kelurahan yang digulirkan pada kelompok masyarakat sebesar Rp. 250 juta per Desa/Kelurahan melalui program Desa Mandiri Anggur Merah untuk mendukung pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi Desa/kelurahan;
- Dana hibah Desa/Kelurahan untuk pembangunan rumah layak huni untuk KK miskin sebesar Rp.50 juta melalui Program P2LDT untuk pembangunan rumah;
- Pembiayaan PKM yang ditempatkan di Desa/Kelurahan dengan gaji/upah dan biaya operasional Rp.2 juta per bulan untuk pendamping 1 Desa/Kelurahan dan Rp.2,5 juta Per bulan untuk pendampingan 2 Desa/ Kelurahan;
- Biaya operasional Desa/Kelurahan sebesar Rp.2,5 juta per tahun;
- Biaya Operasional Tim pengendali Kecamatan (Pemerintah kecamatan, Polsek dan Koramil) sebesar Rp. 10 juta per tahun.

2. Lingkup Kegiatan Sinergi program

Pembangunan terpadu berbasis desa/kelurahan melalui Program Desa Mandiri Anggur Merah akan disinergikan dengan program lain. Berdasarkan sumber dana maka sinergi program sebagai berikut:

a. APBD provinsi

- Hibah Desa/kelurahan sebesar Rp.50 juta untuk pembenahan Destinasi wisata dan kesiapan sarana pendukung bagi Desa potensi Wisata;
- Hibah Modal Koperasi sebesar Rp.20 juta per Koperasi bagi Koperasi Desa Mandiri Anggur Merah dan Koperasi lainnya
- Dana operasional bagi staf Pengelola Program di Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- Pelatihan Kewirausahaan bagi PKM berprestasi yang telah mengembangkan usaha sendiri atau bertugas sebagai manager Koperasi Desa Mandiri Anggur Merah;
- Sinergi lintas sektor program SKPD .

b. APBD Kabupaten/Kota

- Hibah Desa sebagai replikasi Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur merah;

9

- Dana operasional dan pembinaan program Desa Mandiri Anggur Merah dan Program Replikasi.

c. APBN dan Lembaga Internasional

- Sinergi program Kementrian/Lembaga berbasis Desa/kelurahan antara lain Program OVOP (one village one product), Program Prukab, Program bedah Desa, Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Program KB dan program lainnya;
- Sinergi program dalam melengkapi kebutuhan kemandirian Desa/Kelurahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur;
- Kegiatan melalui dana yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota, Satuan Kerja (SATKER) dan Lembaga Internasional merupakan kegiatan yang disinergikan dengan Dana Hibah Desa/kelurahan untuk percepatan penurunan kemiskinan.

d. Hibah CSR, NGO dan dukungan Pembinaan

- SKPD Provinsi, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dapat mengambil bagian pembinaan secara swadaya;
- NGO lokal dapat memberikan dukungan pemberdayaan dan pendampingan kelompok.

2

BAB II KARAKTERISTIK WILAYAH NTT

2.1. KONDISI UMUM WILAYAH

Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi kepulauan secara geografis terletak di antara 8° - 12° Lintang Selatan dan 118° - 125°



Bujur Timur. Luas wilayah daratan ± 47.349,9 km² dan luas wilayah lautan ± 200.000 km² yang tersebar pada 1.192 pulau. Dari jumlah pulau tersebut, hanya 44 pulau yang dihuni dan 1.148 pulau belum dihuni, 246 pulau sudah bernama sedangkan 946 lainnya belum bernama. Sebagian besar wilayahnya

bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah. Memiliki sungai sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25 - 118 kilometer tersebar di Kabupaten/kota.

Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi kepulauan secara administratif terbagi dalam 1 Kota, 21 Kabupaten, 306 Kecamatan, 316 Kelurahan dan 2.936 Desa. Berdasarkan geografis wilayah maka dalam kebijakan pembangunan dibagi dalam tiga satuan wilayah Pembangunan (WP) yaitu; (i) WP Timor-Alor-Rote Ndao-Sabu Raijua meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua; (ii) WP Flores-Lembata meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, dan (iii) WP Sumba meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 4.619.655 jiwa tahun 2009, 4.683.827 jiwa tahun 2010, 4.776.485 jiwa tahun 2011 dan tahun 2012 meningkat menjadi 4,899,260 jiwa. Dibandingkan tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 279,605 jiwa. Perkembangan penduduk Tahun 2011-2012 yaitu penduduk tertinggi berada di WP Timor-Alor-Rote Sabu yaitu 2,087,429 jiwa (43,70 %) naik menjadi 2,142,332 (43,73 %), selanjutnya WP Flores-Lembata 1,989,370 jiwa (41,52 %) menjadi 2,034,219 jiwa (42,59%) dan terkecil pada WP Sumba 701,697 jiwa (14,69%) naik menjadi 724,721 (14,79 %).

Pertumbuhan penduduk secara persentase untuk periode 2009 - 2010 sebesar 1,39 % dan meningkat menjadi 1,98 % pada periode 2010 - 2011 dan meningkat menjadi 2,60 % periode 2011 - 2012. Pertumbuhan penduduk yang meningkat 1,21 % pada periode 2009 - 2012 sebagai dampak dari meningkatnya migrasi masuk penduduk dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, meningkatnya angka harapan hidup penduduk dan meningkatnya penduduk usia subur yang melahirkan.

Penyebaran penduduk terbesar di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 453.386 jiwa (9,25%), disusul Kabupaten Belu sebanyak 370.770 jiwa (7,57%) dan Kota Kupang sebanyak 362.104

jiwa (7,39%). Kabupaten dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kabupaten Sumba Tengah dengan penduduk 65.606 jiwa (1,34%).

Kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur tahun 2012 mencapai 103 jiwa/Km serta untuk WP Flores-Lembata mencapai 119 Jiwa/Km, WP Timor-Alor-Rote Sabu 111 Jiwa/Km dan WP Sumba 65 Jiwa/Km. Kota Kupang merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan penduduk 2.017 jiwa/Km disusul Kabupaten Sumba Barat Daya 204 jiwa/Km dan Kabupaten Manggarai 184 jiwa/Km. Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Kupang merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 34 jiwa/Km, 35 jiwa/Km dan 59 jiwa/Km.

2.2. PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan keadaan perekonomian penduduk suatu wilayah/daerah. Ukuran yang dihasilkan dari penghitungan PDRB antara lain adalah rata-rata pendapatan perkapita, struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dari 9 (sembilan) Lapangan Usaha yang ada, berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2000. Berdasarkan harga berlaku, PDRB NTT mengalami kecenderungan naik dari tahun 2009, Rp. 11.920,6 miliar menjadi Rp. 13.971.621,9 miliar pada tahun 2012 sebagaimana tabel 1.

Tabel 1

PDRB dan Laju Pertumbuhan NTT dan Indonesia tahun 2009-2012

No	Wilayah	2009	2010	2011	2012
1	PDRB NTT (Rp.M)	11,920.600.0	12,546,822,0	13,253,420,2	13,971,621,9
	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	4.3	5.2	5.6	5,4
2	PDRB Indonesia (Rp.M)	2,178,850.4	2,313,838.0	2,463,242.0	2.618.100,0
	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	4.6	6.2	6.5	5.92
	Kontribusi Bali & Nusra (%)	0.55	0.54	2.55	2.51

Sumber: NTT Dalam Angka 2013 - BPS NTT, Analisis Bappeda

Kontribusi terbesar PDRB NTT atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2012 masih didominasi oleh Sektor Pertanian (28,06%); kemudian disusul Sektor Jasa-Jasa (24,69%); Perdagangan, Hotel dan Restoran (6,97%); Pengangkutan dan Komunikasi (5,78%); Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (4,07%); Industri Pengolahan (1,54%); Pertambangan dan Penggalian (1,31%); serta Listrik, Gas dan Air Minum (0,42%). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagaimana 2.

Tabel 2

PDRB NTT Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2012

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	+/-
1	Pertanian	10.657.816,12	11.545.882,65	12.677.148,11	1.131.265,46
2	Pertambangan dan Penggalian	382.545,48	424.823,80	483.522,92	58.699,12

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	+/-
3	Industri pengolahan	427.448,14	471.728,22	528.339,82	56.611,60
4	Listrik, Gas & Air Bersih	116.169,06	136.945,55	149.809,13	12.863,58
5	Bangunan/Konstruksi	1.931.451,62	2.182.737,32	2.538.667,27	355.929,95
6	Perdagangan	4.654.428,57	5.388.755,98	6.237.887,62	849.131,64
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.601.144,81	1.771.440,78	1.771.440,78	0
8	Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan	1.133.510,02	1.322.613,46	1.507.769,41	185.155,95
9	Jasa-Jasa	6.841.818,42	7.976.600,43	9.126.407,85	1.149.807,00
	PDRB	27.746.332,23	31.221.528,20	35.253.360,17	4.031.831,97

Sumber: NTT Dalam Angka 2013 - BPS NTT, Analisis Bappeda

2.2.2. Struktur dan PDRB Perkapita

Pada tahun 2012 sektor pertanian memegang kontribusi yang terbesar pada PDRB Nusa Tenggara Timur yaitu 35,96%, diikuti oleh lapangan usaha jasa-jasa 25,89%, Perdagangan, Restoran dan Hotel 17,69%, Bangunan dan Konstruksi 7,20%, Pengangkutan dan Komunikasi 7,68% Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,28%, Industri pengolahan 1,50%, Sektor Pertambangan dan penggalian 1,37%, dan sektor listrik, gas dan air bersih 0,42%. Kontribusi lapangan usaha pertanian masih menduduki kontribusi terbesar, namun akan menurun sejalan dengan meningkatnya peran sektor jasa.

Rata-rata PDRB per kapita penduduk NTT atas dasar harga berlaku menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 pendapatan per kapita sebesar Rp. 4.469.637 meningkat menjadi Rp. 7.195.650 tahun 2012 atau meningkat rata-rata per tahun sekitar 15%. Selanjutnya terhadap PDRB konstan tahun 2000 pendapatan perkapita tahun 2008 sebesar 2.326.065 meningkat menjadi 2.496.857 tahun 2011 atau meningkat rata-rata 1,90%. Namun demikian jika dibandingkan terhadap pendapatan perkapita penduduk Indonesia, berdasarkan persentase pendapatan per kapita penduduk NTT sekitar 25% sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3
Pendapatan Per kapita 2009-2012

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Pendapatan Per kapita Harga Berlaku	4,914,835	5,521,420	6,073,767	7,195,650
2	Pendapatan Per kapita Harga Konstan 2000	2,423,045	2,496,857	2,496,857	2,659,365
	Pertumbuhan ekonomi	4.29	5.23	5.63	5,48

Sumber: NTT Dalam Angka 2013 - BPS NTT, Analisis Bappeda

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu 4,29% pada tahun 2009, kemudian 5,23% pada tahun 2010, 5,63% pada tahun 2011 dan 5,48% tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Perkembangan ekonomi relatif merata

sehingga memberikan akses pada masyarakat relatif merata yang dapat dilihat dari gini ratio NTT tahun 2009 sebesar 0.36 dan Indonesia 0.37, selanjutnya tahun 2010 gini ratio NTT dengan Indonesia yaitu 0.38.

Kemampuan Ekonomi perlu dipacu untuk meningkatkan daya dorong pada pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Daya ungkit ekonomi yang lemah berpengaruh terhadap IPM NTT yang perkembangannya yaitu 67,26 Tahun 2009, menjadi 68,28 tahun 2012 dan berada di bawah rata-rata IPM Nasional yang telah mencapai 72,64 pada tahun 2011. Secara Nasional posisi IPM Nusa Tenggara Timur berada di urutan 31 tahun 2011 dan naik menjadi urutan 30 tahun 2012 dari 33 provinsi di Indonesia.

2.2.3. Lapangan Usaha

Lapangan usaha yang menjadi sumber penyerapan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi daerah tumbuh variatif sehingga daya serap tenaga kerja dan kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan penduduk berumur 15 tahun ke atas (bekerja seminggu) pada periode 2008-2011 mengalami penurunan pada tiga sektor yaitu sektor pertanian, listrik, gas dan air minum, sedangkan sektor Angkutan, Perdagangan, Komunikasi dan sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif. Perkembangan lapangan pekerjaan 9 sektor utama sebagaimana tabel 4.

Tabel 4
Lapangan Usaha Utama Tahun 2008-2012

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2008	2009	2010	2011	2012	Perkembangan Per Tahun(+/-)
1	Pertanian	1,448,074	1,472,627	1,333,638	1,360,265	1,291,191	-2.71
2	Pertambangan dan penggalian	18,544	35,570	30,166	23,627	29,537	14.82
3	Industri	140,886	134,591	143,972	124,697	158,501	3.13
4	Listrik, Gas dan Air	2,626	2,661	1,731	2,420	2,176	-4.28
5	Bangunan	47,529	56,557	62,472	59,405	81,634	17.94
6	Perdagangan dan rumah makan	141,387	149,160	150,765	147,439	154,124	2.25
7	Angkutan, pergudangan, komunikasi	97,102	91,598	98,318	87,403	95,738	-0.35
8	Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan dan bangunan	10,059	12,864	9,766	20,810	18,484	20.94
9	Jasa	179,918	204,745	230,401	270,189	264,298	11.72
	Jumlah	2,086,125	2,160,373	2,061,229	2,096,255	2,095,683	0.11

Sumber: Analisis Bappeda pada NTT dalam angka

2.3. KEMISKINAN PENDUDUK

Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan per tahun. Pada periode 2008-2012 jumlah penduduk miskin menurun dari 1.098.400 orang atau 25,65% menjadi 1.000.300 orang atau 20.03% pada bulan Maret 2013. Perkembangan penurunan kemiskinan periode 2008-2013 sebagaimana pada Tabel 5.

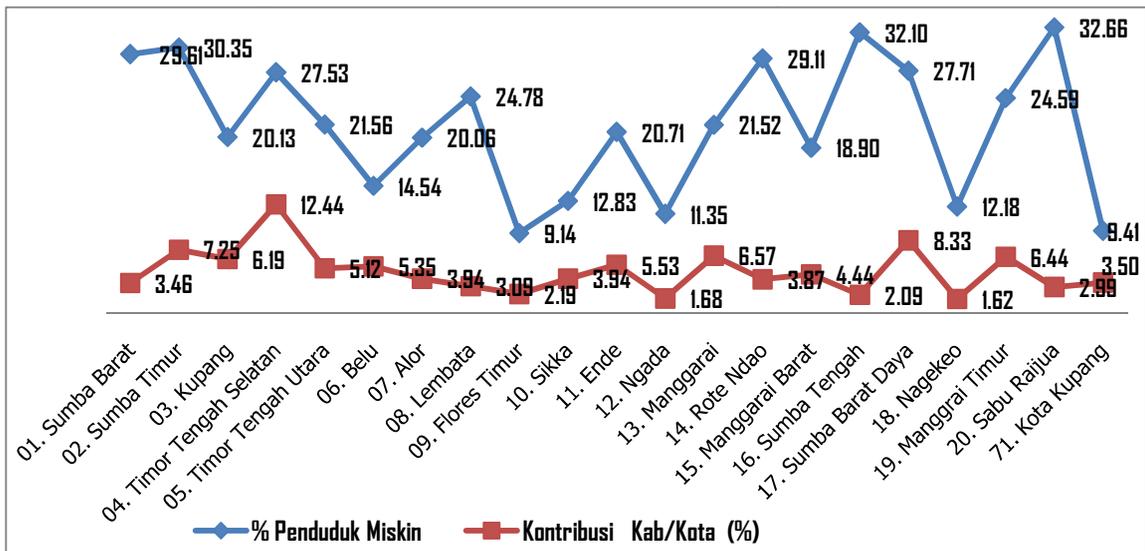
Tabel 5
Perkembangan Penurunan Kemiskinan 2008-2013

Tahun	Penduduk	Penduduk Miskin			Persentase		
		Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
2008	4,534,319	119.000	979.000	1,098.000	15.5	27.9	25.65
2009	4,619,655	109,400	903,700	1,013,100	14	25.4	23.31
2010	4,683,827	107,400	906,700	1,014,100	13.6	25.1	23.03
2011	4,776,485	99,200	887,300	986,500	10.5	22.9	20.48
2012	4,900,652	117,400	882,900	1,000,300	12.2	22.4	20.41
2013	4,900,652	113.57	879.99	993.56	11.54	22.13	20.03
Penurunan 2008-2013	366,333	-5.73	-99.11	-104.84	-3.96	-5.77	-5.62

Selanjutnya kondisi kemiskinan berdasarkan aspek yang berpengaruh sebagai berikut: (i) Berdasarkan daerah tempat tinggal periode Maret 2012 – Maret 2013, persentase penurunan penduduk miskin sebesar 0,68% untuk perkotaan dan 0,85% untuk perdesaan; (ii) Garis kemiskinan pada September 2012 sebesar Rp. 222.507 per kapita/bulan naik sebesar 6,26% menjadi Rp.235.805 per kapita/bulan pada Maret 2013; (iii) Sumbangan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan bulan Maret 2013 sebesar 78,65% dan bulan September 2012 sebesar 79,16%; (iv) Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,466 pada September 2012 menjadi 3,393 pada Maret 2013 dan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,908 menjadi 0,875 pada periode yang sama. Prosentase kemiskinan penduduk kabupaten/kota pada bulan September 2012 bervariasi, terendah Kabupaten Flores Timur sebesar 9,14% dan tertinggi Kabupaten Sabu Rajua 32,66%. Terhadap kemiskinan provinsi, kontribusi tertinggi Kabupaten Timor Tengah Selatan 12,44% dan terendah Kabupaten Nagekeo 1,62%. Persentase penduduk miskin dan kontribusi kemiskinan Kabupaten/kota sebagaimana gambar 1.

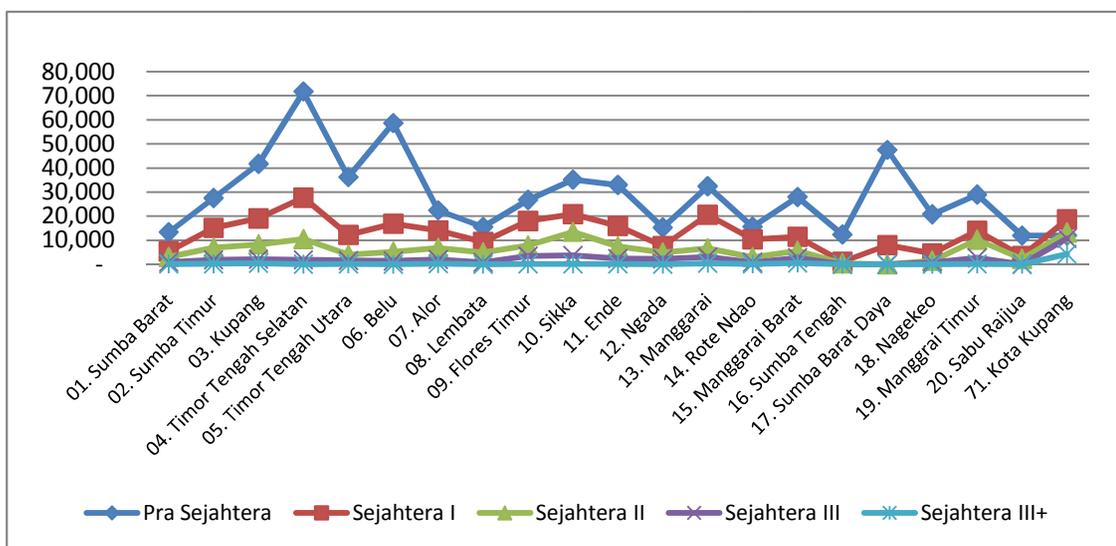
9

Gambar 1
 Persentase dan Kontribusi Penduduk Miskin September tahun 2012



Kerentanan kemiskinan berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga yang dipergunakan BKKBN menunjukkan bahwa pada tahun 2011 didominasi keluarga pra sejahtera yang mencapai 606.166 Keluarga atau 57,17% dari total keluarga sebanyak 1.060.355. Tingkat kesejahteraan lainnya yaitu keluarga sejahtera I 274.170 (25,86%), Keluarga sejahtera II 126.416 (11,92%), keluarga sejahtera III 45.789 (4,32%) dan keluarga sejahtera III+7.794 (0,74%). Komposisi kesejahteraan Keluarga kabupaten/ Kota dan klasifikasi keluarga tahun 2011 selengkapnya sebagaimana Gambar 2.

Gambar 2
 Klasifikasi Kesejahteraan Keluarga Menurut Kabupaten/Kota tahun 2011



2.4. PROGRAM DESA MANDIRI ANGGUR MERAH TAHUN 2011-2013

2.4.1. Lokasi Desa/Kelurahan



Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa/kelurahan dalam pembangunan sesuai karakteristik dan kapasitas masyarakat. Sehubungan dengan itu hibah Desa/ kelurahan dialokasikan untuk direncanakan dan dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat oleh masyarakat. Selama tiga tahun pelaksanaan Program telah menjangkau 891 Desa/kelurahan atau 27,45 % dari total desa/kelurahan.

Sebaran lokasi program di kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur seagaimana Tabel 6

Tabel 6
Jumlah Desa/Kelurahan Lokasi Program 2011-2013

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/Kelurahan			
		2011	2012	2013	Total
1	Kota Kupang	4	6	6	16
2	Kupang	24	24	24	72
3	TTS	32	32	32	96
4	TTU	24	24	24	72
5	Belu	24	24	24	72
6	Rote Ndao	8	10	10	28
7	Sabu Raijua	6	6	6	18
8	Alor	17	17	17	51
9	Lembata	9	9	9	27
10	Flores Timur	19	19	19	57
11	Sikka	21	21	21	63
12	Ende	20	21	21	62
13	Nagekeo	7	7	7	21
14	Ngada	9	9	12	30
15	Manggarai Timur	6	6	9	21
16	Manggarai	9	9	11	29
17	Manggarai Barat	7	10	10	27
18	Sumba Timur	22	22	22	66
19	Sumba Tengah	5	5	5	15
20	Sumba Barat	6	6	6	18
21	Sumba Barat Daya	8	11	11	30
	Jumlah	287	298	306	891

Sumber: Sekretariat Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Juli 2013

Jumlah Desa/Kelurahan penerima program tahun 2011 sebanyak 287 Desa/Kelurahan, meningkat menjadi 298 Desa/kelurahan atau naik 11 Desa/kelurahan tahun 2012 dan meningkat menjadi 306 Desa/Kelurahan tahun 2013 atau naik 8 Desa/kelurahan. Peningkatan Desa/kelurahan sasaran karena ada pemekaran Kecamatan di 8 Kabupaten/kota sebagai berikut:(i) Kota Kupang

9



pada tahun 2011 berjumlah 4 kelurahan pada tahun 2012 dan 2013, meningkat menjadi 6 Kelurahan, (ii) Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2011 berjumlah 8 desa, pada tahun 2012 berjumlah 20 Desa meningkat menjadi 21 Desa pada tahun 2012 dan 2013, (iv) Kabupaten Ngada pada tahun 2011 berjumlah 9 Desa, meningkat menjadi 12 Desa pada tahun 2012 dan 2013,

(v) Kabupaten Manggarai Timur dengan berjumlah 6 Desa, meningkat menjadi 11 Desa pada tahun 2012 dan 2013, (vi) Kabupaten Manggarai pada tahun 2011 berjumlah 9 Desa, meningkat menjadi 11 Desa pada tahun 2012 dan 2013, (vii) Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 7 Desa, meningkat pada tahun 2012 & 2013 menjadi 10 Desa, dan (viii) Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2011 berjumlah 8 Desa, meningkat menjadi 11 Desa pada tahun 2012 dan 2013.



2.5. Kelompok Usaha

Program Desa Mandiri Anggur merah dilaksanakan melalui hibah Desa/kelurahan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh kelompok yang pembentukannya dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Secara umum

Kelompok dibentuk berdasarkan jenis usaha dan kedekatan lokasi permukiman sehingga memudahkan kerjasama antar anggota kelompok. Sebagai wadah usaha bersama, maka masing-masing kelompok menetapkan secara mandiri keanggotannya. Jumlah dan anggota kelompok program selama tiga tahun anggaran di seluruh Kabupaten/kota sebagaimana pada tabel 7.



Tabel 7. Kelompok dan Anggota Kelompok program 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	Kelompok	Anggota kelompok	Prosentase Anggota Klp (%)
1	Kota Kupang	103	1.036	1.13
2	Kupang	544	5.503	6.00
3	TTS	789	7.317	7.98
4	TTU	833	8.580	9.36
5	Belu	802	7.198	7.85
6	Rote Ndao	283	2.282	2.49
7	Sabu Raijua	44	764	0.83
8	Alor	485	5.090	5.55
9	Lembata	262	1.758	1.92
10	Flores Timur	590	6.230	6.79
11	Sikka	893	6.817	7.43
12	Ende	782	5.223	5.69
13	Nagekeo	151	1.517	1.65
14	Ngada	221	3.322	3.62
15	Manggarai Timur	366	3.867	4.22
16	Manggarai	451	4.785	5.22
17	Manggarai Barat	336	4.977	5.43
18	Sumba Timur	630	6.215	6.78
19	Sumba Tengah	121	1.370	1.49
20	Sumba Barat	285	2.472	2.70
21	Sumba Barat Daya	452	5.390	5.88
	Jumlah	9.423	91.713	100.00

Sumber: Sekretariat Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Juli 2013

Jumlah total anggota kelompok masyarakat seluruh kabupaten/kota pada tahun 2011 berjumlah 35.190 Kepala Keluarga menjadi 28.220 Kepala Keluarga pada tahun 2012 dan 28.303 pada tahun 2013.

2.6. Usaha Ekonomi Produktif

Jenis-jenis usaha yang telah dikembangkan oleh masyarakat berpedoman pada potensi wilayah desa/kelurahan serta mendukung 4 (empat) tekad pembangunan NTT yaitu Pengembangan Jagung, Pengembangan ternak, Pengembangan Koperasi dan khusus untuk pengembangan Cendana dilaksanakan melalui pengembangan Hutan Desa yang diharapkan dapat dikembangkan masing-masing 1 ha per desa. Berdasarkan proposal usulan kelompok dan pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi produktif terdapat 7 jenis usaha. Jenis usaha dimaksud yaitu: (1) Usaha Peternakan, (2) Usaha Pertanian, (3) Usaha Koperasi dan Simpan Pinjam, (4) Usaha Perikanan, (5) Usaha Perkebunan, (6) Usaha Perindustrian (Industri Kecil), dan (7) Perdagangan dan Jasa. Berdasarkan kelompok yang mengusahakan prosentase terbesar yaitu peternakan serta usaha perdagangan dan jasa sebagaimana tabel 8

Tabel 8
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif							
		Peter nakan	Perdaga ngan & Jasa	Industri	Tanaman pangan	Peri kanan	Simpan Pinjam	Koper asi	Perke bunan
1	Kota Kupang	50	25	11	1	4	-	8	-
2	Kupang	482	25	5	30	20	-	38	-
3	TTS	701	17	6	46	9	-	1	1
4	TTU	659	44	63	23	14	14	1	-
5	Belu	608	42	26	20	20	96	2	-
6	Rote Ndao	115	44	20	37	48	1	5	1
7	Sabu Raijua	8	10	3	4	11	5	10	-
8	Alor	234	61	18	19	90	19	50	1
9	Lembata	84	52	58	20	36	-	2	4
10	Flores Timur	228	115	106	30	64	-	3	2
11	Sikka	487	196	99	18	45	-	7	3
12	Ende	366	263	153	67	40	-	-	30
13	Nagekeo	116	73	4	1	-	8	2	1
14	Ngada	160	12	11	21	8	-	11	-
15	Manggarai Timur	305	14	4	6	1	11	3	-
16	Manggarai	340	39	14	34	4	-	4	2
17	Manggarai Barat	223	32	1	48	8	45	-	-
18	Sumba Timur	547	28	5	33	12	-	10	-
19	Sumba Tengah	81	3	7	18	5	-	8	-
20	Sumba Barat	128	34	63	34	10	-	4	-
21	Sumba Barat Daya	345	29	15	24	1	-	-	-
	Jumlah	6.267	1,158	692	534	450	199	169	45
	Prosentase (%)	65.87	12.17	7.27	5.61	4.73	2.09	1.78	0.47

2.7. Sinergi Program

2.7.1. Sinergi dengan Program SKPD Provinsi

Program Desa Mandiri Anggur Merah telah bersinergi dengan Program/kegiatan SKPD Provinsi sebagai berikut;

- BPMPD, melalui Program P2LDT sebanyak 5 unit rumah per Desa/kelurahan dengan total rumah sebanyak 4.435 unit rumah,
- Badan Arsip, Pelatihan kearsipan desa;
- Badan Perpustakaan, melalui Pembinaan & bantuan buku perpustakaan Desa;
- Dinas Kominfo, Publikasi perkembangan Program Desa Mandiri Anggur Merah;
- Inspektorat, Audit pelaksanaan program/kegiatan di desa/Kelurahan;
- Seluruh SKPD, Pembinaan Desa/Kelurahan.

2.7.2. Sinergi dengan Program Kabupaten/Kota

Untuk mendukung pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah, Kabupaten/Kota telah melakukan replikasi program dan telah dilaksanakan pada tahun 2011 serta dukungan untuk tahun 2012 dan tahun 2013. Sinergi Kabupaten/Kota terhadap Program Desa Mandiri Anggur Merah dilaksanakan lewat replikasi program serta dukungan operasional seperti pada tabel 9.

Tabel 9
Sinergi Program Pemberdayaan APBD Kabupaten/Kota Tahun
2011-2013

No	Kab/Kota	2011	2012	2013	Keterangan
1	Kota Kupang	0	2	51	Rp. 500 juta per kelurahan
2	Kabupaten Kupang	24	24	24	Rp. 300 juta 1 desa Per kecamatan
3	TTS	8	8	8	Rp. 250 juta/desa untuk 5 Desa
4	TTU	0	24	24	Rp. 300 juta 1 Desa Per Kecamatan
5	Belu	0	0	0	Lokasi Program APBN dan APBD
6	Rote Ndao	91	91	91	Rp. 50.000 per Desa
7	Sabu Raijua	0	0	63	Mulai 2013, Rp. 210 juta per Desa
8	Alor	11	11	11	Rp. 250 juta 1 desa Per kecamatan
9	Lembata	9	9	9	Rp.100.000 desa bertahap
10	Flores Timur	1	1	29	Rp. 250 juta per desa bertahap
11	Sikka	0	1	1	Rp.250 juta selektif
12	Ende	1	3	3	Rp. 250 juta 1 desa per tahun
13	Nagekeo	7	7	7	Rp. 250 juta 1 desa per Kecamatan
14	Ngada	123	123	123	Alokasi Ternak Sapi
15	Manggarai Timur	9	9	9	Rp. 250 juta 1 desa per Kecamatan

No	Kab/Kota	2011	2012	2013	Keterangan
16	Manggarai	0	0	0	Rp. 450 juta Infrastruktur Per Kec.
17	Manggarai Barat	0	10	10	Rp. 50 juta per desa
18	Sumba Timur	0	5	5	Rp. 250 juta 1 desa Perkecamatan
19	Sumba Tengah	15	15	15	Rp. 300 juta 2 desa per Kecamatan
20	Sumba Barat	6	6	6	Rp. 250 juta 1 desa Per kecamatan
21	Sumba Barat Daya	8	11	11	Rp. 50 juta per Desa
	Jumlah	190	236	500	

2.7.3. Sinergi Program Lembaga Internasional

Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah didukung oleh lembaga internasional dalam bentuk penambahan kegiatan pelatihan bagi pendamping kelompok masyarakat (PKM) dan ada yang menambahkan kegiatan. Sinergi program masing-masing lembaga internasional sebagai berikut:

- Pelatihan Wirausaha bagi para Pemuda/pemudi di Desa/Kelurahan sasaran Program sebanyak 15 Desa/Kelurahan oleh ILO-EAST NTT;
- Pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya PKM Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah bagi 126 PKM di 126 Desa/Kelurahan oleh ILO-EAST NTT;
- Dukungan WVI di 4 Kabupaten (Sikka, Alor, Sumba Timur dan Flores Timur) dalam Pengembangan Kapasitas dan manajemen ekonomi keluarga;
- Dukungan AIPD AusAID sebanyak U\$ 2 juta untuk pelatihan PKM;
- Telah disepakati dalam AWP 2013 dukungan program ACF, Acces II, WVI, SPARC, AIPD dan WFP.

2.8. Kemitraan Pelaksanaan Program

Program Desa Mandiri Anggur Merah diharapkan mampu menjadi pintu masuk seluruh elemen pembangunan dalam kemitraan pembangunan. Sehubungan dengan itu dalam pelaksanaan telah dilakukan kemitraan dengan pihak terkait sebagai berikut:

2.8.1. Dukungan Swadaya Masyarakat

Program Desa Mandiri Anggur Merah harus mampu merangsang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sehubungan dengan itu keberhasilan Program sangat berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan program. Jenis dukungan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program yang terukur sebagai berikut:

- Biaya penyusunan, transportasi pembukaan rekening, pengiriman dan penyediaan materai bagi usulan program dengan nilai rata-rata per Desa sekitar Rp. 500.000;
- Tenaga kerja dan bahan-bahan lokal pembuatan kandang bagi pelaksana kegiatan usaha peternakan ayam, peternakan sapi dan peternakan babi;
- Tenaga kerja bagi usaha pertanian, perikanan, perkebunan, simpan pinjam dan kegiatan jasa perdagangan.

2.8.2. Kemitraan Bank NTT

Dalam upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah maka telah dilaksanakan kemitraan dengan Bank NTT. Kemitraan yang dilaksanakan telah memberikan keuntungan dari berbagai aspek sebagai berikut:

a. Memperlancar penyaluran dana hibah:

- Menyalurkan dana bantuan program melalui rekening Desa/Kelurahan pada PT. Bank NTT;
 - Desa, kelompok, pemerintah Desa dan PKM bebas dari kewajiban membayar uang pembukaan rekening Bank
 - Membantu melakukan pembinaan keterampilan para Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) dalam perencanaan dan pengusulan kegiatan usaha yang memenuhi kualifikasi kelayakan secara finansial;
 - Membantu verifikasi proposal ekonomi produktif dari kelompok-kelompok sasaran sehingga memenuhi kelayakan usaha;
 - Memberikan pertimbangan teknis yang dibutuhkan untuk peningkatan pencapaian sasaran Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan dengan meningkatkan nasabah Bank NTT sebanyak 10.620 nasabah dengan perincian sbb:
- Nasabah di tingkat kecamatan sebanyak 306 nasabah;
 - Nasabah di tingkat Desa sebanyak 891 nasabah;
 - Nasabah ditingkat kelompok sebanyak 9.423 nasabah.

2.8.3. Potensi Nilai Tambah Program

Alokasi dana hibah yang langsung ditransfer ke rekening Pemerintah Desa/Kelurahan telah memberikan peluang lebih besar menerima manfaat dana dibandingkan dengan pengelolaan program lainnya. Berbagai nilai efisiensi yang diperoleh masyarakat yang terukur sebagai berikut:

- Pola hibah meningkatkan nilai efisiensi 20-30 % melalui pengandaan langsung kelompok dibandingkan melalui pihak ketiga;
- Tambahan dana hibah desa melalui bunga dana yang diperoleh dari bunga bank dengan besar bunga 5 % lebih per bulan;
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan yang ditunjukkan dengan meningkatkan jumlah nasabah Bank NTT sebanyak 891 rekening Desa, 306 rekening pemerintah kecamatan, 891 rekening PKM dan sekitar 9.423 rekening kelompok;
- Meningkatnya kesadaran pembuatan KTP karena menjadi salah satu syarat dalam pembukaan rekening Bank.
- Kegiatan kelompok yang berjalan dengan mulai melakukan perguliran, pembentukan Koperasi dan PAUD
- Meningkatkan lapangan kerja baru sebagai PKM yang dipersiapkan sebagai calon wirausaha sebanyak 891.
- Membangun kepercayaan baru terhadap kapasitas masyarakat dalam pengelolaan program dan kegiatan dengan makin meningkatnya kepercayaan lembaga internasional dengan mengembangkan program

9

BAB III

PERENCANAAN 2014-2018

3.1. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan daerah merupakan pendekatan utama mengenai upaya-upaya pembangunan yang harus dilaksanakan sejalan dengan strategis pembangunan daerah secara umum yang dijabarkan lebih operasional. Strategi pembangunan yang dilaksanakan yaitu kemitraan, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdaan masyarakat dan keterpaduan sektor.

3.1.1. Kemitraan dan Keberlanjutan Program

Satuan pemerintahan Provinsi mengemban misi representasi pemerintahan dan sekaligus sebagai daerah otonom. Karenanya, pemerintah Provinsi memiliki kewenangan sekaligus tanggungjawab untuk mengembangkan kemitraan secara internal dan eksternal. Kemitraan internal dengan kabupaten/kota didasarkan atas asas/prinsip kebersamaan, solidaritas dan komitmen yang sama untuk mewujudkan kemajuan bersama serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Kemitraan daerah Provinsi, LSM regional/nasional/internasional maupun Negara sahabat merupakan bentuk kemitraan eksternal. Untuk mengoptimalkan strategi kemitraan maka dilaksanakan melalui upaya strategis sebagai berikut:

- a. **Kemitraan Desa Lokasi.** Sumber-sumber dana program yang perlu didorong dan digerakan peningkatannya untuk mendukung Desa Mandiri Anggur Merah yaitu; Dana Kantor Pusat, Dana Kantor Daerah, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas pembantuan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, Lain-lain pendapatan yang sah, APBD Kabupaten/Kota, Investasi Swasta, Hibah kerjasama bilateral dan multilateral, NGO Internasional, CSR BUMN, kerjasama pemerintah swasta dan sumber program pembangunan lainnya.
- b. **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan.** Peningkatan kualitas investasi pembangunan dimaksudkan bahwa untuk setiap pembiayaan harus mampu memberikan daya ungkit besar dan mampu mendukung pencapaian target Program Desa Mandiri. Untuk mewujudkan kualitas dukungan setiap program maka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pendanaan program dilaksanakan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berdaya ungkit besar dengan tetap berwawasan lingkungan untuk menjamin kesinambungannya.
- c. **Peningkatan Pengelolaan Hasil.** Pengelolaan hasil program Desa Mandiri Anggur Merah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka semua hasil program harus dikelola secara baik. Untuk menjamin setiap hasil program pembangunan berfungsi optimal maka pemangku kepentingan yang mengelola, memelihara, membina, mengendalikan dan mengawasi harus mengacu pada standar yang sama. Sehubungan sumber dana program berbeda maka setiap hasil pembangunan harus ada pencatatan secara baik dilengkapi standar pengelolaan yang akan menjadi kartu kendali.

3.1.2.Peningkatan dan Percepatan Pembangunan

Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan Desa/Kelurahan. Meningkatnya kapasitas ekonomi Desa/kelurahan diharapkan dapat mendorong peningkatan pembangunan bidang lainnya. Sehubungan dengan itu peningkatan dan percepatan pembangunan dilaksanakan melalui; (i) peningkatan kinerja potensi unggulan yang sudah dikelola; (ii) Perluasan dan percepatan pengelolaan potensi yang belum dikelola; dan (iii) peningkatan dan percepatan dukungan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pelayanan sosial dasar berbasis desa/kelurahan.

3.1.3.Keterpaduan Lintas Sektor

Prioritas utama dalam pembangunan lintas sektor terpadu yaitu; Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengembangan Infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup dan tata ruang serta tata Kelola Pemerintahan hingga Desa/ Kelurahan. Pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil yang optimal harus didasarkan pada karakteristik wilayah dengan pendekatan pembangunan yaitu: (i) keberpihakan, (ii) percepatan, (iii) peningkatan, (iv) penyerasian dan mengoptimalkan; (v) pengembangan, serta (vi) Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan dengan penerapan pada masing-masing elemen sebagai berikut:

a. Pembangunan SDM

Indeks pembangunan manusia (IPM) mencerminkan tiga aspek utama yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia, yaitu: (i) aspek pendidikan ditunjukkan dengan tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah; (ii) aspek kesehatan, ditunjukkan dengan angka harapan hidup, angka kematian bayi waktu lahir, dan angka kematian ibu waktu melahirkan; (iii) aspek Ekonomi, ditunjukkan dengan pengeluaran untuk konsumsi per tahun. Berdasarkan kategori tersebut maka strategi pengembangan sesuai Wilayah sebagai berikut:

- 1) *Desa/Kelurahan SDM rendah* diterapkan kebijakan percepatan. Percepatan peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan SD, SLTP dan SLTA yang sejenis, peningkatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan memberikan bantuan khusus kesehatan di daerah miskin; peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pemagangan dan penciptaan peluang kerja;
- 2) *Desa/Kelurahan SDM sedang* diterapkan kebijakan pemberdayaan. Pemberdayaan terhadap SDM dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana yang dapat menjamin kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat;
- 3) *Desa/Kelurahan kualitas SDM tinggi* diterapkan kebijakan penguatan. Penguatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui fasilitasi pengembangan pendidikan unggulan, peningkatan pelayanan kesehatan; peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, pemberian bantuan modal usaha, dukungan pada Jamsostek bagi tenaga kerja dan pemberian

beasiswa pada mahasiswa di bidang yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan setempat.

b. Pembangunan Basis Ekonomi

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan maka harus diupayakan dua hal utama yaitu melakukan eksploitasi sumber daya alam termasuk kelautan dan potensi keanekaragaman hayati dalam batas-batas lestari (apabila sumber daya alam tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka hasil eksploitasinya sebagian digunakan mencari cadangan baru atau mengembangkan komoditas pengganti) dan penganekaragaman ekonomi baik horizontal maupun vertikal.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diidentifikasi lima karakteristik basis ekonomi Desa/kelurahan anggur merah yaitu; (1) *Desa/kelurahan Pertanian Terpadu*, dengan unggulan Tanaman pangan lahan kering, Tanaman pangan lahan basah, Perkebunan, peternakan, dan industri kecil pengolahan hasil pertanian; (2) *Desa/kelurahan Pesisir Terpadu*, dengan unggulan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan didukung kegiatan ekonomi lainnya; (3) *Desa/kelurahan Wisata Terpadu*, Unggulan wisata bahari, unggulan wisata alam, unggulan wisata budaya dan religius, wisata kuliner dan ekonomi kreatif khas destinasi wisata didukung kegiatan ekonomi lainnya; (4) *Desa/Kelurahan Pertambangan dan Industri terpadu*, dengan unggulan Pertambangan dan Industri menengah didukung ekonomi lainnya; dan (5) *Desa/kelurahan Jasa terpadu*, dengan unggulan perdagangan dan jasa-jasa didukung ekonomi lainnya.

Wilayah potensial tersebut dibangun dengan strategi pengembangan yang sesuai kebutuhan pembangunan desa/kelurahan sebagai berikut:

- 1) *Desa/Kelurahan potensi dan keragaman usaha rendah*, diterapkan kebijakan pengembangan sumber daya secara berkelanjutan dengan strategi pemanfaatan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat lokal dengan melibatkan pihak-pihak terkait, perkembangan agroindustri berbasis sumberdaya terbaharui, pengelolaan usaha penambangan berwawasan lingkungan, pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pemanfaatan sumber daya alam mengutamakan pendekatan ekosistem.
- 2) *Desa/Kelurahan potensi rendah dan keragaman usaha tinggi* diterapkan kebijakan peningkatan daya saing dan daya tarik investasi dengan strategi penetapan standarisasi dan peningkatan mutu produksi, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengupayaan harga-harga produksi berada pada harga pasar yang wajar dan pemberian intensif bagi usaha pengelolaan sumber daya alam lestari.
- 3) *Desa/Kelurahan potensi tinggi dan keragaman usaha rendah*, diterapkan kebijakan peningkatan keanekaragaman produk hasil pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dengan strategi penganekaragaman horizontal bagi produk-produk yang mempunyai nilai tambah dan permintaan pasar tinggi dan penganekaragaman produk sumber daya alam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

- 4) *Desa/Kelurahan potensi dan keragaman usaha tinggi*, diterapkan kebijakan peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi produk-produk sumber daya alam yang mempunyai nilai tambah dan permintaan pasar tinggi baik di dalam maupun luar negeri, serta peningkatan akses pasar, sistem distribusi, dan pemasaran.

c. Pembangunan Prasarana dan Sarana

Ketersediaan prasarana dan sarana wilayah merupakan faktor penunjang pengembangan desa/kelurahan. Oleh sebab itu, secara garis besar terdapat tiga kategori kondisi sarana dan prasarana yang pembangunannya dilaksanakan strategi pengembangan sebagai berikut:

- *Desa/Kelurahan dengan prasarana dan sarana tinggi*, kebijakan pembangunan yang diterapkan adalah penyerasian dan pengoptimalkan serta penguatan prasarana dan sarana yang ada;
- *Desa/Kelurahan dengan prasarana dan sarana sedang*, kebijakan pembangunan yang diterapkan adalah pengoptimalkan yang ada dan percepatan pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan;
- *Desa/Kelurahan dengan prasarana dan sarana rendah*, kebijakan yang diterapkan adalah percepatan dan perluasan pembangunan prasarana dan sarana.

d. Percepatan Penurunan Kemiskinan

Untuk percepatan penurunan kemiskinan di lokasi Program Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur merah maka kebijakan percepatan dilaksanakan melalui (i) pendekatan pembangunan secara terpadu dan menyeluruh pada aspek-aspek penyebab utama kemiskinan masyarakat, dan (iii) Pengembangan potensi keunggulan wilayah melalui sinergi Program pemberdayaan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota dan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Sinergi program Pembangunan Terpadu Desa mandiri Anggur Merah dengan PNPM mandiri dan program pemberdayaan APBD Provinsi sesuai kluster yang ditetapkan dengan penyalarsan program/kegiatan sebagai berikut:

- *Kluster-1: Bantuan perlindungan sosial*. Bantuan perlindungan sosial berupa alokasi BOS, PKH, Jamkesmas, BOK dan bantuan pada korban bencana alam dan lansia dalam pelaksanaannya telah disinergikan dengan program hibah dari dana APBD Provinsi seperti beasiswa, jamkesda dan hibah sosial yang disinergikan dengan program perlindungan sosial Kabupaten/kota, pembangunan lembaga internasional, CSR BUMN, Lembaga sosial kemasyarakatan dan lainnya.
- *Kluster-2: Pemberdayaan Masyarakat*. Pelaksanaan program pemberdayaan meliputi PNPM, PUAP, PPIP, Desa Wisata dan P2DTK telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan yang disinergikan dengan program perlindungan sosial Kabupaten/kota dan sumber-sumber pembangunan lembaga internasional, CSR BUMN, Lembaga sosial kemasyarakatan dan lainnya.

- *Kluster-3: Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. KUR merupakan sumber permodalan bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan KUR melalui kelembagaan Koperasi terus dilaksanakan advokasi pada masyarakat;
- *Kluster-4: Program Pro rakyat*. Kebijakan nasional tentang program rumah sangat murah dan murah, kendaraan umum angkutan murah, penyediaan air minum berbasis masyarakat, listrik murah dan hemat sangat penting bagi masyarakat yang disinergikan dengan program perlindungan sosial Kabupaten/kota dan sumber-sumber pembangunan lembaga internasional, CSR BUMN, Lembaga sosial kemasyarakatan dan lainnya

3.1.4. Perkuatan faktor Penentu keberhasilan Pembangunan

Keberhasilan implementasi strategi pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sampai sejauhmana sejumlah faktor penentu keberhasilan dapat dikendalikan dan dipenuhi dengan baik. Faktor penentu keberhasilan yang dimaksud mencakup perencanaan dan penganggaran partisipatif, pemberdayaan masyarakat, kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

a. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran.

Model perencanaan dan penganggaran secara partisipatif akan menjamin keterkaitan antara permasalahan riil yang sedang dihadapi masyarakat dan prioritas upaya pemecahannya dengan memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu perencanaan dan penganggaran secara partisipatif akan menjamin tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan keberlanjutan pembangunan. Prinsip perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah: 1). Proses pengambilan keputusan dilakukan bersama dan 2). Keberlanjutan proses pengambilan keputusan bersama tersebut dalam tahapan selanjutnya yaitu: a). penetapan tujuan, b). identifikasi sumber daya dan kebutuhan, c). koleksi sumber daya dan perumusan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan), d). alokasi sumber daya untuk kegiatan prioritas, e). pelaksanaan kegiatan, dan monitoring dan evaluasi. Perencanaan dan penganggaran secara partisipatif dilakukan mulai dari tahapan proses perencanaan yang paling bawah yaitu Musrenbang Dusun/Desa. Perencanaan dan penganggaran partisipatif merupakan salah satu faktor penentu yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah jangka menengah yang telah ditetapkan.

- ##### **b. Partisipasi Masyarakat.**
- Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Pemberdayaan dengan mengikuti kaidah yang benar yaitu mengikuti suatu siklus kegiatan pemberdayaan melalui tahap-tahap inisiasi, sosialisasi, pemberian program, penguatan kemampuan baik petani sebagai individu maupun kelompoknya. Dengan demikian, kemampuan yang diperoleh masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan akan menjadi nilai baru dan terinternalisasi dalam kehidupan mereka setiap hari. Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan harus dalam konteks memberdayakan masyarakat sehingga visi yang diemban dapat dicapai. Dalam memberdayakan masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti: 1). Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh

- rakyat, 2). Adanya kontribusi dari masyarakat, 3). Menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat, 4). Bekerja untuk dan bersama masyarakat, 5). Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berbasis masyarakat, 6). Kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, dan 7). Desentralisasi.
- c. **Tersedianya Data Yang Akurat.** Desa/Kelurahan memerlukan data potensi dan kondisi daerah yang obyektif, akurat dan aktual, sebagai bahan informasi kebijakan daerah. Hal tersebut dikarenakan suatu informasi tidak akan bernilai tanpa didukung data. Informasi yang baik dan berbobot hanyalah informasi yang didukung oleh data. Penggunaan data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah dan sudah barang tentu akan mewujudkan kebijakan/keputusan yang salah pula. Selain hal tersebut, keputusan yang baik hanya berasal dari pembuat keputusan yang baik (jujur, berani, obyektif, dan tahu persoalan) dan didukung dengan data yang obyektif, mewakili (representatif), memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan relevan terhadap permasalahan yang dipecahkan.
 - d. **Tatakelola Pemerintah Desa/Kelurahan.** Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah dan ekonomi di desa/kelurahan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Pentingnya tata kelola pemerintahan dalam upaya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan secara arif-bijaksana dan berempati dalam melayani kepentingan masyarakat.

3.2. Arah Pembangunan

Arah pembangunan terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah untuk mencapai hasil yang optimal dilaksanakan melalui tiga pendekatan spesifik sebagai berikut:

- a. **Pembangunan Ekonomi produktif melalui Pemberdayaan Masyarakat,** pendekatan ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi desa dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumber daya alam, manusia, sumberdaya kelembagaan, serta sumber daya fisik) yang dimiliki masing-masing desa, oleh pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok-kelompok kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat dengan fokus utama pada pengembangan peternakan, Jagung, cendana dan Koperasi. Dalam pengembangan ekonomi produktif, masyarakat diberdayakan sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengambil inisiatif dan pengembangan kreatifitas dalam pembangunan.
- b. **Peningkatan produktivitas dan perluasan Kesempatan Kerja,** pendekatan ini lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian dengan fokus kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat yang sesuai dengan sumberdaya setempat dan mempunyai prospek meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat;
- c. **Peningkatan Kapasitas kelembagaan,** pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintah desa dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan manajemen pengelolaan sumberdaya pembangunan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif dan mampu menghadapi persaingan global.

3.3. Kegiatan Pembangunan

Kegiatan Program Desa Mandiri Anggur Merah mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan sebagai berikut:

a. Kegiatan Ekonomi Produktif

Kegiatan utama melalui alokasi dana sebesar Rp.250 juta diarahkan untuk pengembangan ekonomi produktif unggulan desa/kelurahan sebagai berikut:

- Pengembangan komoditas jagung dan ternak untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- Pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan budidaya rumput laut;
- Pengembangan komoditas perkebunan berorientasi ekspor antara lain jambu mete, kakao dan kopi;
- Pengembangan kegiatan industri kecil dan kerajinan rumah tangga;
- Pengembangan usaha jasa; koperasi, UMKM dan perdagangan.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di desa/kelurahan dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kegiatan peningkatan sumberdaya manusia antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan SDM aparatur Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksanaan tata kelola pemerintahan;
- Peningkatan SDM pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan/atau Koperasi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan Desa/Kelurahan;
- Peningkatan SDM angkatan kerja sesuai dengan basis ekonomi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi produktif sesuai keunggulan Desa/Kelurahan

c. Pembangunan Infrasatruktur

Kegiatan sosial dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu; (1) Peningkatan Pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan mutu lingkungan permukiman dan rumah layak huni; (3) Penyediaan air bersih dan penerangan rumah tangga; (4) Peningkatan akses dalam wilayah dan keluar wilayah pedesaan; (5) Peningkatan prasarana pengairan (embung, sumur bor, irigasi pedesaan); (6) Peningkatan penghijauan dan konservasi lahan; (7) Peningkatan akses informasi melalui Desa berdering; dan (8) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

d. Proyeksi Sasaran Desa/Kelurahan

Target Pembangunan Terpadu Desa/kelurahan Mandiri Anggur Merah tahun 2014-2018 sebagai berikut:

1. Target pembangunan pada tahun 2014, jumlah desa/kelurahan per kecamatan disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan melalui koordinasi yang intensif Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

9

- 1 Desa/Kelurahan untuk kecamatan dengan jumlah desa < 8 desa
- 2 Desa/Kelurahan untuk kecamatan dengan jumlah desa 8 s/d 13 desa/kelurahan
- 4 Desa/Kelurahan untuk kecamatan dengan jumlah desa 14 s/d 19 desa/kelurahan
- 5 Desa/Kelurahan untuk kecamatan dengan jumlah desa 20 ke atas

2. Pelaksanaan Program Pembangunan terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah diharapkan dapat menjangkau seluruh desa/kelurahan pada tahun 2017, sebagaimana tabel 9 berikut:

Tabel 9
Target Desa/kelurahan per kabupaten/Kota tahun 2014-2018

Tahun	Target Desa/kelurahan	Keterangan
2014	589	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Desa/kelurahan bisa berubah sesuai pemekaran Desa/kelurahan • Untuk tahun 2018 kegiatan Utama: Pembinaan Desa tahun 2017-2018 dan Evaluasi seluruh program
2015	589	
2016	589	
2017	589	
2018	-	
Jumlah	2.356	

3.4. Sasaran Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah

Sasaran lokasi pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah didasarkan pada kriteria yaitu:

- Memiliki prosentase Rumah Tangga Miskin terbanyak pada wilayah kecamatan sesuai hasil pendataan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Infrastruktur Pelayanan Sosial Dasar (air bersih, sanitasi lingkungan permukiman dan rumah layak huni) relatif rendah;
- Aksesibilitas wilayah di dalam daerah dan keluar daerah masih rendah;
- Sumber daya manusia relatif rendah yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk, Prosentase angka putus sekolah; angka buta huruf yang juga masih tinggi dan indikator pembangunan kesehatan rendah;
- Khusus untuk Desa, juga diperhatikan indikator Desa terpencil, terisolir dan tertinggal dan kurang memiliki akses pembangunan;
- Memiliki sumberdaya/potensi wilayah mendukung kegiatan ekonomi produktif.

3.5. Indikator Capaian Pembangunan

1. Indikator Kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pencapaian kemajuan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial dasar perlu ditingkatkan di Desa /Kelurahan Mandiri Anggur Merah. Pembangunan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial dasar melalui berbagai program/kegiatan sebagaimana tabel 10.

Tabel 10
Indikator Target Pelayanan Dasar dan kemiskinan Desa/Kelurahan
2014-2018

No	Pelayanan dasar dan kemiskinan	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pendidikan					
	- Penurunan Angka drop out	10	50	75	75	75
	- Menurunnya angka buta huruf	10	20	25	25	25
B	Kesehatan					
	- Menurunnya penduduk Kekurangan Gizi	25	50	75	75	75
	- Menurunnya Kasus kesehatan	25	50	75	75	75
	- Naiknya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan	25	50	75	75	75
C	KK miskin menurun	25	25	75	75	75

2. Tatakelola Pembangunan Desa

Indikator yang berkaitan dengan tatakelola pembangunan Desa antara lain sebagaimana terlihat pada tabel 11

Tabel 11
Indikator Target Capaian Tata Kelola Pembangunan
Desa/Kelurahan 2014-2018

No	Tatakelola Pemerintah Desa	Tingkat Perkembangan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Peraturan Desa tentang RPJMD Desa dan APB Desa	v	vv	vvv	vvv	vvv
2	Perencanaan dan Penganggaran partisipatif	v	vv	vvv	vvv	vvv
3	Rencana tahunan Desa/RKP Desa	v	vv	vvv	vvv	vvv
4	APB Desa	v	vv	vvv	vvv	vvv
5	Monitoring dan Evaluasi Partisipatif	v	vv	vvv	vvv	vvv
6	Adanya buku potensi Desa	v	vv	vvv	vvv	vvv
7	Pembukuan dan administrasi pemerintah Desa	v	vv	vvv	vvv	vvv
8	Terbentuknya kelompok dan pengurus usaha ekonomi produktif	v	vv	vvv	vvv	vvv
9	Rencana Kerja kelompok	v	vv	vvv	vvv	vvv
10	Berjalannya usaha ekonomi produktif ditingkat kelompok	v	vv	vvv	vvv	vvv

Keterangan: **v**: ada, **vv**: ada dan berkembang, **vvv**: ada, berkembang dan fungsional

3. Indikator Usaha Ekonomi Produktif Desa/Kelurahan

Usaha ekonomi Produktif sebagai salah satu indikator capaian pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah. Ekonomi produktif terutama berkaitan dengan skala dan jenis usaha. Indikator utama pengembangan ekonomi produktif sebagaimana tabel 11.

Tabel 11
Indikator Target Capaian Ekonomi Produktif Desa/Kelurahan
Tahun 2014-2018

No	Kinerja Ekonomi	2014	2015	2016	2017	2018
A	Usaha tani Lahan					
	Kering/Basah:					
1	Tanaman pangan (Jagung, palawija, padi)					
	- Luas tanam	50	50	75	75	75
	- Produksi	50	50	75	75	75
	- Produktivitas	10	25	50	50	50
2	Luas Usaha Perkebunan (Kopi,kakao, Jambu Mete, kelapa)	50	50	75	75	75
3	Jumlah populasi ternak sapi	25	50	75	75	75
4	Jml populasi ternak kecil (kambing dan babi)	50	50	75	75	75
5	Pendapatan usaha tani	10	25	50	50	50
B	Perikanan dan kelautan					
1	Budidaya rumput laut	50	50	75	75	75
2	Sarana tangkap/budidaya	25	50	75	75	75
3	Pendapatan usaha perikanan dan kelautan	10	25	50	50	50
4.	Pengembangan perikanan darat	10	25	50	50	50
C	Industri dan Jasa					
2	Jenis usaha industry	25	50	75	75	75
3	Jenis usaha jasa	25	50	75	75	75
4	Pendapatan usaha industri dan jasa	10	25	50	50	50
D	Kelompok/Koperasi					
1	Lembaga Koperasi	-	v	v	v	v
2	Anggota Koperasi	-	50	75	75	75
E	Cendana/Penghijauan Desa					
1	Luas tanam/jumlah anakan yang hidup	25	50	75	75	75
2	Jumlah petani yang mengembangkan	25	50	75	75	75

Keterangan : v : terbentuk

9

BAB IV PELAKSANA PROGRAM

4.1. Kelompok Kerja (POKJA)

Pembinaan dan pengendalian Program Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah sebagai Program hibah Desa/kelurahan diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal. Sehubungan dengan itu maka untuk menjamin pengendalian maka ditetapkan Kelompok Kerja (POKJA) secara berjenjang yaitu Pokja Provinsi, Pokja Kabupaten/Kota, Pokja Kecamatan dan Pokja Desa/kelurahan.

4.1.1. POKJA Provinsi

Untuk menjamin pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah mencapai tujuan dan sasaran secara optimal maka dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari Tim Pengendali Program, Tim Teknis Pengendali dan Sekretariat Pengendali di Tingkat Provinsi dengan komposisi sebagai berikut:

a. Pengendali Program

- Penanggungjawab : Gubernur Nusa Tenggara Timur
- Wakil Penanggungjawab : Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
- Anggota :
 - Kapolda Nusa Tenggara Timur
 - Danrem 161 Wirasakti
 - Kajati Nusa Tenggara Timur
 - Sekretaris Daerah Provinsi NTT
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Asisten Pemerintahan Umum

b. Tim Teknis Pengendali Program

- Ketua : Kepala Bappeda Provinsi NTT
- Sekretaris : Inspektur Provinsi NTT
- Anggota :
 - Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
 - Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
 - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT
 - Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT
 - Kepala BPMPD Provinsi NTT
 - Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT
 - Kepala Dinas PU Provinsi NTT

c. Sekretariat Pengendali Program:

- a. Kegiatan pengendalian administratif dan pelaporan dilaksanakan oleh Sekretariat Pengendali Program, yang berada pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Tugas sekretariat yaitu menyusun laporan bulanan dan menyiapkan materi rapat-rapat pokja;

9

- c. Untuk memudahkan koordinasi lapangan, maka dalam sekretariat tim pengendali disiapkan koordinator Provinsi yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan fungsi yang ada pada Bappeda Provinsi NTT;
- d. Keanggotaan dan tugas Sekretariat tim pengendali pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

4.1.2. **POKJA Kabupaten/Kota**

- a. Keorganisasian di Tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah diatur sesuai kebutuhan kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Sesuai kesepakatan Rapat koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota, maka diharapkan masing-masing Kabupaten/kota bersinergi dengan kebijakan Provinsi dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya dana pembangunan Desa/ kelurahan masing-masing Rp. 250 Juta untuk 1 Desa /kelurahan per Kecamatan;
- c. Untuk memudahkan koordinasi lapangan, maka melalui Bappeda Kabupaten/Kota disiapkan koordinator Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan fungsi struktural yang ada pada Bappeda Kabupaten/kota;
- d. Keanggotaan dan tugas Sekretariat Kelompok Kerja pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Kabupaten/kota ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota.

4.1.3. **POKJA Kecamatan**

- a. Keorganisasian di Tingkat Kecamatan dalam mendukung Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah diatur dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada sesuai kebutuhan Kecamatan serta melibatkan Polsek dan Koramil;
- b. Untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian maka masing-masing Kecamatan didukung dana operasional melalui APBD Provinsi;
- c. Pemanfaatan dana bantuan provinsi disenergikan dengan kegiatan Pemerintah Kecamatan;
- d. Di Kecamatan ditugaskan koordinator Kecamatan dengan memanfaatkan fungsi seksi pada Kecamatan.

4.1.4. **POKJA Desa/Kelurahan**

- a. Keorganisasian di Tingkat Desa/Kelurahan mengoptimalkan kelembagaan desa/kelurahan yang ada;
- b. Untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian kelompok bersama PKM, maka masing-masing Desa/kelurahan memanfaatkan dana operasional Bantuan APBD Provinsi.

4.2. **Mekanisme Kerja Kelompok Kerja**

Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah untuk dapat mencapai hasil yang optimal harus didukung perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang berkualitas. Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut maka harus didukung peran yang optimal dari pemangku kepentingan pembangunan sebagai berikut:

9

4.2.1. **Tingkat Provinsi**

- a. Bappeda Provinsi bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten/Kota mendesain perencanaan kegiatan terpadu bekerjasama dengan SKPD teknis terkait yang diawali dengan identifikasi potensi dan permasalahan dasar Desa/Kelurahan;
- b. SKPD tingkat provinsi bekerjasama dengan SKPD Kabupaten/Kota menyiapkan kegiatan pendukung dan pembinaan teknis;
- c. Biro Keuangan menyiapkan mekanisme transfer dana bantuan ke nomor rekening Desa/Kelurahan melalui Bank NTT;
- d. Inspektorat provinsi menyiapkan instrumen pengawasan pemanfaatan dan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan keuangan.

4.2.2. **Tingkat Kabupaten/Kota**

- a. Melalui pemerintah kabupaten/Kota dilaksanakan langkah-langkah persiapan operasional baik pada SKPD kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa/kelurahan
- b. Untuk meningkatkan sinergi pembangunan, maka setiap langkah operasional yang akan dilaksanakan, maka dilakukan pembahasan secara intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjut disebut (TAPD) Kabupaten/Kota didukung SKPD teknis;
- c. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah maka dibutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota yaitu: (1) Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut (BPD); (2) Penataan Administrasi Desa dan Keuangan Desa; (3) Penguatan Mekanisme Musrenbang Dusun dan Desa; (4) Pemberian/pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD) Dengan Pola Minimal; (5) Pendampingan dan pembinaan terhadap desa dan kelompok penerima dana bantuan dari provinsi, dan (6) Pengawasan terhadap kinerja Pendamping Kelompok Masyarakat desa/kelompok.

4.3. **Mekanisme dan Seleksi Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah**

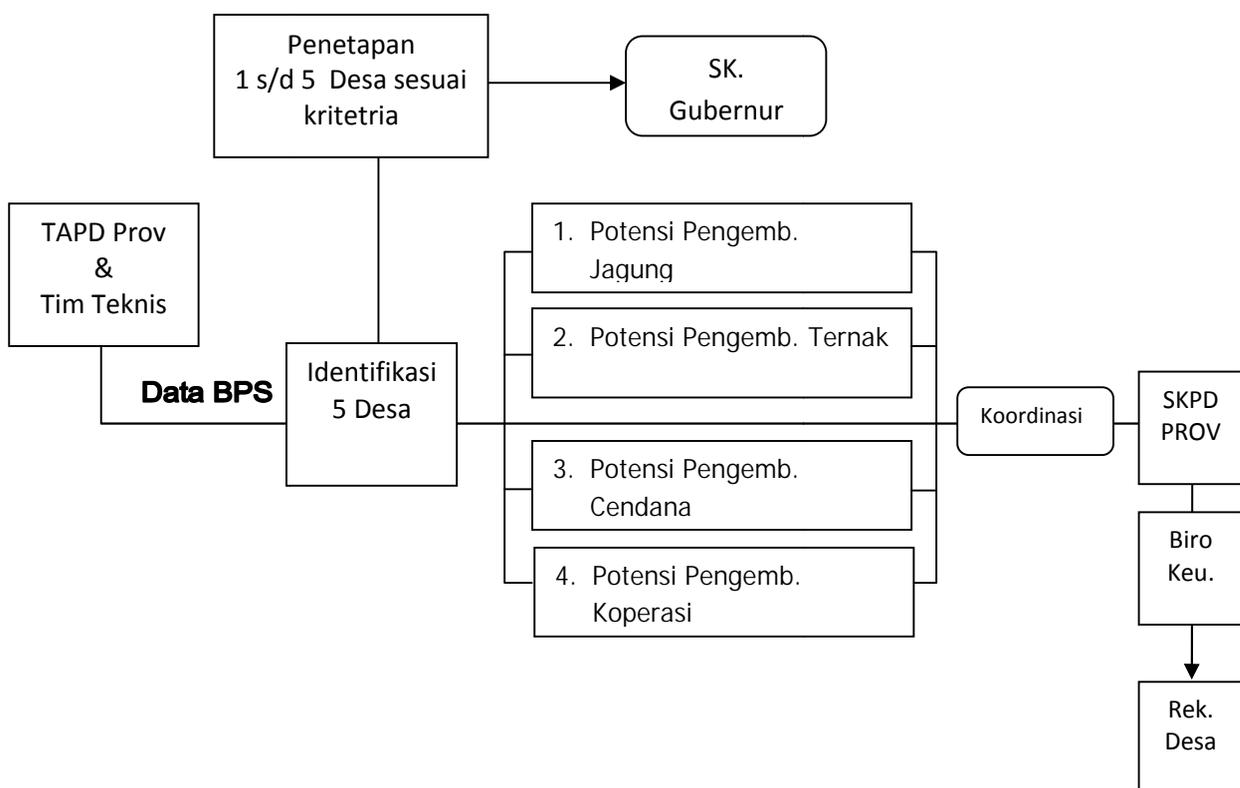
Mekanisme Seleksi Desa/kelurahan lokasi dilaksanakan secara obyektif sesuai dengan arah pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah sebagai berikut:

- a. TAPD Provinsi melakukan identifikasi terhadap nama-nama Desa berdasarkan kriteria BPS NTT, yaitu Desa yang memiliki prosentase rumah tangga miskin terbanyak pada setiap kecamatan dan meminimasi 1-5 Desa/Kelurahan;
- b. TAPD Provinsi dibantu Tim Teknis Provinsi melakukan pendataan terhadap karakteristik desa, potensi desa dan kondisi sosial ekonomi dari setiap desa yang telah diidentifikasi, agar mempunyai gambaran awal mengenai kondisi Desa/Kelurahan, sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan karakteristik lokal setiap desa/kelurahan;
- c. TAPD Provinsi dibantu Tim Teknis Provinsi melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendiskusikan nama-nama desa/kelurahan yang telah diidentifikasi untuk mendapatkan masukan dalam rangka penentuan desa/kelurahan untuk setiap kecamatan;

9

- d. Desa dan kelurahan yang telah disepakati bersama antara TAPD provinsi dan TAPD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
- e. Keputusan Gubernur tersebut diserahkan (1) kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa/kelurahan untuk mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif; (2) SKPD tingkat provinsi untuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan setiap tahun, pembinaan, pengawasan dan evaluasi; (3) Biro keuangan Setda Provinsi NTT untuk mengatur alokasi dana yang akan ditransfer ke Bank NTT bekerjasama dengan SKPD Pengelola, menurut jumlah Desa/Kelurahan pada setiap Kabupaten/Kota.

Bagan 1. Mekanisme Penetapan Desa



4.4. Mekanisme dan Seleksi Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM)

4.4.1. Mekanisme Seleksi

- a. Pendaftaran calon PKM akan dilaksanakan di setiap kabupaten/kota oleh Tim Pembina dan Pengendali Tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Bappeda Kabupaten/Kota;
- b. Seleksi terhadap calon PKM akan dilakukan secara bertahap oleh tim provinsi dan kabupaten/kota, yaitu seleksi terhadap administrasi dan tertulis;
- c. Calon PKM yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti test tertulis yang dilaksanakan di tempat pendaftaran masing-masing;
- d. Bagi calon PKM yang telah lulus tes administrasi dan tertulis akan diumumkan Sekretaris Daerah melalui media massa lokal;
- e. PKM definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

9

- f. Keputusan Gubernur tersebut ditindaklanjuti dengan kontrak kerja tahunan antara kepala Bappeda Provinsi NTT dengan PKM dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah.

4.4.2. **Seleksi PKM**

1. Seleksi Administrasi
 - a. Pendidikan sarjana (S1/D4);
 - b. Maksimal berumur 40 tahun pada Desember tahun pendaftaran;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani yang ditunjukkan dengan Surat Kesehatan Sehat yang masih berlaku dari Rumah Sakit. Bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki rumah sakit, maka surat keterangan sehat dapat diperoleh dari Puskesmas terdekat;
 - d. Memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - e. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kriminal yang masih berlaku dari kepolisian setempat. Bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki Kepolisian Resort, maka surat catatan kriminal dapat diperoleh di Kepolisian Resort terdekat;
 - f. Tidak sedang terikat dengan Kontrak kerja dengan instansi lain yang ditunjukkan dengan pernyataan tertulis dalam kertas bermaterai yang cukup;
 - g. Bersedia ditempatkan di desa/kelurahan selama masa kontrak;
 - h. Mengenal dengan baik kondisi wilayah (fisik, sosial budaya, ekonomi, sumberdaya alam, manusia dan sosial) yang akan didampingi;
 - i. Lebih diutamakan yang berasal dari desa/kelurahan setempat. Jika Desa/Kelurahan tersebut tidak memiliki calon PKM yang memenuhi criteria seleksi, dapat direkrut dari Desa/kelurahan terdekat dalam kecamatan tersebut.
2. Tes tertulis
 - a. Tes tertulis dilakukan serentak di 22 Kabupaten/Kota;
 - b. Calon PKM wajib mengikuti tes dan apabila tidak hadir dinyatakan gugur.
3. Magang dan Pelatihan PKM

Calon PKM yang telah lulus seleksi administrasi dan tertulis wajib magang sebagai bentuk pelatihan mandiri pada PKM senior untuk pendampingan masyarakat, pengorganisasian kelompok masyarakat, kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan partisipatif. Selanjutnya setelah magang dilaksanakan maka para PKM akan mendapat pelatihan yang waktunya disesuaikan untuk meningkatkan kompetensinya. Materi pelatihan PKM antara lain sebagai berikut:

 - a. *Materi Dasar:*
 - 1) Filosofi Dasar Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah
 - 2) Kedudukan dan Peran PKM
 - 3) Teknik memfasilitasi dan mendampingi Kelompok
 - b. *Materi Inti*
 1. Identifikasi Potensi Ekonomi di Desa/Kelurahan
 2. Pembuatan Proposal usaha dan Perhitungan kebutuhan anggaran kelompok

3. Pengembangan kewirausahaan dan koperasi.
4. Integrasi dan sinergi program
5. Strategi pemasaran

c. *Materi Penunjang*

- 1) Tatakelola pemerintahan desa/kelurahan
- 2) Penyusunan laporan dan format laporan

4.4.3. **Tugas Pokok dan Fungsi PKM**

1. Tugas

- a. Memfasilitasi proses identifikasi dan pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat;
- b. Anggota kelompok lebih diprioritaskan pada rumah tangga miskin menurut data BPS. (penerima BLT, PKH, Jamkesmas/Jamkesda, dan Raskin juga menjadi pertimbangan untuk masuk sebagai anggota kelompok, dan jumlah kelompok sesuai kebutuhan);
- c. Mendiskusikan tentang penentuan jumlah anggota dan kelompok ditingkat Desa/ Kelurahan secara partisipatif;
- d. Membantu mengidentifikasi jenis usaha ekonomi produktif yang akan dikembangkan;
- e. Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat/kelompok dalam menjalankan usaha ekonomi produktifnya;
- f. Membantu penataan administrasi dan pelaporan perkembangan kegiatan usaha kelompok ekonomi produktif masyarakat.
- g. Melakukan dokumentasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan kelompok, termasuk metode dan pendekatan yang digunakan.
- h. Bersama pemerintah desa merancang alokasi penggunaan dana ADD pada proses Musrenbang desa/kelurahan secara partisipatif.
- i. Bersama pemerintah desa/kelurahan melaksanakan Musrenbang Desa/ kelurahan, penyusunan peraturan Desa secara partisipatif.
- j. Bersama pemerintah desa/kelurahan memfasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi di desa/kelurahan

2. Fungsi.

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kelompok usaha ekonomi masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi bimbingan teknis pelaksanaan pembangunan desa mandiri anggur merah;
- c. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis pelaksanaan desa mandiri anggur merah.

4.4.4. Hak dan Kedudukan PKM:

1. Hak PKM

- a. Mendapatkan upah kerja dan Operasional sebagai tenaga pendamping yang diatur berikut:
 - Bagi PKM yang memfasilitasi 1 desa/kelurahan sebesar Rp. 2.000.000 per bulan (Upah Kerja Rp. 1.020.000 dan Operasional Rp. 980.000)
 - Bagi PKM yang memfasilitasi 2 desa/kelurahan sebesar Rp. 2.500.000 per bulan (Upah Kerja Rp. 1.020.000 dan Operasional Rp. 1.480.000)
- b. Penyaluran upah kerja dan biaya operasional PKM disalurkan melalui Bank NTT setempat.

2. Kedudukan PKM

- a. Pendamping Kelompok Masyarakat berkedudukan di Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Hal teknis lainnya menyangkut kedudukan PKM ditetapkan dalam Kontrak kerja.

9

BAB V

KERANGKA PENGELOLAAN DANA

5.1. Sumber Dana

Sumber dana Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Dana Hibah Desa untuk kelompok masyarakat (POKMAS) usaha ekonomi produktif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT dan sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembayaran gaji PKM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT;
3. Biaya operasional lainnya dilakukan secara swadaya.

5.2. Penyaluran dan Pengelolaan Dana

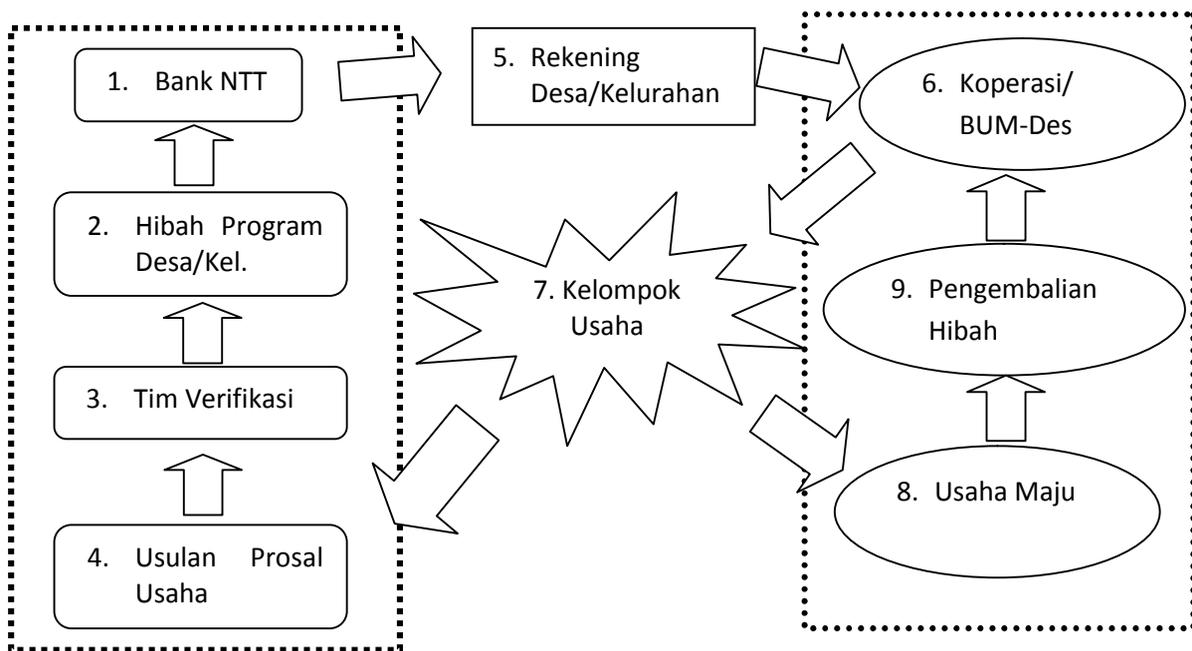
5.2.1. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Pemerintah Desa/Kelurahan bersama Masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa/BUMDES;
2. Koperasi/BUMDES membuat proposal usulan dana kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi. Proposal dimaksud ditanda tangani oleh ketua Koperasi/BUM-Des, mengetahui kepala desa/lurah;
3. Proposal diverifikasi oleh tim yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur untuk pengajuan dana hibah;
4. Setelah dilakukan verifikasi, proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan;
5. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari Proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan naskah hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/Lurah;
6. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT;
7. Rekening Desa/Kelurahan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Bendahara Desa/Kelurahan dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM);
8. Hibah Program yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi ke Rekening Desa/kelurahan adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
9. Kepala Desa/Lurah menyalurkan dana dari rekening desa/kelurahan ke rekening Koperasi/BUM-Des dalam bentuk Pinjaman Desa/Kelurahan atau Penyertaan Modal dari Desa/Kelurahan
10. Untuk keamanan pengendalian maka Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) sebagai pengelola keuangan Hibah Desa/Kelurahan dibantu PKM dan pengawasan oleh Pemerintah Desa/kelurahan.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran bantuan akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

5.2.2. Mekanisme Pengelolaan Dana

1. Koperasi/BUM-Des melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada Anggota Koperasi sebagai Pinjaman.
2. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi.
3. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukan untuk konsumsi.
4. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi atau BUM-Des.
5. Koperasi atau BUM-Des bersama pemerintah desa/kelurahan dan PKM memantau perkembangan usaha anggota koperasi.
6. Anggota Kelompok wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke Koperasi/BUM-Des.
7. Koperasi/BUM-Des akan melakukan perguliran ke anggota Koperasi yang lain.

Bagan 2
Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan Dana



5.3. Mekanisme Kerja PKM

1. Penggajian dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja yang akan disepakati para pihak;
2. Pembayaran upah kerja akan dilaksanakan apabila tenaga pendamping memenuhi kewajiban kontrak kerja;
3. Insentif lainnya berdasarkan penilaian prestasi kerja masing-masing tenaga pendamping yang diberikan terbatas hanya pada yang berprestasi;
4. Upah Kerja PKM akan dibayarkan langsung oleh Biro Keuangan Setda Provinsi NTT bekerjasama dengan SKPD pengelola ke rekening setiap PKM Desa/Kelurahan di Bank NTT;
5. Penyaluran dana ke rekening dilakukan setiap bulan setelah kewajiban para tenaga pendamping dipenuhi sesuai ketentuan dalam kontrak.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1. Monitoring

Monitoring dilakukan secara efektif dan efisien dengan melibatkan unsur pemerintah Kabupaten/kota, Lembaga keagamaan, Pers dan perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan

6.2. Evaluasi

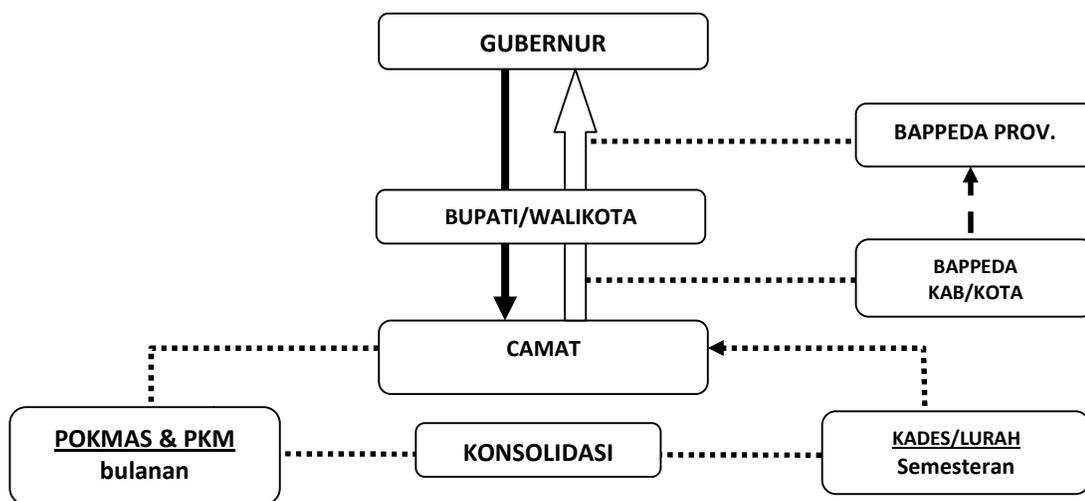
1. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dilakukan secara berkala oleh Kabupaten/Kota;
2. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah dilakukan secara semesteran di tingkat provinsi dengan melibatkan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6.3. Pelaporan

Laporan penyelenggaraan pembangunan terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah berfungsi sebagai bahan untuk menilai efisiensi dan efektivitas terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu mekanisme penyelenggaraannya ditentukan sebagai berikut:

1. PKM bersama kelompok masyarakat menyampaikan laporan perkembangan usaha bulanan kepada Kepala Desa/Lurah;
2. Kepala Desa/Lurah menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap semester kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
3. Camat menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;
4. Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota menyampaikan laporan semesteran kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi;
5. Kepala Bappeda Provinsi menyampaikan laporan evaluasi kepada Gubernur untuk dijadikan sebagai bahan pembinaan dan supervisi.

Bagan 3. Mekanisme Pelaporan



Keterangan:

- Garis Penugasan
- ⋯→** Garis Pelaporan
- - ->** Garis Koordinasi
- ⇨** Garis Pertanggungjawaban

BAB VII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

7.1. Pengendalian

a. Pemerintah Provinsi;

Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota;

Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

c. Pemerintah Kecamatan;

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam kelompok usaha bersama.

d. Pemerintah Desa;

1. Mengendalikan teknis pengelolaan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam kelompok usaha bersama;
2. Mengendalikan pemanfaatan dana bantuan operasional Desa/kelurahan yang dialokasikan melalui APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/ Kota secara efisien dan efektif.
3. Untuk mencegah kegagalan pembangunan yang diakibatkan oleh lemahnya pengendalian pembangunan maka Pemerintah Desa bertugas sebagai pengendalian terdepan pembangunan;
4. Pendampingan di tiap kelompok akan dilaksanakan oleh PKM desa/ kelurahan.

7.2. Pembinaan

a. Pemerintah Provinsi bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan efektifitas tugas pendamping dan pengelola tingkat Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program;
2. Mengatur proses koordinasi pelaksanaan program, sinkronisasi penyediaan input kegiatan, menilai usulan program dari kabupaten serta mengesahkan penyaluran bantuan program;
3. Menilai ketepatan sasaran lokasi kegiatan program di tingkat kabupaten pada kecamatan potensial dengan lokus desa;
4. Pembinaan secara berkala akan dilaksanakan oleh SKPD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Pemerintah Kabupaten

1. Melakukan pembinaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu dan membentuk satuan kerja/unit pelaksana proyek sesuai pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan program;
2. Membina kerja unsur anggota satuan kerja pengelola pelaksanaan kegiatan dan unsur Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM);
3. PKM membantu masyarakat dalam hal: perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dana pemberdayaan ekonomi secara swakelola.

c. Pemerintah Kecamatan

1. Membina Pendamping Kelompok Masyarakat dalam hal:
 - a. Pembentukan kelompok usaha masyarakat, pengembangan dan pemanfaatan lahan usaha;
 - b. Pengembangan usaha dan pembuatan paket investasi;

- c. Penyediaan akses kredit usaha dan pengeralahan input produksi;
 - d. Pengelolaan usaha ekonomi desa, dan pengelolaan pemanfaatan dana pemberdayaan ekonomi terpadu;
2. Memberikan masukan terhadap rencana kegiatan usaha ekonomi produktif, pola usaha pertanian, dan paket investasi dengan skala ekonomi.

7.3. Pengawasan

a. Pemerintah Provinsi;

1. Pengawasan penggunaan dana bantuan Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi secara berkala disertai laporan hasil pemeriksaan kepada Gubernur;
2. Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku terhadap manajemen pengelolaan di Provinsi maupun di desa.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota;

Mengawasi kinerja unsur anggota satuan kerja pengelola pelaksanaan kegiatan dan unsur Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM).

c. Pemerintah Kecamatan;

1. Mengawasi pelaksanaan pendampingan kelompok masyarakat di desa/kelurahan;
2. Mengawasi kinerja Koperasi dan pengelola dana hibah, tugas pemerintah desa dan Pendamping Kelompok Masyarakat(PKM).

d. Pemerintah Desa/Kelurahan.

Mengawasi kinerja Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) serta Kelompok Masyarakat (POKMAS).

7.4. Manajemen Pelaksana Program Pendukung

1. Manajemen pengelola kegiatan langsung ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja;
2. SKPD dan Satker berkoordinasi dengan Sekretariat POKJA Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah dan/atau Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota untuk menjamin sinergi pembangunan di Desa..

9

**BAB VIII
PENUTUP**

Peraturan Gubernur ini selanjutnya akan dijabarkan dalam petunjuk teknis yang lebih operasional yang akan menjadi pegangan di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Untuk menjamin sinergitas pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, petunjuk teknis yang ditetapkan akan dibahas secara terpadu antara TAPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan TAPD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA





YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA D.III STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI S1 STATUS TERAKREDITASI A

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PASCASARJANA (S2) TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 663/I/U/2015
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Badan Kesbanglinmas DIY
Jl. Jendral Sudirman No.5
Yogyakarta 55233

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 22 Desember 2015 sampai selesai. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : ANASTASIUS YOANES SIGA.
No Mhs : 12520147.
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur).
Tempat : Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT.
Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Tri Daya Rini, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Desember 2015
Ketua

Habib Muhsin, S.Sos., M.Si.

NIY. 170 230 189



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA D.III STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI S1 STATUS TERAKREDITASI A

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PASCASARJANA (S2) TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 432/I/T/2015

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

- Nama : ANASTASIUS YOANES SIGA.
Nomor Mahasiswa : 12520147.
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
- Tempat : Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT.
 - Sasaran : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur).
 - Waktu : 22 Desember 2015 s.d. selesai.

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 22 Desember 2015

Ketua

Habib Muhsin, S.Sos., M.Si.
NIY. 170 230 189

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan wajib penelitian.



FRANSISKUS ANA MEO
KEPALA DESA BOWALI



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jalan Gajah Mada No. 4 Telepon/Fax (0384) 21013
BAJAWA

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 071 / BKPL / 86 / III / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ngada, dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ANASTASIUS YOANES SIGA.
NIM : 12521047
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Kebangsaan : Indonesia

Benar – benar telah melakukan kegiatan Penelitian di Desa Bowali Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Desa Bowali Nomor 140/Pemdes/DB/64/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 dengan Laporan Hasil Penelitian berjudul :

**“ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM ANGGARAN
UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH) UNTUK PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (STUDI PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI DESA BOWALI-
KECAMATAN BAJAWA-KABUPATEN NGADA-NUSA TENGGARA TIMUR) ”**

Demikian Surat Keterangan Selesai Penelitian ini dibuat untuk urusan selanjutnya.

Dikeluarkan di : Bajawa

Pada Tanggal : 3 Maret 2016

An. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Ngada,
Kabid. Pranata Sosial dan Penanganan Konflik

Ub. Kasubid Pranata Sosial,

BADAN
KESBANG, POL
DAN LINMAS

WETO YAKOBUS

Penata TK. I

NIP. 19590215 198603 1 020



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 29 Desember 2015

Nomor : 074/2816Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Di

KUPANG

Memperhatikan surat :

Dari : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Yogyakarta
Nomor : 663/I/U/2015
Tanggal : 22 Desember 2015
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN"**, kepada :

Nama : ANASTASIUS YOANES SIGA
NIM : 12520147
No. HP/Identitas : 085 239 932 646 / No. KTP. 5309060809930002
Prodi/Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Yogyakarta
Lokasi : Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Waktu Penelitian : 30 Desember 2015 s.d. 31 Maret 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/ penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
KABID KESBANG

Dra. AMIARSI HARWANI, SH, MS
NIP. 19600404 199303 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jalan Gajah Mada No. 4 Telepon/Fax (0384) 21013
B A J A W A

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 071 / BKPL / 12/1/2016

Surat Kepala Direktorat Sospol Provinsi NTT Nomor : 1832 /04/III/Sospol - NTT/1993 tanggal 26 April 1993 tentang Prosedur Kegiatan Penelitian Survey dan Research; dan Surat dari KPPTSP Kupang Nomor : 070/07/KPPTSP/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Ijin Penelitian .

Setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi maka dapat diberikan rekomendasi kepada:

Nama : ANASTASIUS YOANES SIGA
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 12520147
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Alamat : Jln.Teratai No.10 Kota Kupang
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan kegiatan penelitian sesuai Judul :

**“ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM ANGGARAN
UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH) UNTUK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Penelitian Deskriptif di Desa Bowali Kecamatan
Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur) “**

Lokasi Penelitian : Desa Bowali
Lamanya : 01 (Satu) Bulan
Penanggung Jawab : Ketua Sekolah Tinggi PMD APMD Yogyakarta .

Selama melakukan kegiatan penelitian di harapkan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan ke Camat setempat.
2. Selama melakukan penelitian tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain.
3. Berbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Wajib melaporkan tentang hasil penelitiannya kepada Bupati Ngada cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Ngada.
5. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya dan dimintakan perhatian agar instansi pemerintah yang dihubungi dapat memberikan bantuan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Bajawa
pada tanggal : 11 Januari 2016.

an. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Ngada,
Kabid Pranata Sosial dan Penanganan Konflik,

Ub. Kasubid Pranata Sosial,



WETO YAKOBUS

Penata TK.I

NIP. 19590215 198603 1 020

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Bajawa di tempat.
2. Kepala Desa Bowali di tempat.
3. Ketua Sekolah Tinggi PMD APMD Yogyakarta
4. Yang bersangkutan di tempat.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)

Jl. Teratai No.10 Kota Kupang - Telp./ Fax. 0380 - 833213
Email : kpptsprovntt@yahoo.com; Website : www.kpptsprovntt.org

Kupang, 5 Januari 2016

Nomor : 070/ 07 /KPPTSP/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Ngada
Cq. Kepala Badan Kesbang Linmas
Kabupaten Ngada
di -
BAJAWA

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BKBP.070/63/SET/01/2016 Tanggal 04 Januari 2016, tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian, dan setelah mempelajari rencana kegiatan/proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Izin Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : ANASTASIUS YOANES SIGA
NIM : 12520147
Jurusan / Prodi : Ilmu Pemerintahan
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian dengan judul :

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PROGRAM ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Bowali Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur) "

Lokasi : Desa Bowali Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada
Pengikut : -
Lama Penelitian : 06 Januari s/d 31 Maret 2016
Penanggungjawab : Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD Yogyakarta

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati Ngada.

Demikian surat izin ini dan atas perhatian disampaikan terima kasih.

an. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala KPPTSP Provinsi NTT

Drs. YOHAKIM KOTAN
Pembina Tk. I
NIP. 19620816 199302 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ngada di Bajawa;
6. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD Yogyakarta di Kupang;
7. Yang bersangkutan di Tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Gajah Mada No. 4 Telepon/Fax (0384) 21013
B A J A W A

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 071 / BKPL / 12/1/2016

Surat Kepala Direktorat Sospol Provinsi NTT Nomor : 1832 /04/III/Sospol - NTT/1993 tanggal 26 April 1993 tentang Prosedur Kegiatan Penelitian Survey dan Research; dan Surat dari KPPTSP Kupang Nomor : 070/07/KPPTSP/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Ijin Penelitian .

Setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi maka dapat diberikan rekomendasi kepada:

Nama : ANASTASIUS YOANES SIGA
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 12520147
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Alamat : Jln.Teratai No.10 Kota Kupang
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan kegiatan penelitian sesuai Judul :

**“ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM ANGGARAN
UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH) UNTUK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Penelitian Deskriptif di Desa Bowali Kecamatan
Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur) “**

Lokasi Penelitian : Desa Bowali
Lamanya : 01 (Satu) Bulan
Penanggung Jawab : Ketua Sekolah Tinggi PMD APMD Yogyakarta .

Selama melakukan kegiatan penelitian di harapkan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan ke Camat setempat.
2. Selama melakukan penelitian tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain.
3. Berbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Wajib melaporkan tentang hasil penelitiannya kepada Bupati Ngada cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Ngada.
5. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya dan dimintakan perhatian agar instansi pemerintah yang dihubungi dapat memberikan bantuan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Bajawa
pada tanggal : 11 Januari 2016.

an. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Ngada,
Kabid Pranata Sosial dan Penanganan Konflik,

Ub. Kasubid Pranata Sosial,
WETO YAKOBUS
Penata TK.I
NIP.19590215 198603 1 020

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Bajawa di tempat.
2. Kepala Desa Bowali di tempat.
3. Ketua Sekolah Tinggi PMD APMD Yogyakarta
4. Yang bersangkutan di tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
KECAMATAN BAJAWA
DESA BOWALI**

Alamat : Jln. Radho Dewa No. 1 Fuy

Nomor : 140/Pemdes/DB/64/02/2016

Fuy, 25 Februari 2016

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Selesai
Penelitian

Kepada Yth:
Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa "APMD" Yogyakarta
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tercantum di bawah ini telah selesai melakukan penelitian lapangan yang dimulai pada tanggal 12 Januari 2016 sampai tanggal 24 Februari 2016 di Desa Bowali untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi.

Adapun nama Mahasiswa dan judul penelitian adalah:

Nama : Anastasius Yoanes Siga

No Mhs : 12521047

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur).

Tempat : Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.



Tembusan dengan hormat disampaikan kepada

1. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Ngada di Bajawa
2. Bapak Camat Bajawa di Surisina
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
KECAMATAN BAJAWA
Jln. W. J. Lalamentik Telp. 21451
SURISINA

REKOMENDASI SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 071 / 09 / 130 / 03 / 2016

Memperhatikan Surat Kepala Direktorat Sospol Provinsi NTT Nomor 1832/04/III/Sospol – NTT / 1993 tanggal 26 April 1993 tentang Prosedur Kegiatan Penelitian Survey dan Research; dan surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ngada Nomor : 071/BKPL/12/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.

Diberikan Rekomendasi Selesai Penelitian kepada :

Nama : ANASTASIUS YOANES SIGA
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 12520147
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jln. Teratai No. 10 Kota Kupang
Kebangsaan : Indonesia

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul :

“ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Penelitian Deskriptif di Desa Bowali Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur) “

Lokasi Penelitian : Desa Bowali
Lama Penelitian : 01 (satu) bulan
Penanggung Jawab : Ketua Sekolah Tinggi PMD APMD Yokyakarta

Demikian Surat Keterangan / Rekomendasi Selesai Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Surisina, 03 Maret 2016

An. Camat Bajawa,

Sekretaris

Kasi Pelum



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Ngada di Bajawa;
2. Ketua Sekolah Tinggi PMD APMD Yokyakarta
3. Yang bersangkutan di tempat;
4. Arsip.